



**GELIAT DEMOKRAT
DAN REAKSI PDIP**

**GAWAT, INFLASI
MAKIN MENINGKAT**

**INFO SUMSEL:
MASIFKAN
SOSIALISASI DAN
EDUKASI HINGGA
KE DESA**

**PENGENDALIAN
INFLASI JABAR
TERBAIK DI
JAWA-BALI**

**DUNIA KRISIS
ENERGI, REAKTOR
NUKLIR HIDUP LAGI**

**ADA (BANYAK)
KEKERASAN
DI PESANTREN**

**POLEMIK PENJABAT
KEPALA DAERAH
DIIZINKAN MUTASI
DAN PECAT PEGAWAI**

**JOKOWI BOLEH 3
PERIODE URUSANNYA
SOAL ETIKA**

**INDUSTRIALISASI NTB
SUDAH MENJADI
KEHARUSAN**

**MENPAN-RB
ABDULLAH AZWAR ANAS**

**BUKAN INSTAN
BUKAN KARBITAN**

**WAKTUNYA BERALIH
DARI ENERGI FOSIL**

**TAHUN SIBUK BAGI
SHIN TAE-YONG**

info indonesia INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**

PENDIRI

Usman Rizal, Rizky Darmawindra

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM

Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN

Zulfahmi Jamba

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

REDAKTUR PELAKSANA

Rusdiyono, Rahmad R

REDAKTUR

Raden Mohd Solehin, Andyanto,

Rahmad R, Rusdiyono,

Benni Martha Daya, Yuliani

REPORTER

Desi Wulandari, Anugrah Dany, Rifky Ilmi,

Pras Budi Prasetya,

Ahmad Yani, Yuni Watiana,

Mario Ananta, Rahmad KR, Iwan Fals,

Heni Elsa Wulandari, Dedy Sagita, Nina

Iskandar, Jifran, Boyke Parningotan Hutapea

(Bekasi), Dian Taresa (Kalimantan Tengah),

Zaki (Kalimantan Timur),

Basri (Kalimantan Utara), Lalu Suparman

Abmakti (Nusa Tenggara Barat), Abu Bakar

Usman (Kepulauan Bangka Belitung)

EDITOR & GRAFIS

Al Amin, Achilles

TATA LETAK

Sujatmiko

MEDIA SOSIAL

Haidir Ali

KEUANGAN

Dra Nurhamida

SEKRETARIS REDAKSI

Ega Tri Agustin

PENGEMBANGAN BISNIS

Kiki Ibrahim

RM Solehin

DISTRIBUSI

Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT

A/N : PT. Wahana Multimedia

BCA : No Rek : 553-041-4321

KCP Otista Jakarta Timur

KENDALI

Masih dalam rentang kendali. Dinamika ekonomi dan politik menjadi lebih cepat saat kita memasuki September. Akhir triwulan III-2022. Triwulan lazim menjadi pembabakan di ekosistem ekonomi bisnis. Tapi, siapa dapat menyangkal dinamika ekonomi dan bisnis tanpa imbas di ranah politik?

Dalam konteks inilah kita mendapat jawaban atas pertanyaan langkah pemerintah berani menaikkan harga bahan bakar minyak pada awal September 2022. Sementara harga minyak mentah di pasar global cenderung turun. Dampak politik kenaikan harga BBM sudah dalam hitungan. Ya itu tadi, masih dalam rentang kendali.

Kecenderungan penurunan harga minyak mentah dunia sudah tampak sejak Juli 2022. Daya serap pasar yang melemah ikut mempengaruhinya. Karena secara global terjadi gejala inflasi yang mengarah ke resesi. Jadi, kegiatan ekonomi pun menurun.

Di dalam negeri, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price*) yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pun sudah turun dari USD117,62 per barel pada Juni 2022 menjadi USD106,73 per barel sebulan kemudian. Hitungan ICP yang lebih rendah ini akan menjadi patokan dalam besaran subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam hitung-hitungan bendahara negara, harga minyak senantiasa akan fluktuatif. "Sekarang kita melihat harga minyak sedikit menurun, tetapi kami tidak yakin kapan ini akan naik atau apakah akan turun dan terus turun lagi," kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam acara Bloomberg Recovery and Resilience di Jakarta, Senin, 12 September 2022.

Menurut Bu Menkeu, bahkan jika ICP turun di bawah USD90 sekalipun, maka rata-ratanya adalah USD97 per barel. Dengan perhitungan itu, dia melihat angka kenaikan subsidi dari Rp502 triliun masih akan tetap naik. Subsidi akan naik menjadi Rp653 triliun jika harga ICP adalah rata-rata USD99 per barel. Sedangkan jika harga ICP sebesar USD85 per barel sampai Desember 2022, maka kenaikan subsidi menjadi Rp640 triliun.

Sedangkan sebagai pengobat kekecewaan, prioritasnya adalah warga yang paling terdampak, kelompok termiskin, akan mendapat bantuan langsung tunai. "... Ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden maka sebagian dari belanja yang tadinya untuk keseluruhan subsidi digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Kita juga akan memantau dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan dari kenaikan BBM yang diumumkan Menteri ESDM," kata Bu Menkeu.

Dalam hitung-hitungan bisnis, jumlah bantuan sosial yang belum sampai Rp25 triliun, jauh lebih rendah nilainya daripada gelontoran subsidi yang mencapai ratusan triliun. Dampak politiknya juga dalam rentang kendali, termasuk rangkaian unjuk rasa itu. Paling tidak sepanjang triwulan terakhir (Oktober-Desember) 2022.

Bagaimana awal tahun depan? Ya, triwulan I-2023. Pemerintah malah berani mensosialisasikan kebijakan menghapus daya listrik 450 Volt Ampere (VA) sehingga batas bawah daya listrik untuk pelanggan PLN adalah 900 VA. Terlalu dini untuk membahas rentang kendali soal ini. Tunggu satu triwulan atau katakanlah 100 hari lagi. ●

ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

● TELP 021-791 96781 ● FAX 021-791 96786

Twitter

: @1nfoindonesia

Facebook

: infoindonesia.id

Instagram

: @infoindonesia.idn

Email

: redaksi@infoindonesia.id



DAFTAR ISI

EDISI
BULAN
SEPTEMBER
2022



6 INFO UTAMA

Menjelang 100 hari perombakan kabinet banyak perkembangan politik terjadi. Rapat, musyawarah, permufakatan, atau dengan nama lain, menjadi pemicunya. Namun, semua mengarah ke satu persoalan inti: proses suksesi.



20 INFO SUMSEL

Hingga saat ini masih banyak masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan yang belum mengerti dan sadar terkait permasalahan hukum. Untuk itu, perlu sosialisasi dan edukasi hukum secara masif institusi atau lembaga pemerintah seperti Kejati maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



24 INFO TANGSEL

Sebanyak 2.500 pelari dari berbagai daerah hingga mancanegara mengikuti Tangsel Marathon 2022 yang diselenggarakan di Teras Kota, BSD, Minggu, 11 September 2022.

86

INFO SELEBRITI

Dalam beberapa waktu belakangan, rumah tangga selebriti Tanah Air kembali diguncang isu perpisahan.

Kali ini, aktris Roro Fitria dikabarkan telah menggugat cerai sang suami, Andre Irawan ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.





54 INFO SOSOK

Di belakang meja kerjanya tergelar matras tidur tipis yang sederhana. Pernah berminggu-minggu Ridho Rahmadi tidak pulang ke rumahnya di Yogyakarta. Menginap di Kantor DPP Partai Ummat menjadi kebiasaan.



74 INFO ISTANA

Pemerintah Indonesia percaya diri mampu menjaga ketahanan pangan di tengah kondisi krisis global akibat konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina.



78 INFO SPORT

Jakarta International Stadium (JIS) bisa jadi tak bisa lepas dari polemik dan kontroversi sejak pertama kali diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, 24 Juli 2022.

- 3 DARI REDAKSI
- 18 OPINI
- 28 INFO JAWA BARAT
- 32 INFO NTB
- 36 INFO SULSEL
- 40 INFO NUSANTARA
- 44 INFO NASIONAL
- 50 INFO COVER STORY
- 60 INFO EKONOMI
- 66 INFO POLITIK
- 70 INFO TEKNOLOGI
- 82 INFO WISATA
- 86 INFO KHUSUS
- 98 KAJI





TURUN GUNUNG DAN TURUN TAHTA

Menjelang 100 hari perombakan kabinet banyak perkembangan politik terjadi. Rapat, musyawarah, permufakatan, atau dengan nama lain, menjadi pemicunya. Namun, semua mengarah ke satu persoalan inti: proses suksesi.

Turun gunung. Sekian lama terkesan menghindari keterlibatan langsung dalam dinamika politik, Presiden RI 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan siap terjun langsung dalam proses suksesi. Kali ini suksesi atau pergantian kepemimpinan nasional. Terkait dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis, 15 September 2022.

Dalam video yang sudah viral di media sosial, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengemukakan kemungkinan rekayasa terkait Pemilu 2024. "Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.

Toh SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai mereka dalam pidatonya. "Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" ujar SBY.

Ia mengatakan, pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena men-



urut dia rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Ia juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014. "Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.

Meski belum jelas siapa mereka dalam pidato SBY, tak pelak berbagai muncul tanggapan dari sejumlah aktor politik. Salah satunya adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Soal turun gunung itu, Hasto menyatakan PDIP sebagai partai penguasa, tidak mempermasalahkan SBY untuk turun gunung. Malah ia menyebut SBY tak pernah lagi naik gunung.

"Setahu saya beliau tidak pernah lagi naik gunung, jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali, monggo turun gunung," kata Hasto dalam pernyataan resminya, Sabtu, 17 September 2022.

Namun, lanjut Hasto, akan berbeda jika turun gunungnya SBY sebagai bentuk melakukan tuduhan terhadap pemerintahan Jokowi. "Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY," imbuh Hasto.

Hasto mengemukakan, hendaknya SBY berhati-hati jika ingin mengganggu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia malah balik menyindir SBY yang sudah berulang kali turun gunung.

Ia pun menegaskan PDIP menanggapi serius pernyataan SBY yang menyebut ada tanda-tanda Pemilu 2024 tidak jujur dan adil. Menurut Hasto, Presiden RI keenam tersebut tidak bijak.

Justru Hasto menuding puncak kecurangan Pemilu terjadi ketika SBY berkuasa dan menjadi tanggung jawabnya pula. Pada 2009 SBY berpasangan dengan Budiono yang akhirnya memenangi Pilpres langsung kedua kalinya sejak Indonesia merdeka

"Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif, salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat," ungkap Hasto.

Anas sebagai wasit pemilu adalah perannya sebagai Komisioner KPU pada periode 2001-2005. Sedangkan Andi Nurpati menjabat Komisioner KPU pada periode 2007-2012. Tambahan dari Hasto, ada penggunaan anggaran hasil kenaikan harga BBM di era SBY dipakai untuk kepentingan elektoral.

Apakah tanggapan Hasto merupakan pengakuan bahwa mereka yang dimaksud oleh SBY dalam pidatonya adalah PDI Perjuangan dan Presiden Joko Widodo? Boleh jadi, tapi belum jelas sekali.

Yang lebih pasti adalah pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Harman tentang rekayasa itu. "Saya hanya dengar. Ada genderuwo, genderuwo ini kan suara yang tak jelas asal usulnya. Yang tidak menghendaki Anies jadi capres.

• INFO UTAMA

Ada invisible hand, ingin menjegal,” kata Benny di sela Rapimnas PD, esok hari setelah pidato SBY.

Tapi siapa? “Ya itu tadi, ada invisible power yang mengganggu, yang tidak ingin ada koalisi di luar yang dikehendaki oleh penguasa sekarang ini. Kan sudah jelas ada kan? Makanya kita menyampaikan sinyal itu,” ucap Benny.

Toh pernyataan Waketum PD itu mendapat tanggapan dari politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketua DPP PPP Achmad Baidowi memper-
tanyakan apa sinyal-sinyal penjegalan

setiap orang, termasuk Pak Anies punya hak untuk mencalonkan. Hak pengusulan paslon itu ada di partai politik, ya kalau ada jegal-menjegal ya tanya partai politiknya, parpolnya mengu-
sungnya sudah cukup koalisi atau belum?” ucapnya.

Awiek lantas menduga Demokrat menyampaikan tudingan itu lantaran kemungkinan bangunan koalisi yang belum cukup di 2024 untuk men-
calonkan seseorang jadi Presiden. Dia kembali menegaskan hak pengajuan capres ada di parpol bukan pemerin-

dalam tudingan rekayasa Pilpres 2024? Yang jelas Monoarfa yang duduk di ka-
binet Presiden Jokowi sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Ketua Bappenas, bisa diberhen-
tikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum melalui forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang ber-
langsung di Kabupaten Serang, Ban-
ten pada Minggu hingga Senin, 4-5
September 2022.

Forum tersebut juga memutuskan anggota Dewan Pertimbangan Pres-
iden (Wantimpres) Muhammad Mar-



itu. “Sejauh ini tidak ada upaya-upaya koalisi pemerintah menjegal sese-
orang, (saya) belum melihat ya. Kalau menjegal itu indikasinya apa?” kata
Awiek, nama ringkas Baidowi, Sabtu,
17 September 2022.

Ia mengemukakan, pencalonan diri sebagai Presiden merupakan hak
setiap orang, termasuk Anies Bas-
wedan. Kemudian, kata dia, niat men-
calonkan itu lalu disambut oleh partai
politik, sehingga tidak mungkin peme-
rintah mengintervensi.

“Karena hak mencalonkan itu hak

tah.

“Kalau parpolnya tidak cukup
bangunan koalisinya ya jangan disa-
ma-ratakan, jangan seolah-olah ada
penjegalan. Hak pengajuan capres ada
di parpol bukan pemerintah. Siapapun
kalau mau nyapres harus mendekati
parpol atau koalisi parpol. Dan parpol
memiliki hak otonom menentukan
sendiri koalisinya,” tandas politisi yang
partainya baru saja mengganti ketua
umumnya dari Suharso Monoarfa.

Nah, apakah Suharso turun tahta
yang terkesan dadakan itu tercakup

diono sebagai Pelaksana tugas (Plt)
Ketum PPP menggantikan Suharso
Monoarfa. “Mukernas telah memu-
tuskan malam hari ini, saya menerima
amanah yang diputuskan dalam ra-
pat pengurus harian, yang mengam-
natkan kepada saya untuk mengisi
lowongan sebagai plt ketua umum,”
kata Mardiono di lokasi Mukernas,
Senin, 5 September 2022. Dini hari Mar-
diono mengklaim, dirinya ditunjuk se-
bagai Plt Ketum setelah mendapatkan
dukungan dari para kiai di PPP. Dia pun
akan membawa partainya untuk bisa

mendulang kejayaan di Pemilu 2024.

"Atas dukungan, doa, para kiai yang ada di majelis-majelis ini, maka saya akan bekerja keras untuk bagaimana partai PPP sebagai warisan para ulama ini, bisa bangkit di Pemilu 2024 untuk mengulang sejarah kejayaan," ungkap Anggota Wantimpres itu.

Mardiono mengatakan, semua tanggung jawab yang baru diamanahkan ini tentu tidak akan mudah. Namun, dia berkeyakinan semua kader PPP akan bekerja keras.

"Tantangan dan hambatan tentu

kiai yang ia sampaikan tatkala menghadiri acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 15 Agustus 2022. Ketika mendapat kesempatan berbicara, Suharso menyebut mantan ketua umum partainya yang tersangkut kasus korupsi dan juga pengalamannya bertemu dengan para kiai di pondok pesantren.

"Waktu saya Plt. Saya bertandang ke kiai-kiai besar, ke pondok pesantren besar, ini demi Allah dan Rasul-Nya, terjadi," ujar Suharso sebagaimana tay-

Suharso mengaku saat menerima pesan tersebut belum mengerti maksud dari kalimat meninggalkan sesuatu. Sampai akhirnya dia bertemu dengan orang yang mengirimkan pesan tersebut.

"Oh enggak, ada sesuatu, oh nanti saja, maka sampailah setelah keliling itu ketemu lalu dibilang pada saya: 'Gini Pak Plt, kalau datang ke beliau-beliau itu mesti ada tanda mata yang ditinggalkan', 'wah saya ndak bawa, tanda matanya apa? Sarung, peci, Alquran atau apa?,' kata dia.



akan kita hadapi, tapi itu adalah ujian untuk memperkuat kami semua. Tentu Muhammad Mardiono, tidak akan ada artinya, tanpa kebersamaan dari seluruh jajaran kader," kata Mardiono.

Sedangkan Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M Tokan mengatakan pemberhentian dilakukan setelah para pimpinan tiga majelis partai menyikapi kegaduhan antara Suharso secara pribadi dan para kader dan simpatisan PPP.

Kegaduhan itu terkait dengan pernyataan Suharso Monoarfa soal amplop

angan akun Youtube ACLC KPK, Kamis 18 Agustus 2022.

Suharso mengaku, kala itu bersama rekan-rekannya menyambangi kiai besar hendak meminta doa. "Saya datang ke kiai itu dengan beberapa kawan, lalu saya pergi begitu saja. Saya minta didoain, kemudian saya jalan. Tak lama kemudian saya dikirim pesan di WhatsApp, 'Pak Plt, tadi ninggalin apa enggak untuk kiai?, ninggalin apa? Saya tidak tertinggal sesuatu di sana? Mungkin ada barang cucu saya waktu itu yang saya bawa,'" kata Suharso.

Namun rupanya yang dimaksud adalah meninggalkan amplop yang sudah lebih dahulu diisi uang. Suharso menyebut hingga kini hal tersebut masih terjadi apabila bertemu dengan para tokoh agama.

"Kayak enggak ngerti saja Pak Harso ini, gitu Pak. I've provided one, every week. Dan bahkan sampai saat ini, kalau kami ketemu di sana, itu kalau salamannya, enggak ada amplopnya, Pak, itu pulangnya, sesuatu yang hambar," kata Suharso.

Nah, kisah Suharso itulah yang

memicu kegaduhan hingga terjadi unjuk rasa meminta dirinya mundur sebagai Ketum PPP. Demo serupa sebenarnya sudah terjadi sebelum kegaduhan amplop kiai itu.

"Sehingga pada 30 Agustus 2022, dengan berat hati pimpinan tiga majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan fatwa majelis yakni memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman.

Putusan tiga majelis juga dikuatkan dengan pendapat dari Mahkamah Partai. Dalam rapat Mahkamah Partai yang digelar di Bogor pada 2-3 September menyepakati usulan memberhentikan Suharso sebagai Ketum PPP. "Pendapat Mahkamah Partai (juga) menyepakati usulan tiga Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso

pihak. Termasuk Ketua Majelis Syari'ah, KH Mustofa Aqil Siraj.

"Selaku Ketua Majelis Syari'ah yang ucapannya, pandangannya, nasihatnya serta fatwanya harus diikuti oleh seluruh pengurus, kader dan simpatisan PPP seluruh Indonesia," kata Usman. Menurut dia, dalam arahannya Ketua Majelis Syari'ah meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka kemashlahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yang berasaskan Islam.

KH Mustofa Aqil Siraj, sambung Usman, juga mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus dan pejuang Partai Persatuan Pembangunan untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral. Tidak terfokus hanya pada satu masalah tertentu.

Lebih lanjut, Usman menceritakan, tiga majelis PPP jauh-jauh hari telah me-

ujar Usman.

Akhirnya Mukernas yang dipimpin oleh Waketum PPP Amir Uskara memutuskan untuk memberhentikan Suharso. Kekosongan kursi ketua umum dijabat pelaksana tugas (Plt) yaitu Muhammad Mardiono.

Usman menjelaskan, keputusan Mukernas diambil secara aklamasi. PPP satu suara memberhentikan Suharso. "Aklamasi," ujarnya.

Muhammad Mardiono yang ditunjuk sebagai Plt Ketum PPP menegaskan, pemberhentian Suharso sebagai Ketum PPP melalui Mukernas bukan merupakan kudeta pimpinan. "Tidak ada istilah kudeta, ini adalah estafet kepemimpinan menghadapi hal besar," kata Mardiono di lokasi Mukernas.

Ia menyatakan telah berbicara dengan Suharso Monoarfa terkait pelaksanaan Mukernas PPP itu. Namun tidak banyak yang dibicarakan melalui sambungan telepon seluler pada Minggu, 4 September 2022. Alasannya, kesibukan Suharso yang menyebabkan komunikasi hanya berlangsung singkat.

"Tadi pagi beliau juga telepon saya, karena waktunya sempit dan beliau (dalam perjalanan) kembali ke Tanah Air, maka komunikasinya tidak banyak," terangnya.

Terlebih, sambung Mardiono, banyak agenda besar yang harus dilaksanakannya, seperti perhelatan G20 dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Seluruh helatan agenda nasional itu bagus diselesaikan dengan konsentrasi penuh. Di sisi lain, partai harus terus bekerja untuk memenangi Pemilu mendatang.

"Bukan dipecat, tapi para kader itu memberikan solusi dalam rangka mengakhiri polemik," kata Mardiono. Ia menegaskan, para kader PPP melihat Suharso Monoarfa akan sibuk menghadapi agenda kenegaraan seperti G20, sehingga masalah pemilu dan partai dibagi tugas dan diserahkan pada Mardiono.

"Membagi tugas itu agar beliau fokus pada tugas kementeriannya dan saya juga mendapat kepercayaan untuk bisa fokus untuk mengurus tugas di partai menghadapi pemilu," tandasnya.

Rapat demi rapat, gaduh-hening silih berganti. Masih akan terjadi lagi. Berkali-kali. Muaranya tetap suksesi. ●



Ketua DPP PPP Achmad Baidowi

Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," lanjut Usman.

Selanjutnya, Mahkamah Partai sesuai dengan AD/ART PPP bersama-sama Pengurus Harian (PH) DPP PPP diminta segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut.

Usman menambahkan, keputusan yang diambil para majelis dipastikan telah meminta pertimbangan banyak

layangkan surat kepada Suharso untuk mengundurkan diri. Desakan pengunduran diri itu karena pernyataan kontroversial Suharso terkait amplop kiai di forum bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, sampai Mukernas akan ditutup, Suharso tidak memberikan konfirmasi akan mengundurkan diri. "Kabarinya beliau mau mengundurkan diri, namun ditunggu hingga ditutupnya acara Mukernas tidak ada konfirmasi baik melalui telepon, WA atau surat,"

PASTI TERKAIT DENGAN KOALISI

Rekayasa, penjejalan, invisible hand. Terkesan halus dan tersembunyi. Namun, persoalan inti dalam Pilpres 2024 adalah kerumitan membentuk koalisi dan implikasinya.

Begitu pula dengan perkembangan PPP pasca pemberhentian Ketua Umum Suharso Monoarfa. Sedikit maupun banyak akan berpengaruh terhadap Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang menghimpun PPP, Partai Amanat Nasional, dan Partai Golkar sejak Mei 2022. Sebelum perombakan kabinet pertengahan Juni 2022 terjadi.

Di mata analis politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Ahmad Khoiril Umam, PPP pasca Suharso turun tahta akan berdampak pada kesolidan KIB. Sebab itu, ia menyarankan Golkar untuk mewaspadai dampak dari pergantian pucuk pimpinan di PPP.

Dalam analisis Umam, tampak jelas indikasi kontrol kekuasaan politik dalam pergantian tersebut. Apa itu? Umam menyebut kecepatan pengesahan SK Kemenkumham yang hanya memakan waktu lima hari.

"Dengan demikian, polemik amplop kiai bukanlah trigger utama, melainkan hanya momentum percepatan yang tepat untuk mendepak Suharso dari posisi Ketum PPP. Situasi ini menjadi peringatan serius bagi rapuhnya soliditas KIB. Prediksi KIB akan layu sebelum berkembang seolah akhirnya terkonfirmasi. Bahkan, sejumlah informasi spekulatif mengabarkan bahwa operasi politik pendongkolan pimpinan partai KIB yang lain, belakangan ini juga kian menyeruak. Salah satu partai yang patut mengantisipasi ini adalah Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto," teranginya.

Umam melandasi analisisnya lewat fakta bahwa mantan Ketum PPP Suharso Monoarfa dan Plt Ketum PPP Mardiono, sama-sama berada di dalam struktur pemerintahan. Suharso sebagai Menteri Bappenas dan Mardiono sebagai anggota Wantimpres. Umam menengarai kemungkinan adanya kekuatan politik yang tampaknya terhalang oleh keputusan politik Suharso yang memilih bergabung dengan KIB.

"Besarnya kemungkinan hal ini terkait dengan keputusan PPP ikut membentuk sekoci politik bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dikabarkan dipersiapkan untuk nama tokoh potensial yang tidak diresmikan partai asalnya," lanjutnya.

Menurut dia, meski Mardiono disebut sebagai juru runding utama PPP pada KIB, hal itu tidak menjamin sepenuhnya ketetapan pilihan politik PPP dalam KIB. Kepemimpinan baru PPP diprediksi akan menempuh jalan yang bisa jadi berbeda dengan masa Suharso bertahta.

"Karena itu, meskipun Plt Ketum PPP Mardiono merupakan juru runding terdepan PPP di KIB, mencermati dinamika politik pasca-pemberhentian Suharso ini, kemungkinan besar akan ada koreksi total terhadap pilihan koalisi PPP," tandas

personal, salah satunya tidak melibatkan kader," ungkap Dedi.

Kalau kemudian itu terjadi, sambungnya, maka Mardiono mau tidak mau harus ikut keinginan kader PPP. "Keinginan itu sudah pasti berlawanan dengan apa yang diinginkan Suharso," tukas Dedi.

Sedangkan Umam menegaskan bagaimanapun pilihan PPP untuk mendukung capres-cawapres pada Pilpres 2024 akan mempengaruhi eksistensi partai berlabang Ka'bah itu ke depan. "Problemnya, jika pasangan capres-cawapres yang diusung nantinya ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter politik Islam yang mengakar di basis pemilih loyal PPP dan jaringan pesantren tempatnya bernaung, maka hal itu bisa membahayakan keberlangsungan eksistensi PPP ke depan. Dibu-



Dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Paramadina itu.

Nah, pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat, akan sulit untuk menerka arah politik Plt. Ketua Umum DPP PPP Mardiono dalam membangun koalisi. Pasalnya, sebagai ketua baru, pasti besar harapan kader PPP untuk didengar aspirasi mereka.

"Belum tentu juga bahwa bergabungnya PPP ke KIB, punya dukungan kuat kader di bawah. Jangan-jangan itu batu loncatan kenapa kemudian Suharso itu di-impeached. Bisa jadi karena Suharso banyak mengambil keputusan

tuhkan kerja keras, karena jika PPP kehilangan satu atau dua saja kursi di DPR, maka Pemilu 2024 akan menjadi Pemilu perpisahan bagi PPP dari jajaran elite partai Senayan," tandas Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) itu.

Jadi, sekali lagi, intinya adalah soal kerumitan penyusunan koalisi dalam suksesi. Bukan hanya persoalan bagi KIB, melainkan juga Partai Demokrat dan PDIP. Selain harus memilih Capres yang berpotensi menang demi alokasi kekuasaan, partai-partai politik harus mendapat kursi parlemen memadai melalui capres pilihannya. ●



GELIAT DEMOKRAT DAN REAKSI PDIP

Pemilu dan Pilpres 2024 kian dekat. Komunikasi politik Partai Demokrat dan PDIP tampak memanas. Boleh jadi karena sama-sama belum jelas siapa yang menjadi rekan koalisi.

Hanya tiga partai politik yang pernah menjadi pemenang Pemilihan Umum pasca Reformasi 1998: Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun, dari tiga partai itu, hanya PD dan PDIP yang dapat membawa kadernya menjadi Presiden RI.

Lebih dari itu, saat PD berkuasa dan figurnya menjadi Presiden, PDIP berada di luar pemerintahan. Begitu sebaliknya, tatkala PDIP berkuasa, PD berada di luar pemerintahan. Pengalaman silih berganti berperan sebagai penguasa dan oposisi menempatkan kedua partai itu sejauh ini saling berseberangan.

Selain saling berseberangan, hal lazim jika kedua partai pun saling memojokkan satu sama lain. Begitu pula yang terjadi menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Sebenarnya usai Rakernas II PDIP pada Juni 2022, tak ada tanggapan berarti dari Partai Demokrat tentang sikap politik PDIP. Yang terjadi, partai berlambang banteng lebih bereaksi terhadap hasil Rakernas Partai Nasdem yang mengajukan salah satu kader PDIP, Ganjar Pranowo, sebagai salah satu kandidat calon presiden bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Namun, dalam Rapat Pimpinan Par-



tai Demokrat di Jakarta Convention Center pertengahan September 2022, Demokrat menggeliat dengan pidato SBY. Juga Pidato Kebangsaan Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono yang, antara lain, membandingkan kinerja pemerintahan SBY dengan pemerintahan Joko Widodo.

Saling memojokkan antara PDIP dan Demokrat pun tak terhindarkan. Sebagaimana wacana turun gunung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan tanggapan resmi dari PDIP melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Dalam video yang sudah viral di media sosial, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengemukakan kemungkinan rekayasa terkait Pemilu 2024. "Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY dalam pidato di Rapimnas PD.

SBY juga menyebut sudah terlihat tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak ju-

jur dan tidak adil. Hasto sudah menanggapi pada Sabtu, 17 September 2022. Malah tanggapan tambahan pun muncul lagi keesokan harinya melalui konferensi pers secara online (dalam jaringan internet).

Hasto mengingatkan saat PD berkuasa, ada upaya mencurangi Pemilu 2009 secara masif. Menurut dia, Demokrat mengalami kenaikan elektoral hingga 300 persen yang dianggap tidak normal.

"Ini adalah kecurangan masif. Jadi parpol pada saat itu cenderung bertransformasi menjadi partai elektoral, fungsi parpol direduksi hanya menjadi mesin kemenangan pemilu. Di Indonesia terjadi global reproduction of American politics, melalui liberalisasi politik dan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997. Partai Demokrat adalah contoh terhadap kehadiran partai elektoral tersebut," kata Hasto dalam konferensi pers daring, Minggu, 18 September 2022.

"Nah sistem multipartai seperti Indonesia yang sangat kompleks dengan

intensitas persaingan yang sangat tinggi, sebenarnya tidak memungkinkan bagi parpol seperti Partai Demokrat untuk mengalami kenaikan 300 persen pada Pemilu 2009 lalu. Ini adalah suatu anomali di dalam pemilu," ujarnya.

Hasto kemudian menyebut soal modal kemenangan Demokrat di Pemilu 2009 bersumber dari Bank Century. Menurut Hasto, Associate Professor Australian National University (ANU) Marcus Mietzner pernah mengkaji meroketnya elektoral Demokrat pada 2009.

"Ini adalah skenario untuk menangnya. Ini sumber dana diduga dari Bank Century. Kita masih ingat, bagaimana pembobolan Bank Century tersebut, kemudian menciptakan manipulasi bandwagon dengan intervensi dan macam-macam," sebutnya.

"Pertama state budget. Ini meniru strategi taksinisasi, di mana pada bulan Juli 2008 sampai Februari 2009 digunakan USD 2 miliar untuk elektoral, sehingga menurut Marcus Mietzner, elektoral Demokrat dan Pak SBY terjadi

• INFO UTAMA

skyrocketing. Ini kajian akademis,” sambung Hasto.

Hasto juga menyinggung sistem pemilu tanpa nomorurut. Ia menyebut strategi pemenangan pemilu Demokrat dilakukan dengan memadukan jurus pemenangan model dari sejumlah negara.

“Kemudian sistem pemilu tanpa nomorurut. Ini ada dalil dari Afrika, semak-

el Amerika. Penyusupan agen partai ke KPU, oknum aparaturnegara, ini model Afrika. Buktinya kan seperti Pak Anas Urbaningrum, Ibu Andi Nurpati yang kemudian direkrut ke Partai Demokrat,” lanjut dia.

Bahkan, Hasto menuding ada manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) saat Pemilu 2009. “Kemudian manipulasi daftar pemilih, itu luar biasa. Ini juga za-

data dan akademis terkait manipulasi di Pemilu 2009 yang diberkan. Karena itu, Hasto mempertanyakan pernyataan SBY yang menyebut ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa berjalan tidak jujur dan tidak adil.

“Jadi ini ada data-datanya semua, dan ini kan yang tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kemudian bagaimana Pak SBY bisa mengatakan kalau Pak Jokowi itu batil, Pak Jokowi itu jahat, merencanakan kecurangan pemilu?” ujar dia.

Hasto merasa perlu merespons pernyataan SBY soal tanda-tanda Pemilu 2024 bisa berjalan tidak jujur dan tidak adil. Sebab, sebut dia, SBY menyampaikan soal dugaan itu di forum resmi, yakni rapat pimpinan nasional (rapimnas) Demokrat, yang mestinya diisi dengan informasi-informasi yang valid.

“Kenapa saya perlu menanggapi itu? Karena apa yang disampaikan oleh Bapak SBY dilakukan di depan forum resmi rapat pimpinan nasional Partai Demokrat. Bagi kami, rapat pimpinan nasional suatu partai harus didasarkan pada politik kebenaran, bukan didasarkan pada fitnah, pada ambisi, atau berbagai informasi yang tidak tepat,” katanya.

“Sehingga, kecurigaan yang berlebihan tentu saja tidak kondusif di dalam iklim politik nasional kita. Apalagi disampaikan oleh Bapak SBY dalam forum resmi, rapat pimpinan nasional Partai Demokrat tersebut,” ungkapnya.

Mengenai skenario Pemilu 2024 hanya diikuti dua Capres, Hasto menanggapi SBY dengan menceritakan konstelasi Pemilu 2019. Menurut dia, saat itu, Demokrat ingin bergabung dengan koalisi petahana Jokowi bersama PDIP.

Hasto mengungkapkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, pada saat itu dengan tegas menyatakan tidak keberatan jika Demokrat bergabung dalam koalisi tersebut. Sementara publik mengetahui hubungan Megawati dan Ketua Dewan Pembina Demokrat SBY, tidak berjalan mulus.

“Kalau saya melihat ini sedikit cerita 2019 lalu, saat itu ketika Demokrat mau bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi, dilakukan banyak diskusi. Saya



Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto



Politisi Senior Partai Demokrat, Herman Khaeron

in kompleks pemilu, semakin mudah dimanipulasi,” katanya.

“Ada juga bandwagon effect melalui survei dan pencitraan. Ada pula penggunaan instrumen negara. Ini kan mod-

man Pak SBY. Di mana, di zaman Pak Harto saja, tak pernah melakukan manipulasi DPT. Ini DPT dimanipulasi secara masif,” ujarnya.

Hasto mengklaim memegang data-

mendengar dengan mata kepala saya sendiri, bahwa Ibu Mega tidak keberatan. Karena 2014 dengan 2019 berbeda,” lanjut Hasto

“2014 Pak Jokowi belum jadi Presiden dan 2019 Pak Jokowi sudah jadi presiden. Sehingga dalam menetapkan capres menjadi kewenangan penuh dari Pak Jokowi. Nah saat itu Ibu Mega sudah mengatakan tidak keberatan kalau Demokrat mau bergabung, selama itu keputusan dari Pak Jokowi,” sambungnya.

Namun, setelah diskusi tersebut final, SBY menyampaikan pidato dan menyebut bahwa ada upaya penjegalan Demokrat bergabung dalam koalisi Jokowi. Karena ada salah satu ketua umum partai yang tidak setuju.

Atas sikap Demokrat tersebut, Hasto yang pada saat itu mengetahui bagaimana kronologi kerja sama dalam pembentukan koalisi Jokowi di 2019 langsung membantah tuduhan itu. Sebab, dia memiliki bukti kuat perihal kesediaan Megawati jika Demokrat bergabung.

“Saya langsung menyampaikan pada Pak Agus Hermanto yang notabene masih saudara Pak SBY mengingat di Demokrat masih banyak persaudaraan di dalam elite partainya, sudah saya sampaikan ke Pak Agus boleh saya cek itu. Ketika datang ke DPP. Tapi Pak SBY sendiri yang justru membatalkan secara sepihak,” tegas Hasto.

Hasto mengungkapkan, Demokrat kemudian berubah pikiran dan kembali menawarkan diri untuk bergabung dalam koalisi. Akan tetapi, karena merasa porsi koalisi sudah cukup menstabilkan pemerintahan kelak, dan merasa Demokrat tidak teguh pada pendiriannya, akhirnya penawaran gabungan tersebut ditolak.

“Baru pada malam hari jelang pendaftaran sekitar jam 8 malam, kami dapat info kalau Demokrat mau bergabung. Saya rapatkan dengan Sekjen sebelumnya Demokrat ingin gabung, kemudian menyatakan tidak. Tapi malam hari jelang pendaftaran dia mau gabung, saya tanyakan bagaimana? Ternyata semua tidak sependapat. Karena koalisinya cukup menjamin stabilitas pemerintahan. Sehingga tidak jadi,” ucapnya.

“Ada Golkar, ada PPP, akhirnya penawaran terakhir kita tolak. Sehingga penawaran tidak gabungnya Demokrat itu tidak ada penjegalan, tapi karena strategi yang salah,” tandas Hasto.

Sedangkan politisi senior Partai Demokrat, Herman Khaeron menilai apa yang disampaikan Hasto malah membuat masyarakat berpikir bahwa selama ini yang merancang agar jalannya pelaksanaan pemilu banyak kecurangan berasal dari pihak PDI Perjuangan.

Alasannya, apa yang disampaikan SBY pada pidato di Rapimnas tentang skenario dua pasang calon, merupakan fakta yang terjadi di lapangan. “Kritik-kritik itu bisa saja terjadi, apa yang disampaikan Pak SBY bahwa

memecah belah. Karena tidak ada juga yang membuat tuduhan Hasto itu benar, tidak ada. Kalau potensi apa yang disebutkan Pak SBY ya potensi itu ada dan kasat mata semua orang juga tahu,” tandas Herman.

Sedangkan di mata Hendri Satrio, pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta, apa yang terjadi dengan Demokrat dan PDIP menjelang Pemilu 2024 ibarat persaingan di kompetisi liga sepak bola di Eropa. “Seperti El Clasico (pertarungan klasik Barcelona lawan Real Madrid di liga Spanyol). Keduanya pernah scudetto (juara liga Italia) dan figur PDIP maupun Demokrat pernah menjadi Presiden,” ungkap Hensat, nama ringkasnya, Minggu, 18 September 2022.

Jadi, sambungnya, 2024 menjadi



bisa terjadi pemilu yang tidak adil dan jujur karena ada potensi untuk hanya menggiring dua calon dan dua calon itu pun dari pihak mereka. Terus apa yang membuat Hasto membuat ke mana-mana berbicara tanpa arah? Jadi dalam pandangan saya Hasto selama ini membuat pecah belah,” kata Herman

Ia juga menilai pernyataan Hasto soal kecurangan pada Pemilu 2019 hanya untuk memperlihatkan dirinya loyal terhadap partai berlambang kepala banteng tersebut. Padahal, yang terjadi Hasto ingin pecah belah. “Untuk menunjukkan bahwa Hasto loyal kepada korps nya padahal sebetulnya

pembuktian siapa yang kira-kira menjadi pemenang. “Apakah PDIP dengan Puan-nya atau Demokrat dengan AHY-nya?” kata

Namun, yang berbeda dengan liga sepak bola, baik Demokrat maupun PDIP belum memiliki koalisi yang jelas untuk mengajukan pasangan Capres dan Cawapres. Boleh jadi juga kedua partai sedang galau karena koalisi yang belum pasti.

Yang lebih pasti, perjalanan menuju Pemilu dan Pilpres 2024 semakin dekat. Gelagat PD setelah menggeliat di Rapimnas adalah arah koalisinya. Sedangkan PDIP akan menyelenggarakan Rakernas lagi pada akhir 2022. ●



PAGAR MAKAN PARTAI

Jegal-menjegal dalam politik adalah hal biasa. Tapi ada aturannya. Pagar pembatasnya.

Mengikuti analogi pertandingan sepak bola, jegal-menjegal dalam politik memang bisa terjadi. Sepak bola juga mengenal jegal-menjegal dengan istilah sliding tackle, merebut bola dengan cara meluncur di atas lapangan rumput. Namun, sliding tackle perlu keterampilan khusus agar tak melanggar aturan.

Analog dengan itu, jegal-menjegal antarpolitis adalah merebut perhatian dan dukungan pemilih. Sama juga, harus mengikuti aturan.

Begitulah, dalam konteks itu, baik Demokrat maupun PDIP sama-sama ingin merebut perhatian dan dukungan publik menjelang Pemilu dan Pilpres 2024. Soal jegal menjegal, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun pernah mengungkapkannya.

Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PDIP Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram, Kamis, 15 September 2022, misalnya, Hasto mengungkapkan banyak pihak yang mencoba menjegal partainya dengan cara memfitnah akan berbagai isu. Menurut dia, upaya penjegalan itu untuk membuat elektoral (suara pemilih) partai turun. Namun, dia mengingatkan bahwa politik itu menebar kebaikan dan bergerak ke bawah, perjuangkan aspirasi rakyat.

Hasto menegaskan, selama kader dan anggota Partai berada bersama rakyat, sederas apapun fitnah, dan Partai terus membangun energi positif, maka kita akan eksis. Karenanya, sebagaimana pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, agar kader terus turun ke bawah. "Kata

Ibu Mega, kita jangan pernah puas. Saya enggak pernah lihat elektoral kita berapa, yang penting strategi kita bagaimana,” kata dia.

Hasto juga mengingatkan kepada para kader untuk melek teknologi dalam menyampaikan capaian-capaian pemerintah dan PDIP. Dia menyampaikan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi sampai saat ini terus menggalakkan pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, Jokowi membangun banyak jalan, pelabuhan, bandara, waduk, dan lainnya dengan harapan bisa membawa nilai tambah kepada Indonesia. Namun, Hasto menyampaikan Covid-19 melanda dunia kemudian disusul dengan perang Rusia-Ukraina.

Ia menegaskan, perkembangan di tingkat global itu membawa dampak berkali-kali sehingga membawa dunia, termasuk Indonesia, mengalami tekanan ekonomi seperti inflasi. Krisis pangan dan energi yang dirasakan saat ini merupakan turunan dari beberapa kejadian global itu.

“Nah, kader-kader PDI Perjuangan harus bisa memberikan penjelasan mengapa Pak Jokowi mengambil kebijakan kenaikan BBM, karena subsidi kita naik tiga kali lipat. Memilih subsidi negara mengalami kesulitan. Semua adalah pil pahit,” ujarnya.

Sedangkan Demokrat tampak memanfaatkan pil pahit itu dalam Rapimnas di Jakarta Convention Center antara lain dalam pidato sambutan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono AHY. AHY menilai kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. “Dapat kita simpulkan, Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” kata AHY.

AHY menggambarkan, kebebasan sipil, penegakkan hukum hingga kondisi ekonomi Indonesia saat ini menjadi keluhan di masyarakat. Salah satunya, dengan kenaikan harga BBM yang menyebabkan meroketnya harga kebutuhan sembako di masyarakat.

Lantas AHY juga menyindir berbagai program infrastruktur pemerintah yang dianggap tidak tepat selama pandemi covid-19 hingga saat ini, terutama di tengah kenaikan harga

BBM. Bahkan pelaku UMKM juga ikut terkena imbasnya, seiring kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Solar.

“Jangan sampai salah mengalokasikan anggaran terbatas dan masih lemah. Bukan kita mengatakan infrastruktur itu salah, tapi tolong waktunya dikaji,” ungkapnya.

Tambahan pula dengan pidato turun gunung SBY yang antara lain mengangkat isu potensi kecurangan Pemilu 2024 dan upaya agar Pilpres tahun yang sama hanya dua pasangan calon. Soal dua pasang calon itu sebenarnya juga wacana yang pernah Hasto ungkapkan sebelumnya.

Menurut Hasto, Indonesia memerlukan pelaksanaan Pilpres yang demokratis, cepat, kredibel, dan bagaimana memastikan hanya berlangsung satu

rena kemungkinan ada kesepakatan politik baru pada putaran kedua.

Karena itu, menurut Hasto, alih-alih mendorong agar pilpres diikuti lebih dari dua paslon, upaya untuk menghindari perpecahan cukup dilakukan lewat kesepakatan antarpol. “Sekiranya tiga paslon, pada putaran kedua pasti akan terjadi deal-deal politik baru. Jadi kenapa tidak membangun kesepakatan di depan saja,” katanya.

Jadi, begitulah. Semuanya berada dalam konteks merebut perhatian dan dukungan pemilih. Namun, salah satu problemnya adalah pembentukan koalisi yang terasa berlarut-larut. Dalam istilah Hasto, kesepakatan antarpol.

Tantangan jangka pendeknya memang kesepakatan antarpol dalam mencalonkan pasangan



Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

putaran. “Pandangan ini bisa terwujud apabila dilakukan langkah konsolidasi dan mendorong kerjasama parpol di depan, sehingga mengarah pada dua paslon, ini yang ideal berdasarkan konteks saat ini,” ungkapnya usai diskusi “Menyongsong Pemilu 2024” Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kamis, 25 Agustus 2022.

Namun, Hasto mengutarakan PDIP siap andai Pilpres diikuti lebih dari dua paslon dan berlangsung dua putaran. Ia hanya menyayangkan ka-

Capres dan Cawapres. Dengan membentuk koalisi beserta deal (kesepakatan) politik siapa mendapat apa dengan cara bagaimana. Pada titik inilah sliding tackle tak terhindarkan.

Aturan atau pagar pembatas koalisinya adalah presidential threshold, ambang batas pencalonan presiden. Mungkin terasa ambang batas 20 persen kursi parlemen itu merumitkan pembentukan koalisi. Aturan malah membatasi ruang gerak. Pagar makan partai. ●

CASHBACK SPESIAL UNTUK PARA KORUPTOR

Pada dasarnya, remisi sebagai pengurangan hukuman dan pembebasan bersyarat memang merupakan hak dari seluruh narapidana. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah pemberian hak tersebut sudah tepat?

"Let the punishment fit the crime". Sebuah postulat dari Cicero yang menekankan bahwa setiap hukuman harus sesuai dengan kejahatannya. Sebuah postulat yang tidak mudah untuk diterapkan.

Bagaimana cara mengukur hukuman yang tepat dengan kejahatannya? Montag dan Tremawan dalam penelitiannya, "Let the Punishment Fit the Criminal: An Experimental Study", menekankan bahwa penjatuan pidana tidak hanya cocok dengan kejahatannya, tetapi juga harus sesuai dengan pelakunya sehingga tentu beragam.

Namun, dalam tujuan penjatuan sanksi pidana kontemporer, sanksi pidana harus dapat memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa perbuatan tersebut buruk dan harus dihindari. Sebagaimana ungkapan Seneca: Nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur. Hukuman dijatuhkan bukan karena kejahatan dilakukan, melainkan agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut.

Sayangnya, konsep pidana tersebut terlihat tidak sepeenuhnya sejalan dengan penjatuan dan pelaksanaan pidana bagi para koruptor di Indonesia.

Aturan tentang remisi dan pembebasan bersyarat

Pada 6 September 2022, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengatakan, setidaknya terdapat 23 terpidana koruptor yang menerima pembebasan bersyarat, sekalipun kasus korupsi dari terpidana koruptor tersebut terbilang tidak sederhana. Di antara mereka adalah bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari, bekas Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, bekas Gubernur Jambi Zumi Zola, bekas hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar, dan bekas Menteri Agama Suryadharma Ali.

Dasar hukum pembebasan bersyarat yang diberikan kepada para terpidana tersebut adalah UU 22/2022 tentang Pemasyarakatan dan berbagai aturan turunan dari Undang-Undang Pemasyarakatan sebelumnya.

Pada dasarnya, remisi sebagai pengurangan hukuman dan pembebasan bersyarat memang merupakan hak dari semua



Oleh: Muhammad Fatahillah Akbar
Dosen Departemen Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada

narapidana. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah pemberian hak tersebut sudah tepat? Selain itu, permasalahan sebenarnya adalah pada penjatuan pidana yang tidak sesuai dengan pidananya.

Remisi dan pembebasan bersyarat memang merupakan hak dasar dari narapidana. Pasal 10 huruf a dan f UU Pemasyarakatan bahkan menegaskan, hak remisi dan pembebasan bersyarat adalah hak yang diberikan tanpa terkecuali.

Tujuan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat adalah untuk merehabilitasi terpidana, sehingga berkelakuan baik di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan lebih

mudah diterima masyarakat. Hal ini terlihat dari penjelasan Pasal 10 UU Pemasyarakatan yang mengartikan pembebasan bersyarat sebagai "proses pembinaan narapidana di luar lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat".

Namun, sebelumnya hak remisi dan pembebasan bersyarat ini sempat dibatasi oleh PP 99/2012 yang mengubah PP 32/1999 tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 34A PP ini mengatur, narapidana korupsi dapat menerima remisi dan pembebasan bersyarat jika memenuhi ketentuan, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti. Dengan demikian, dalam konsep PP tersebut, tak semua narapidana korupsi dapat memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat.

Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 34A PP tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Agung dalam uji materi (judicial review) pada Putusan Nomor 28 P/HUM/2021.

Mahkamah Agung pada 2021 berpandangan, ketentuan dalam Pasal 34A PP Tahun 2012 itu bertentangan dengan semangat rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta konsep keadilan restoratif (restorative justice). Selain itu, dengan konsep equality before the law, MA berpendapat semua narapidana tersebut sama, sehingga tidak dapat dibedakan satu dengan lainnya.

Putusan MA ini sangat berbeda dengan putusan judicial review MA tahun 2013 untuk pasal yang sama, yakni Putusan Nomor 51/P/HUM/2013. Dalam putusan tersebut, MA menilai, memberikan pengaturan yang berbeda terhadap terpidana korupsi merupakan hal yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena kejahatan korupsi memiliki dampak berupa kerusakan moral, sosial, dan ekonomi.

Oleh karena itu, pada 2013, MA menolak permohonan uji

materi tersebut dan mempertahankan Pasal 34A PP Hak Warga Binaan. Sampai kemudian pada 2021 akhirnya pasal tersebut dibatalkan oleh MA. Pembatalan pasal ini diperkuat dengan Pasal 10 UU Pemasarakatan Tahun 2022 yang mengatur bahwa setiap narapidana yang telah memenuhi syarat “tanpa terkecuali” berhak menerima “remisi” dan “pembebasan bersyarat”.

Penjelasan “tanpa terkecuali” di sini menegaskan bahwa tak ada perbedaan di antara setiap narapidana. Namun, Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 UU Pemasarakatan juga menyatakan, kondisi “kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan”. Dengan demikian, menjadi pertanyaan apakah putusan pengadilan bisa mencabut hak remisi dan pembebasan bersyarat.

Efek jera

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa untuk meningkatkan efek jera, KPK akan menuntut pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat. KPK mendasari ide ini pada Pasal 18 Ayat (1) UU Korupsi di mana pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat berlaku.

Pasal 35 KUHP mengatur hak-hak yang dapat dicabut. Namun, hak remisi dan hak pembebasan bersyarat tak termasuk dalam hal yang dapat dicabut pada pidana tambahan sebagaimana diatur di KUHP.

KPK pernah mencoba tuntutan untuk mencabut remisi dalam kasus Muhtar Ependy, tetapi MA menolak tuntutan tersebut dan bahkan hakim Artidjo Alkostar selalu menjatuhkan pidana berat bagi koruptor yang menolak tuntutan KPK tersebut. Hakim MA pada Putusan MA Nomor 2368 K/Pid.Sus/2015 mempertimbangkan bahwa koruptor tetap berhak mendapatkan remisi, tetapi pemberiannya harus diberikan secara selektif sesuai peraturan.

Harus dipahami putusan ini mendasarkan pada PP 99/2012 yang belum dicabut. Dalam pengujian Pasal 34A PP 99/2012 pada Putusan MA Nomor 51/P/HUM/2013, Artidjo juga merupakan majelis yang menolak pembatalan pasal tersebut. Dengan demikian, penolakan pencabutan remisi didasarkan pada PP yang masih berlaku saat itu, di mana koruptor memiliki aturan khusus dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat.

Dalam konteks ini, Penjelasan Pasal 10 UU Pemasarakatan sebenarnya membuka peluang untuk kembali menuntut pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat jika memang perbuatan koruptifnya memiliki dampak yang masif dan memerlukan pembinaan yang berbeda sebagaimana terlihat dalam semangat PP 99/2012. Akan tetapi, untuk memperkuat ini, perlu ada perbaikan UU Korupsi yang menambahkan soal pengaturan pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat untuk memperkuat penegakan korupsi.

Kasus korupsi penegak hukum

Dengan menilai lebih jauh, harus dipahami bahwa lemahnya sanksi pidana bagi koruptor bukan karena lemahnya pengaturan mengenai remisi dan pembebasan bersyarat.

Hal ini sudah dimulai sejak penegakan hukum yang bersifat diskriminatif. Sebagai contoh, kasus-kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum, seperti kasus Nurhadi, bekas sekretaris

MA, dan kasus Pinangki, bekas jaksa.

Kasus Nurhadi sangat menarik perhatian publik karena Nurhadi dianggap menerima suap dan gratifikasi sampai dengan Rp83 miliar untuk mengurus perkara di MA. Modus yang digunakan bahkan melibatkan menantu Nurhadi sendiri.

Lebih mengejutkan, tuntutan KPK 12 tahun penjara dipangkas menjadi hanya enam tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Hal yang menjadi sorotan adalah hakim memberikan alasan yang meringankan dalam kasus tersebut, yakni “terdakwa memiliki peran dalam kemajuan MA”.

Keanehan di sini adalah, dalam perkara yang secara sah dan meyakinkan terbukti dalam lingkup MA dilakukan oleh seorang sekretaris MA, hakim Pengadilan Tipikor malah meringankannya, menjadi peran dalam kemajuan MA. Hal ini menjadi pertanyaan besar.

Selain kasus Nurhadi, kasus jaksa Pinangki juga menarik perhatian. Pinangki yang menjadi agen Joko S Tjandra untuk memuluskan proses hukumnya telah menerima imbalan 500.000 dollar AS dan bermufakat melakukan suap terhadap penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Agung dan MA.

Pinangki dituntut oleh kejaksaan empat tahun penjara. Padahal, dakwaan terhadap Pinangki adalah suap dan pencucian uang. Jika dibandingkan dengan kasus First Travel, yang tersangkanya didakwa pasal penipuan dan pencucian uang, dengan tuntutan 20 tahun penjara, Pinangki hanya dituntut seperlima dari kasus penipuan tersebut.

Dalam putusan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Pinangki dijatuhi vonis 10 tahun penjara. Sanksi ini seakan terlihat jauh lebih tinggi daripada tuntutan, tetapi sejatinya masih tidak sesuai dengan korupsi yang telah dilakukan terdakwa. Vonis ini diperburuk lagi dengan vonis Pengadilan Tinggi yang memberikan diskon hingga menjadi empat tahun penjara.

Hakim pada Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan yang menggelitik, yakni “tuntutan jaksa telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat”, sehingga sanksi sepuluh tahun dipangkas menjadi hanya empat tahun. Selain itu, sejak awal jaksa tidak menuntut pidana uang pengganti atas Rp7 miliar yang diterima Pinangki.

Bahkan, penyitaan yang dilakukan juga masih jauh dibandingkan dengan jumlah uang suap yang diterima.

Kelemahan dalam penegakan hukum ini yang berakibat pada lemahnya efektivitas penjeratan tindak pidana korupsi.

Solusi dari berbagai permasalahan ini adalah memperkuat pemberantasan korupsi di wilayah penegakan hukum. Korupsi jelas telah menghambat terciptanya fair trial sebagai cita-cita utama peradilan Indonesia. Sanksi pidana bahkan tak lagi menjadi penjeratan yang efektif untuk mencegah korupsi.

Menurut Christi Danilet, mantan hakim di Romania, judicial corruption atau korupsi dalam lingkup peradilan memiliki dua dampak yang signifikan. Pertama, dampak terhadap individu penegak hukum yang tidak lagi independen.

Dan kedua, dampak terhadap peradilan yang tidak lagi bisa menegakkan keadilan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menangani korupsi di bidang penegakan hukum sehingga menciptakan pemberantasan korupsi yang efektif. ●



MASIFKAN SOSIALISASI DAN EDUKASI HUKUM HINGGA KE DESA

Hingga saat ini masih banyak masyarakat di Sumatera Selatan yang belum mengerti dan sadar terkait permasalahan hukum. Untuk itu, perlu sosialisasi dan edukasi hukum secara masif dari institusi atau lembaga pemerintah seperti Kejaksaan Tinggi maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Herman Deru, hulu pencegahan itu memang ada di keluarga. Karena terkadang godaan itu datang dari mana saja dan keluargalah tempat untuk saling mengingatkan.

"Misalnya kalau suami membawa sesuatu yang tak wajar, istri mestinya menanyakan itu, sehingga bisa diingatkan," jelasnya saat membuka kegiatan bimbingan teknis pemberdayaan peran serta masyarakat mewujudkan keluarga antikorupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas yang diselenggarakan KPK melalui Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Kumbul Kusdwidjanto, beberapa waktu lalu.

Herman Deru juga mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis ini, karena dapat mendorong setiap keluarga untuk mengimplementasikan tentang nilai-nilai integritas dalam keluarga. Sehingga keluarga terutama pasangan dapat harmonis, saling mendukung dan memotivasi serta mengingatkan agar tidak melanggar

aturan yang ada.

Dia pun meminta KPK agar melakukannya hingga ke tingkat desa-desa di Sumsel. Menurutnya, untuk melakukan transformasi mental ini memang butuh waktu.

"Butuh waktu mensosialisasikan ini, baik ke kalangan pejabat yang sudah mengabdikan dan yang baru masuk," jelasnya.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan peran masyarakat, terutama dari lingkungan keluarga dapat semakin tajam.

"Saya harap kegiatan ini berlanjut hingga desa, kelurahan sampai RT. Sehingga perilaku yang dianggap budaya selama ini dapat diingatkan bahwa itu merupakan sebuah pelanggaran," jelasnya.

Menurut Herman Deru, membutuhkan komitmen yang panjang untuk mewujudkan kesadaran bahwa perbuatan korupsi adalah sesuatu yang dilarang.

Sementara itu, Direktur Pembinaan



Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjanto, mengatakan, program bimtek ini beda dari program lain, di mana membangun kepedulian dan harmonisasi di lingkungan keluarga para pejabat di Sumsel mereka menghadirkan motivator hingga psikolog. Sumsel dikatakan menjadi provinsi keempat yang menggelar bimtek setelah Jakarta, Lampung dan Bali.

Saat ini, pihaknya memahami bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, namun praktiknya korupsi seperti sudah biasa.

"Ini yang mendasari kami ingin mengubah perilaku yang mau kami ubah. Ini tidak mudah dan tak mungkin hari ini selesai. Ini kami lakukan juga sebagai langkah menyiapkan kader di 2045 di Indonesia yang bebas korupsi," tambahnya.

Dalam rangka pencegahan korupsi, pihaknya melakukan berbagai langkah pencegahan, baik melalui pendidikan sebagai bentuk pengingat. Kemudian, mencegah dalam bentuk memperbaiki sistem, hingga melalui penegakan hukum.

"Korupsi adalah pilihan hidup, karena itu jangan menyalahkan kejadian dan memberantas korupsi dapat dimulai dari individu, keluarga yang harmonis dan saling mengingatkan. Karena itu pula keluarga menjadi kunci pencegahan korupsi," jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa Sumsel dapat memilih salah satu desa yang dapat dijadikan percontohan sebagai desa antikorupsi. Pembentukan ini bertujuan menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa.

Dalam meningkatkan kesadaran hukum ini, Gubernur Herman Deru juga mengajak Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk ambil bagian dan melibatkan diri dalam mengedukasi masyarakat terkait hukum.

Menurut Herman Deru, saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan sadar terkait hukum tersebut. Untuk itu, edukasi harus masif dilakukan, baik oleh institusi seperti Kejaksaan Tinggi maupun institusi terkait lainnya.

"Kami punya program keluarga sadar hukum (kadarkum). Ini sangat baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

terkait hukum tersebut. Namun itu tidak bisa dilakukan oleh Pemprov Sumsel sendirian. Semua pihak harus terlibat, termasuk Kejati saya harapkan untuk memberikan literasi hukum tersebut," tegas Herman Deru saat menggelar silaturahmi antara Gubernur Sumsel, Forkopimda serta Bupati dan Wali Kota dengan Kajati Sumsel, Sarjono Turin, di Griya Agung Palembang, Kamis, 8 September 2022.

Dia mengungkapkan, jika Sumsel memiliki potensi menjadi pusat penegakan hukum dan edukasi hukum yang baik.

"Sumsel ini memiliki spirit kebersamaan dan sinergitas yang tinggi. Spirit itulah yang bisa menjadikan Sumsel sebagai tempat penegakan hukum dan edukasi hukum yang baik," tuturnya.

Edukasi hukum tersebut merupakan suatu keharusan, termasuk juga di kabupaten dan kota yang ada di Bumi Sriwijaya.



"Banyak sekali yang butuh edukasi tersebut. Apalagi di kabupaten dan kota. Hal itu juga sebagai upaya preventif untuk mencegah pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan masyarakat," paparnya.

Tidak hanya hukum pidana, literasi menyoal hukum perdata juga dapat dilakukan. "Termasuk soal persengketaan lahan. Baik antar masyarakat, masyarakat dengan korporasi, maupun sesama korporasi tersebut. Kita harus sinergi berikan pemahaman tersebut," sebutnya.

Roadshow Bus Antikorupsi

Kota Palembang, Sumatera Selatan, menjadi daerah pertama yang dising-

gahi Roadshow Bus KPK "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" bertempat di halaman Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jumat, 9 September 2022. Roadshow Bus KPK 2022 di Kota Palembang secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Roadshow Bus KPK di Palembang berlangsung selama tiga hari, 9-11 September 2022, di mana 9 kota yang akan menjadi tujuan persinggahan Bus Antikorupsi antara lain Palembang, Prabumulih, Kayu Agung (Sumatera Selatan); Metro, Bandar Lampung, Kalianda (Lampung); dan Serang, Cilegon, Tangerang Selatan (Banten). Program ini direncanakan berjalan hingga 9 Oktober 2022.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, saat menyampaikan sambutan pada peluncuran Roadshow Bus Antikorupsi ini menegaskan program ini adalah tahapan puncak sosialisasi, di

mana sebelumnya juga Pemprov Sumsel berkolaborasi bersama KPK dan bupati/wali kota se-Sumsel menyelenggarakan keluarga berintegritas.

Menurutnya, hadirnya Roadshow Bus KPK dapat membantu Pemprov Sumsel untuk terus memotivasi masyarakat, terutama pada tingkat penyelenggara pemerintahan.

"Hasil pembicaraannya yakni membentuk desa anti korupsi yang akan ditetapkan, Literasi anti korupsi kepada masyarakat ini kami di daerah merasa sangat terbantu dengan metode yang dilakukan oleh KPK, ini sangat memotivasi masyarakat terutama penyelenggara pemerintahan," katanya. ●



DIANUGERAHI PENGHARGAAN PEMBINA OLAHRAGA BERPRESTASI

Kesuksesan penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VI/2022 Sumatera Selatan, Juli 2022, membuat Gubernur Herman Deru menerima penghargaan sebagai Pembina Olahraga Berprestasi yang diberikan langsung Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, pada peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) XXXIX 2022 di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat, 9 September 2022.

Herman Deru mengatakan, penghargaan yang diterimanya merupakan penghargaan untuk para atlet, pegiat olahraga dan seluruh masyarakat Sumsel.

"Penghargaan yang kita terima malam ini buah dari kerja keras semua pihak yang telah menjadikan Sumsel sukses pada penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional VI/2022 beberapa waktu lalu. Di mana prestasi yang kita dapat Sumsel sebagai tuan rumah dengan peserta terbanyak, juga berhasil meraih juara umum dengan perolehan medali terbanyak," tegas Herman Deru.

Menurut Herman Deru, dalam pembinaan olahraga saat ini sudah ada Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang menjadi garis besar dalam mengelola olahraga ini. Artinya ada penyertaan olahraga prestasi dan rekreasi serta lainnya, maka ada pengurus Komite di Sumsel.

"Untuk itu, saya yakin spirit

masyarakat untuk berolahraga ini bukan hanya untuk kebutuhan memperbaiki stamina, tapi untuk betul-betul mengejar prestasi dan membawa nama harum negara kita," tuturnya.

Herman Deru berharap peringatan Haornas di Kaltim ini menjadi tanda membaiknya prestasi olahraga di Indonesia. "Peringatan Haornas cukup meriah dan ini menjadi hila atau tanda-tanda prestasi olahraga Indonesia akan membaik," sambungnya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, semangat membangun olahraga nasional harus digelorakan karena memberikan banyak makna di kehidupan. Sebab olahraga mampu menyatukan perbedaan.

"Olahraga bukan semata soal stamina, melainkan tentang kualitas hidup yang lebih sejahtera. Olahraga ini membangun kedisiplinan, ketangguhan, sportifitas dan kerja sama," katanya.

Tak hanya itu, olahraga juga mampu membentuk karakter bangsa, bahkan jadi sarana menjaga perdamaian. Un-

tuk itu, Wapres mengajak para generasi muda dan kalangan orang tua untuk terus bergerak dengan tetap semangat berolahraga.

"Bersama kita jadikan olahraga bagian kesehatan, jadikan olahraga bagian dari keseharian agar masyarakat bergaya hidup sehat," katanya.

Sementara, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, menegaskan, olahraga merupakan aktivitas penting dalam membangun SDM yang unggul, tangguh dan berkarakter, utamanya dalam menjaga kebugaran di tengah pandemi.

"Peringatan Haornas ini kita jadikan sebagai momentum untuk kembali menggelorakan slogan Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat," ucapnya.

Zainudin juga menyebut, kolaborasi dan komitmen yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan stakeholder olahraga dalam mencetak juara di bidang olahraga melewati proses yang sangat panjang.

"Diawali melalui pembudayaan olahraga, pembinaan sejak usia dini, kompetisi secara berjenjang dan sistematis serta didukung dengan penerapan sport science," katanya.

Lahirnya UU 11/2022 tentang Keolahragaan dan terbitnya Perpres 86/2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), diharapkan mampu memberikan kontribusi pencapaian tujuan pembangunan olahraga dalam dimensi yang lebih luas, yakni untuk mewujudkan Indonesia bugar berkarakter tangguh dan berprestasi dunia.

"Olahraga harus mampu berperan dalam pemberdayaan ekonomi. Oleh sebab itu, maka tema peringatan HAORNAS XXXIX 2022 ini adalah Bersama Cetak Juara," paparnya.

Dia mengajak semua lapisan masyarakat untuk melaksanakan gerakan olahraga secara masif, sehingga olahraga dijadikan sebagai kebutuhan hidup dan gaya hidup.

Selain Gubernur Herman Deru, penghargaan juga diberikan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Selain itu, berbagai penghargaan juga diberikan kepada lembaga pemerin-

tahan, olahragawan, awak media dan lainnya.

Komitmen Gubernur Herman Deru dalam memajukan olahraga di Sumsel telah dibuktikan dengan banyak menggelar sejumlah event olahraga, baik skala daerah, nasional, bahkan internasional. Bahkan, sejumlah fasilitas olahraga terus dibangun di 17 kabupaten/kota se-Sumsel.

Cetak Rekor MURI

Penyelenggaraan FORNAS VI yang berlangsung pada Juli lalu menjadi pelaksanaan paling sukses selama event ini digelar. Keberhasilan Sumsel

Sumsel tidak terlepas dari andil semua pihak, mulai dari panitia, pegiat, venue, sampai ketertiban masyarakat yang terjaga dengan kondusif.

"Sukses yang telah dicapai merupakan buah dari kolaborasi, mulai dari penyambutan, pelaksanaan, hingga penutupan. Tidak ada institusi yang tidak punya peran, Saya sampaikan terima kasih atas perjuangan kita semua," ujarnya.

Diakui Herman Deru, Selama ini olahraga rekreasi masyarakat berjalan dengan apa adanya, dengan perbedaan jenis olahraganya dan lebih ekstrim lagi di setiap daerah berbeda namanya.



sebagai tuan rumah FORNAS VI ditandai dengan diterimanya penghargaan Rekor Muri dengan jumlah peserta mencapai 12 ribu dari 34 provinsi di Indonesia. Selain itu, Sumsel juga berhasil menjadi juara umum dengan perolehan 459 medali, yakni 129 emas, 152 perak dan 178 perunggu.

"Ternyata kerja keras kita dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Dengan segenap kebanggaan, kita patut bersyukur sukses sebagai pelaksana, juga sukses dalam prestasi. Terlebih lagi sukses dalam ekonomi," ungkap Gubernur Herman Deru saat pembubaran kepanitiaan Fornas VI Sumsel di halaman Griya Agung, Minggu, 21 September 2022.

Suksesnya perhelatan Fornas di

Sementara, Ketua KORMI Sumsel, Samantha Tivani HD, dalam laporannya mengatakan, FORNAS tidak hanya menjadi ajang pertandingan atau perlombaan semata, namun ada nilai yang lebih dari sekadar bertanding. Yakni silaturahmi.

Sebuah misi bagaimana menamakan kebugaran pada masyarakat, bagaimana mengangkat kembali olahraga permainan tradisional untuk dapat dikenal kembali oleh generasi muda sekarang hingga tidak hilang tergerus masa.

"FORNAS juga tentunya memiliki misi menggiatkan perekonomian masyarakat, khususnya UMKM dan juga pariwisata di Sumatera Selatan," tegasnya. ●rhd/**



• Tangsel Marathon 2022

EVENT OLAAHRAGA BANGKITKAN KEMBALI EKONOMI



Sebanyak 2.500 pelari dari berbagai daerah hingga mancanegara mengikuti Tangsel Marathon 2022 yang diselenggarakan di Teras Kota, BSD.

Dibuka langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, Tangsel Marathon dimulai pukul 05.00 WIB, di mana jalan yang dilintasi peserta telah disterilkan dari kendaraan yang melintas.

Berhadiah total Rp350 juta, Tangsel Marathon terbagi dalam lima kelas yang dilombakan, yakni 42 kilometer, 21 km, 10 km, 5 km, dan kelas khusus difabel.

Wali Kota Benyamin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih

kepada seluruh pihak yang terlibat menyukseskan Tangsel Marathon. Menurutnya, gelaran yang sukses itu berkat kolaborasi semua pihak dan terpenting dukungan yang luar biasa dari masyarakat.

"Tangsel marathon ini kegiatan yang bersifat kolaboratif bersama para sponsor. Tidak menggunakan APBD sama sekali. Dan yang paling penting kebahagiaan masyarakat dapat terasa dengan adanya Tangsel Marathon ini, serta perekonomian juga tumbuh," ujar Benyamin.

Benyamin mengatakan suksesnya penyelenggaraan kegiatan ini karena dukungan dan antusiasme warga Tangsel yang luar biasa.

"Tangsel Marathon 2022 sukses digelar berkat dukungan penuh masyarakat. Mereka mengkampanyekan kegiatan ini jauh-jauh hari. Ada yang terlibat kepanitiaan, ada juga yang ikut lombanya. Jadi, marathon ini betul-betul hajatnya warga Tangsel," kata Benyamin.

Sejumlah tokoh diketahui hadir memeramaikan Tangsel Marathon 2022,



di antaranya Wali Kota Tangerang Selatan Periode 2010-2020 Airin Rachmi Diany, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, dan Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin, Kadispora Banten Ahmad Syaukani, Ketua DPRD Tangsel, Kepala Kantor BJB Tangsel, BNN Kota Tangsel, dan Polres Kota Tangsel.

Tangsel Marathon tak hanya menjadi sarana olahraga semata. Lebih dari itu, Tangsel Marathon sekaligus menjadi alat menuju kebangkitan ekonomi di Tangsel.

Benyamin berharap dari acara Tangsel Marathon akan muncul bibit-bibit atlet, minimal di tingkat lokal. Melalui acara ini diharapkan terjadi kebangkitan olahraga, ekonomi, sosial, budaya.

"Saya harap pandemi yang sempat menekan ekonomi kita hingga -1,01 persen, tapi sekarang sudah menuju pertumbuhan positif 4,3 persen. Setelah ini diharapkan bisa bangkit lagi, terutama di sektor perdagangan dan jasa. Konsumsi di Tangsel cukup baik seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat," kata Benyamin.

Dia menambahkan, Tangsel Marathon merupakan jawaban aspirasi dari berbagai komunitas pegiat olahraga. Event ini bersifat kolaboratif, Pemkot tidak mengeluarkan dana dari APBD sama sekali, atau mandiri dari para sponsor.

"Event berskala nasional ini tidak memakai dana APBD Tangsel, seluruhnya dari sponsor. BJB sebagai sponsor utamanya. Kita bekerja sama dengan IdeaRun dan Race Management yang telah berpengalaman menyelenggarakan event lomba lari massal. Sekali lagi, atas nama Pemkot, saya berterima kasih atas partisipasi semuanya," kata Benyamin.

Benyamin berkomitmen akan menyelenggarakan kegiatan yang sama di tahun mendatang.

"Tahun depan, Pemkot akan adakan Tangsel Marathon 2023 lagi. Tentu dengan persiapan yang lebih matang, peserta yang lebih banyak, dan hadiah yang lebih besar. Skalanya kita naikan dari nasional, jadi event internasional," katanya bersemangat.

Dengan begitu, lanjut Benyamin,

peluang Tangsel untuk mendorong pariwisata dan perekonomian bisa tercapai.

"Ke depan, kegiatan seperti ini harus bisa menggaet para wisatawan dalam dan luar negeri. Harapannya, warga Tangsel terus sehat, dan terpenting ekonomi dan kesejahteraan warga Tangsel ikut terangkat," ujar Bang Ben.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Tangsel, Mursinah, mengatakan ajang ini menjadi event yang besar dan dapat membangkitkan perekonomian di Tangsel.

Tangsel Marathon ini menjadi langkah awal Tangsel untuk mengembangkan seluruh kegiatan baik itu sosial, ekonomi dan lainnya bisa kembali seperti semua. Serta mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke Tangsel.

"Bayangkan saja, 2.500 pelari kumpul semua di Tangsel dan mengikuti Tangsel Marathon, ini luar biasa," ungkapnya.

Sebelumnya, para pelari tersebut telah mengambil tiket dan baju pada Jumat hingga Sabtu (9-10/9/2022) di

• INFO TANGSEL

Lantai 2 depan CGV Teras Kota BSD, Serpong.

"Peserta menerima baju atau kaos, BIB (nomor dada) dan produk-produk sponsor," jelasnya.

Direktur Idea, Safrita Aryana, menjelaskan, rute-rute yang dilalui para peserta Tangsel Marathon. Untuk rute 42 Km, peserta melintasi Teras Kota, Polsek Serpong, Pasar Modern BSD, Ciater Maruga, Kelurahan Serua, tanah tingal, Kampus UPJ, Bintaro Xchange, Emerald Bintaro (binloop), graha raya, pusdiklantas, alam sutera, Telkomsel, taman kota 1, Eka hospital, kembali lagi ke teras kota.

Rute 21 Km yakni Teraskota, depan Polsek Serpong serpong, Pasar Modern BSD, Ciater Maruga, balik lagi ke

balik autopart, Eka hospital lalu teras kota.

"Alhamdulillah semua kategori telah diselesaikan dan didapatkan para pemenangnya. Dan ini berjalan lancar berkat kolaborasi kita semua, terutama Pemkot Tangsel yang luar biasa," pungkasnya.

Tangsel Marathon ini menjadi sorotan luas dan menjadi daya tarik seluruh peserta. Salah satu hal yang menarik tersebut adalah keikutsertaan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan dan Wali Kota Bogor Bima Arya yang meramai-kan Tangsel Marathon 2022.

Pilar berhasil menyelesaikan lari dengan jarak 10K. Sama halnya dengan Bima Arya yang juga berhasil finish di Tangsel Marathon dengan jarak yang

kategori. Antusiasme masyarakat sangat baik, peserta sekitar 2.500 yang terdaftar. Bisa sampai 3 ribu (peserta) karena datang dari luar kota dan tidak sempat mendaftar dan mendapat nomor," kata Pilar.

Pada Tangsel Marathon disediakan kategori disabilitas dengan jarak 3K. Menurut Ichsan, adanya kategori tersebut untuk memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat turut berpartisipasi.

"Kita memberikan ruang bagi saudara kita yang disabilitas agar mereka juga bisa mengikuti olahraga lari. Kita batasi di 3K supaya memudahkan juga," katanya.

Sementara, Bima Arya juga mengapresiasi Pemkot Tangsel yang telah sukses menyelenggarakan Tangsel Marathon. Baginya, ini bisa menjadi contoh untuk kota-kota lain yang ingin menggelar event marathon besar seperti ini.

"Sekali lagi selamat untuk Pemkot Tangsel, Marathon berjalan sukses lancar dan doorprize-nya banyak sekali. Ini semua untuk masyarakat, luar biasa," puji Bima Arya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Tangerang Selatan Periode 2010-2020, Airin Rachmi Diany, juga memberikan apresiasi atas terselenggaranya Tangsel Marathon 2022.

"Tangsel Marathon 2022 adalah spirit untuk hidup sehat. Tak sekadar urusan perlombaan, tapi di dalamnya ada kebersamaan. Semua pihak berpartisipasi. Pemkot berhasil menggandeng swasta untuk ikut terlibat. Tidak menggunakan APBD. Tentu, animo dan dukungan warga Tangsel harus diacungi jempol. Sukses untuk Benyamin-Pilar," kata Airin.

Salah satu peserta lari Marathon 5K, Wulan Siti Maryam, mendukung jika kegiatan serupa bisa terus digelar. Perempuan yang berdomisili di Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur ini berharap ke depan bisa ditemukan bibit atlet Marathon.

"Sebagai warga Tangsel, tentu saya ingin ajang seperti ini terus diadakan. Untuk kategori kelompok usia anak-anak mungkin bisa ditambah. Dengan begitu, nanti akan lahir atlet Marathon asal Tangsel yang bisa mengharum-



pasmod, ora et labora, Masjid Al Hakim, putar balik ke Pasmod, langsung ke taman kota 1, eka hospital, dan kembali ke teras kota.

Rute 10 K yakni Teraskota, depan Polsek Serpong, Pasmod, Ciater Maruga, balik lagi ke Pasmod, ora et labora, Masjid al Hakim, putar balik ke Pasmod, autopart, eka hospital, kembali ke teras kota

Sedangkan, Untuk rute 5 Km, pelari mulai dari Teras Kota, depan Polsek Serpong, Gereja Menorah, balik lagi ke Autopart, lalu Eka hospital dan Teraskota. Sedangkan untuk rute disabilitas atau 3 Km dari Teras kota, putar

sama.

"Alhamdulillah bisa menyelesaikan lari dengan jarak 10K ini. Tadi melihat masyarakat yang ikut lari, saya jadi tambah semangat untuk segera sampai garis finish," kata Pilar se usai sampai di garis finish.

Dia juga mengapresiasi seluruh pihak termasuk juga dukungan masyarakat dalam menyukseskan gelaran Tangsel Marathon. Menurutnya, ini harus terus menjadi agenda tahunan yang akan menjadi ciri khas Tangerang Selatan.

"Alhamdulillah, Tangsel Marathon terselenggara dengan lancar di semua

kan nama Tangsel dan Indonesia," harap Wulan.

Siap Tuan Rumah Porprov 2026

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menerima secara langsung audiensi dari KONI Banten dan Kota Tangerang Selatan. Audiensi diterima di Aula Blandongan, Puspemkot Tangsel, Kamis (1/9/2022).

Pertemuan ini dalam rangka membahas persiapan Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu kandidat tuan rumah Porprov VII Banten 2026.

"Pada prinsipnya, kami Pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat siap menjadi tuan rumah Porprov VII nanti," ujar Benyamin.

Menuju Porprov VII Banten, persiapan mulai dari sarana dan prasarana akan menjadi perhatian. "Momentum ini kami ambil, untuk kami manfaatkan agar menggairahkan kembali masyarakat melalui olahraga. Lewat Porprov ini khususnya bukan hanya prestasi tapi multiplier effectnya," tambah Benyamin.

Oleh karenanya, Benyamin juga secara terbuka menerima saran dan masukan untuk Kota Tangerang Selatan, seandainya ditetapkan menjadi tuan rumah Porprov VII Banten.

"Seandainya nanti ditetapkan oleh Pemprov Banten dan KONI Banten menjadi tuan rumah Porprov, kami sangat terbuka atas saran, pertimbangan maupun perbaikan yang harus dilakukan Pemkot Tangsel," kata Benyamin.

Selanjutnya, Benyamin juga mengatakan kesiapan yang harus dilakukan dari sisi penyediaan alokasi anggaran biaya di dalam APBD.

"Persiapan juga dari sisi anggaran untuk mendukung terselenggaranya Porprov ke-VII di Tangerang Selatan," kata Benyamin.

Apresiasi Kafiatur Rizky

Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan apresiasi kepada Muhammad Kafiatur Rizky, pemain Timnas Indonesia U-16 yang mencetak gol tunggal ke gawang Vietnam di Final AFF U-16, Agustus lalu. Apresiasi diberikan secara langsung oleh Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan di rumah dinas

Wali Kota Tangerang Selatan, Jumat (19/8/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Benyamin mengaku bangga lantaran ada putra asal Tangerang Selatan mencetak prestasi di tingkat Internasional. Karena berkat golnya, Indonesia menjadi timnas terbaik se-Asia Tenggara untuk kelompok usia di bawah 16 tahun pada edisi kali ini.

"Tentu kami merasa bangga ya, dan masyarakat banyak juga yang menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya kepada Kafiatur Rizky," kata Benyamin.

Benyamin juga berpesan untuk terus mengukir prestasi terbaik. Sebab, masa depan Kafiatur Rizky masih panjang untuk menorehkan tinta emas bagi bangsa Indonesia.

"Mungkin nanti Kafiatur Rizky bisa

Sementara itu, Kafiatur Rizky menyampaikan rasa senang dan bangga bisa menjadi penentu kemenangan Timnas Indonesia di ajang Final AFF U-16 melawan Vietnam.

"Saya bangga banget sih bisa cetak gol dan juga berkat kerja sama tim. Karena memang ada target dipertandingan sebelumnya, buat cetak gol," ucap Kafi.

Ketua Askot PSSI Tangsel, Erlangga Yudha, menjadikan Muhammad Kafiatur Rizky sebagai sosok yang patut dicontoh bagi anak muda, terutama di bidang olahraga sepak bola. Bagaimana kerja kerasnya hingga berhasil mencetak prestasi yang membanggakan.

"Sosok Kafiatur ini harus jadi contoh yang lain, termasuk Askot sendiri. Ini di-



memberikan coaching clinic bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun, termasuk di sekolah sepak bola," ujar Benyamin.

Pujian juga dilontarkan oleh Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan yang juga sebagai ketua Asprov PSSI Banten kepada Kafiatur Rizky atas prestasinya. Dia berharap Kafiatur tidak cepat puas terus meningkatkan kemampuannya untuk menorehkan prestasi terbaik bagi Indonesia.

"Kafi ini luar biasa disiplinnya dan juga selalu berdoa kepada Tuhan. Mudah-mudahan Kafi selalu jadi kebanggaan, jangan pernah menurun, jangan pernah kendor, jangan pernah turun semangatnya," pesan Pilar.

jadikan contoh bagaimana sih proses dia bermain bola hingga dilirik Timnas, bahkan mengantarkan Indonesia juara," kata Angga.

Angga juga berpesan agar Kafiatur Rizky tidak terlena dengan sanjungan dan capaiannya saat ini. Terlebih, usianya masih sangat muda, di mana perjalanan ke depan masih sangatlah panjang. Sehingga godaan-godaan seperti materi yang didapat, jangan sampai terlena dan menurunkan intensitas latihannya.

"Jangan sampai terlena dengan pujian dan materi. Dengan kondisi sekarang berlimpah materi, jangan sampai Kafiatur lupa akan konsistensinya," pungkasnya. ●



FOKUS APBD PERUBAHAN JABAR 2022

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022. Penandatanganan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, mengungkapkan bahwa penyusunan perubahan KUA-PPAS 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2022 menjadi acuan kepala OPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022," kata Ridwan Kamil.

Gubernur yang juga akrab disapa Kang Emil mengungkapkan bahwa pembelanjaan daerah akan difokuskan dengan pola yang akuntabel, proporsional, dan efektif.

"Efektif sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta kemampuan pendapatan

daerah," tuturnya.

Adapun kebijakan belanja daerah, meliputi pemenuhan belanja wajib, mengikat dan standar pelayanan minimal (SPM), pemulihan ekonomi daerah, peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan konektivitas, dan infrastruktur daerah, serta penganggulungan dampak kenaikan harga BBM.

Harapannya, penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, Pemprov Jabar dan DPRD Jabar bisa saling memantau keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada 2022.

"Pemerintah daerah dan DPRD Jawa Barat pada hakikatnya mempunyai tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk mengawal pembangunan mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2022," ungkap Kang

Emil.

Rp50 Miliar Bansos BBM

Pemprov Jawa Barat akan mengalokasikan anggaran Rp50 miliar di APBD Perubahan 2022 untuk membantu warga Jabar yang terdampak kenaikan harga BBM.

"Alhamdulillah di APBD Perubahan, yang awalnya kita menyiapkan Rp27 miliar, kami kemarin di Badan Anggaran DPRD Jawa Barat telah berdiskusi dan sepakat untuk menambah di APBD Perubahan ini kurang lebih Rp50 miliar terkait kompensasi BBM," ujar Wakil Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Kamis, 15 September 2022.

Ineu mengatakan, anggaran tersebut akan diberikan bagi warga Jawa Barat terdampak dengan kebijakan penyesuaian BBM, yang berprofesi sebagai petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil dan mikro.

"Diharapkan ini bisa membantu

warga yang berhak menerimanya, seperti UMKM, warga miskin, kami juga menambahkan petani dan nelayan. Karena warga Jabar yang berprofesi sebagai petani dan nelayan lumayan banyak," katanya.

Menurut Ineu, pihaknya memberikan sejumlah catatan terkait dengan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, yang telah disepakati oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian oleh Pemprov Jawa Barat, antara lain tetap harus mendahulukan pemenuhan bagi kebutuhan wajib Pemprov Jabar seperti pendidikan, kesehatan, dan penanganan pandemi COVID-19 maupun kebangkitan ekonomi pasca pandemi ini," katanya.

Catatan lainnya, kata Ineu, ialah terkait dengan bantalan sosial akibat kebijakan penyesuaian harga BBM. Ineu pun mengapresiasi Pemprov Jabar yang telah menyiapkan atau mengalokasikan anggaran di dalam menjaga inflasi daerah.

"Ya itu tadi, selama ini di APBD murni sudah dianggarkan sebesar Rp57,2 miliar. Lalu, di APBD Perubahan ini kurang lebih Rp50 miliar terkait kompensasi BBM. Jadi kalau ditotal mencapai Rp100 miliar lebih," kata Ineu.

LANJUTKAN PROGRAM RUTILAHU

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali melanjutkan program bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Bantuan tersebut merupakan satu di antara program prioritas Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat.

Pada tahun ini, Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat menargetkan pemugaran Rutilahu sebanyak 9.513 unit. Anggaran yang disiapkan yakni sebesar Rp189 miliar. Pada 2021, sebanyak 38.290 unit Rutilahu yang tersebar di 1.232 desa/kelurahan sudah rampung diperbaiki.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, secara simbolis telah menyerahkan bantuan perbaikan Rutilahu kepada warga di sejumlah kota/kabu-

paten di Jawa Barat.

Ridwan Kamil mengatakan, program Rutilahu merupakan salah satu komitmen Pemprov Jabar dalam memberikan kesejahteraan masyarakat.

"Saya berharap program perbaikan Rutilahu dapat memberikan keberuntungan secara langsung bagi warga Jawa Barat," ucap Ridwan Kamil.

Kang Emil mengatakan, pada 2022, program Rutilahu tersebut akan dilanjut-

program Rutilahu ini sebagai komitmen Pemprov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum. Dirinya berharap program bantuan Rutilahu dapat mewujudkan hunian yang sehat bagi masyarakat penerima bantuan.

"Diharapkan setelah Rutilahu diperbaiki, derajat kesehatan penghuninya meningkat. Begitu juga produktivitasnya, pendapatan juga serta ekonomi dan kesejahteraannya," kata



kan kembali. Pasalnya, anggaran yang dikelola pemerintah yang bersumber dari rakyat harus kembali ke rakyat.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat, Wahyu Mijaya, mengatakan,

Wahyu.

Wahyu menyebut, masyarakat yang mendapatkan anggaran bantuan pemugaran sudah terseleksi di tingkat desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Badan Keswa-



dayaan Masyarakat (BKM).

Selanjutnya, data diajukan ke pemerintah kabupaten/kota untuk dilakukan verifikasi. Data penerima bantuan itu juga tercantum dalam Si Rampak Sekar (Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat dan pemerintah pusat).

Sementara itu, syarat calon penerima dan calon lokasi (CPCL), antara lain lahan milik sendiri, kategori MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), serta luas ruang yang mencukupi.

SUKSES NOL DESA TERTINGGAL

Menjelang akhir masa kepemimpinannya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku sudah tidak ada lagi status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal di Jabar. Ditambah, capaian-capaian Indeks Desa Membangun (IDM) pada 2021 sebesar

0,72 poin.

"Dulu ada seribuan desa tertinggal saat saya menjabat. Sekarang di akhir satu tahun lagi sudah nol (tidak ada desa sangat tertinggal dan tertinggal). Jadi ada pencapaian luar biasa," ucap Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, belum lama ini.

Adapun jumlah desa berkembang saat ini mencapai 1.671, desa maju sebanyak 2.511, dan desa mandiri meningkat signifikan menjadi 1.130, dari sebelumnya 586 desa.

"Desa mandiri sekarang sudah 1.100-an, lompatannya juga luar biasa," sambungnya.

Menurutnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa penting digulirkan agar tidak ada lagi dikotomi warga yang tinggal di kota dan desa. Dari berbagai aspek, keduanya harus bisa berjalan beriringan, berkolaborasi, dan saling mengisi.

"Itu sebabnya beragam pro-

gram pembangunan sebisanya selalu menyertakan pemberdayaan masyarakat desa. Program-program seperti desa wisata, patriot desa, hingga petani millennial, adalah upaya bersama," tuturnya.

Kang Emil menerangkan, semua program yang dilakukan oleh Pemprov Jabar untuk menghadirkan masyarakat yang betah di desa, berusaha, dan menikmati hasil layaknya masyarakat kota.

Selain untuk pemerataan kualitas ekonomi, hal itu juga akan bermanfaat untuk mengurangi tingkat migrasi ke kota.

"Di dalamnya itu ada percepatan-percepatan yang membuat ekonomi bergerak oleh digital. Konsepnya adalah tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Saya bangga hari ini sudah tidak ada lagi status desa tertinggal di Provinsi Jawa Barat," terangnya. •

PENGENDALIAN INFLASI JABAR TERBAIK DI JAWA-BALI

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meraih predikat terbaik dalam pengendalian inflasi sepanjang 2021 untuk wilayah Jawa-Bali. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto saat Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi 2022 di Hotel Shangri-La Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 14 September 2022.

Atas capaian tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Barat. Keberhasilan tersebut sebagai bukti bahwa TPID Jabar mampu mengendalikan inflasi sejak dihantam Pandemi COVID-19.

Kang Emil juga mengunggah piala TPID terbaik 2021 melalui akun instagramnya @ridwankamil pada Kamis, 15 September 2022.

"Jawa Barat Kembali Meraih TPID

Terbaik," tulis Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Barat menjadi TPID terbaik untuk wilayah Jawa-Bali. Gelar TPID terbaik itu diperoleh lewat program Petani Milenial.

Lewat program itu, Pemprov Jawa Barat dinilai menjadi wilayah yang mampu menjaga stabilitas inflasi sejak dihantam Pandemi COVID-19. Pemda Jabar dinilai mampu bangkit, bahkan meningkatkan ekonomi dari hari ke hari di masa pandemic COVID-19.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah penting dijalankan guna menjaga tingkat inflasi di seluruh daerah di Indonesia.

Rakorpusda ini menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk merumuskan

program kebijakan pengendalian inflasi pada tataran implementatif pasca penyesuaian harga BBM.

"Ke depan, TPIP-TPID akan terus memperkuat koordinasi maupun sinergi program kebijakan untuk stabilisasi harga, terutama pasca penyesuaian BBM guna mendukung pencapaian inflasi nasional tetap terkendali," katanya.

Pemberian penghargaan TPID Award, lanjut Airlangga, adalah sebagai bentuk apresiasi kepada TPID dalam pengendalian inflasi di daerah. Pemenang TPID dan para nominasi telah diusulkan untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) pada kategori Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah.

"Diharapkan dengan tambahan insentif tersebut dapat memacu daerah semakin inovatif dalam perumusan kebijakan yang langsung menyasar pada permasalahan inflasi masing-masing," kata Airlangga. ●



Menko Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto menyerahkan penghargaan TPID Award 2022 kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum

INDUSTRIALISASI NTB SUDAH MENJADI KEHARUSAN

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama pemerintah kabupaten/kota berupaya membangun kemandirian dan pemulihan ekonomi. Salah satu upayanya dengan cara mengembangkan komoditas unggulan daerah dalam rangka sinergitas pengembangan industri di daerah.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mengatakan, di era perkembangan teknologi dan informasi saat ini, industrialisasi merupakan sebuah tuntutan zaman. Revolusi industri sebenarnya

untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

"Mari kita bersama wujudkan NTB Gemilang melalui industrialisasi yang menjadikan masyarakat sejahtera. Dalam ekonomi ada namanya sektor

beranjak mencicipi kesejahteraan dan kemakmuran jika tidak ada keberanian mengubah komoditas tadi. Upaya serius industrialisasi bahwa yang dihasilkan daerah kita juga diolah di sini," tambahnya.

Bang Zul, sapaannya, juga menambahkan harus ada keberanian memastikan untuk penggunaan produk lokal yang dimulai dari pemerintahan, sehingga ada insentif bagi milenial pegiat UMKM.

Dengan mengusung tema Peningkatan Peran Milenial dalam Percepatan Industrialisasi di Kota Bima, Bang Zul mengajak masyarakat untuk menyamakan persepsi tentang program industrialisasi yang diusung pemerintahan Zul-Rohmi.

Termasuk harus mampu mendorong masyarakat untuk dapat mengolah bahan baku menjadi produk olahan sebelum dijual dan dikirim ke pasar. Melalui upaya ini diharapkan produksi bahan-bahan baku di NTB dapat memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Untuk itu, Zulkieflimansyah mengapresiasi keseriusan Wali Kota Bima yang mendorong para milenial muda menjadi wirausaha, mengelola potensi alam dan bahan baku atau bahan mentah di daerah.

Gubernur mengatakan, semangat industrialisasi harus mulai dari pemimpin. Untuk itu, daerah harus berani mengolah bahan mentah. Karena Industrialisasi itu upaya serius semua pihak mengolah bahan mentah.

"Kita jangan senang, produk mentah kita jual, kemudian kembali produk jadi yang lebih mahal. Maka pemda harus berani, memakai produk lokal. Ka-

perkembangan dari tradisional menuju ke modern, sesuai perkembangan dan tuntutan zaman.

Industrialisasi harus dilakukan sebagai kebutuhan bersama, bukan program gubernur, bukan juga program pemerintah, tapi program masyarakat. Komoditas tradisional nantinya akan terus bergerak ke sektor industri, bahkan ke sektor ekonomi.

Industrialisasi merupakan salah satu ikhtiar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Industrialisasi bukan konsep yang baru, tapi siapa yang belajar ekonomi pasti mensyaratkan

tradisional, sektor industri, sektor digital. Ketertinggalan NTB karena belum beranjak dari masyarakat tradisional menuju masyarakat industri, sehingga pergerakan dari tradisional ke industri ini yang disebut dengan industrialisasi," tegas Zulkieflimansyah pada kegiatan Roadshow dan Talkshow Industrialisasi di halaman museum ASI Mbojo, Kota Bima, Rabu, 14 September 2022.

"Siapa pun pemimpinnya jika masyarakat masih berkatut pada sektor tradisional, maka sangat rentan terkena deketting harga dari penjualnya. Makanya yang disebut industrialisasi itu adanya kesadaran dan semangat dari pimpinan, bahwa kita tidak akan



rena industrialisasi merupakan proses mengolah menjadi memiliki nilai tambah. Sehingga hadir lahan baru, untuk menciptakan lapangan kerja dan mampu menghadirkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi, mengatakan masa depan industrialisasi tergantung anak muda.

"Untuk itu, kami dorong para milenial untuk mengembangkan UMKM dengan konsep industrialisasi di era digitalisasi ini," kata Lutfi.

Sehingga, Pemkot Bima mendorong tempat berkembangnya anak muda membangun kreativitas dan wirausaha. Dia mengatakan, ada 23.034 UMKM yang terdata di Kota Bima. Begitu juga usaha yang tidak terdata, ada sekitar 10.000 UMKM.

"Ini modal besar ada kreasi masyarakat kita. Termasuk UMKM yang bergerak pada tenunan atau kuliner," ungkap Lutfi.

Untuk mendukung hal tersebut, Kota Bima juga membangun rumah kemasan untuk membina masyarakat yang bergerak di UMKM agar produknya laku di pasar.

Selain itu, Pemkot juga mendorong sektor pariwisata untuk dimajukan dan dikembangkan di Kota Bima dalam mendukung UMKM di Bima.

Sementara, Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri mengatakan Kabupaten Bima memiliki sejumlah potensi unggulan, di antaranya garam dan bawang. Komoditi unggulan yang dianggap mampu meningkatkan produksi pertanian daerah diperkuat kembali oleh pemerintah.

Produk-produk pertanian NTB memiliki kualitas yang sangat baik. Bahkan, produk pertanian NTB sudah dapat bersaing dengan produk pertanian unggulan luar daerah.

Olahan pertanian garam dengan pengolahan tradisional menjadi produk yang dihasilkan oleh Kabupaten Bima. Selama ini, petambak garam masih melakukan pengolahan dengan cara tradisional lantaran masih belum menggunakan geisolator. Karena banyak petambak yang masih memanfaatkan tambak sebagai tempat memelihara udang dan bandeng.

Salah satu tantangan dalam menjual garam Bima yaitu kualitas garam yang

belum mampu bersaing dengan garam produk luar. Jika petambak ingin memperoleh hasil yang lebih bagus dari usaha garam ini, tentu mereka harus memiliki kualitas produk yang lebih bagus melalui proses yodiumisasi.

Selain garam, komoditas bawang merah juga menjadi atensi Kabupaten Bima. Bawang Bima memang sangat terkenal di masyarakat NTB maupun Indonesia.

Namun, sejauh ini belum ada pusat pengolahan bawang karena kadar airnya cukup tinggi. Sehingga sulit untuk diolah menjadi komoditas siap konsumsi seperti bawang goreng.

Pihaknya berharap ke depan dinas terkait yang berkolaborasi dengan stakeholder lainnya bisa membangun tempat pengolahan produk bawang

merah yang berada di Bima. Sehingga pada saat panen tiba tidak menjadi persoalan lagi.

Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, yang menggagas kegiatan ini mengatakan peran stakeholder untuk membangun ekosistem industrialisasi yang diperkuat dari hulu hingga hilirnya.

"Beberapa kepala OPD NTB serta stakeholders semua yang hadir merupakan ekosistem industrialisasi, mulai dari stakeholder yang menangani bahan baku seperti pertanian dan peternakan dan perikanan, juga ada dinas yang fokus pada industri olahannya, ada perbankan yang akan menjadi pemodal dan ada beberapa BUMN maupun instansi vertikal seperti BPOM yang sudah ada di kabupaten Bima," tuturnya. •LSA/***





Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB Adventus Edison Souhuwat bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi

KESELAMATAN PEKERJA DI NTB MENINGKAT

Hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha mendukung suasana kerja yang kondusif, di mana semua pihak bekerja bersama-sama membangun kemitraan yang produktif. Harmonisasi yang baik ini terlihat meningkat di Nusa Tenggara Barat (NTB) seiring meningkatnya jumlah pekerja yang dijamin ketenagakerjaannya.

Membaiknya iklim usaha ini terlihat dari data BPJS Ketenagakerjaan NTB yang mencatat jumlah pesertanya meningkat 20 persen dari tahun sebelumnya.

"Jumlah yang masuk di 2022 itu sebanyak 212 ribu dari Januari-Agustus. Jadi yang aktif itu ada sebanyak 346.236," kata Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB, Adventus Edison Souhuwat.

Dia merincikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan NTB terdiri dari empat segmen, yaitu Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan jasa konstruksi.

Untuk tenaga kerja aktif segmen PU ada 153 ribu. BPU atau pekerja mandiri 54 ribu. Sementara PMI 17 ribu dan jasa konstruksi 121 ribu.

Seiring berjalannya waktu sudah mulai ada pemulihan, tenaga kerja yang dirumahkan sudah mulai kembali bekerja dan sudah mulai didaftarkan menjadi

peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Mudah-mudahan pemulihan ekonomi ini berjalan normal, tidak mengganggu stabilitas nasional dan pemulihan ekonomi ini," kata Adventus.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan NTB telah membayar klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 299,4 miliar.

"Untuk pembayaran klaim JHT per 9 September 2022 yang sudah kita bayarkan sebanyak Rp299,4 miliar untuk 24 ribu penerima. Selain JHT, kami juga membayarkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp3,13 miliar di 2022 untuk 95 penerima. Sedangkan untuk klaim Jaminan Kematian sebesar Rp12,27 miliar untuk 273 penerima," jelas Adventus.

BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan klaim pembayaran pensiun sebesar Rp2,09 miliar untuk 255 penerima pensiun.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, I Gede Putu Aryadi, mengatakan, hubungan industrial yang harmonis dapat mendukung su-

sana kerja yang kondusif, di mana semua pihak bekerja bersama-sama membangun kemitraan yang produktif. Hubungan yang melibatkan orang banyak ini selain perlu dibangun juga perlu dijaga.

Pemerintah NTB memiliki kepentingan yang besar untuk memastikan terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Perlindungan terhadap pekerja dan kehadiran perusahaan sama penting dan strategisnya.

"Tidak ada perusahaan yang maju dan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi bangsa tanpa tersedianya pekerja atau SDM yang kompeten dan terlindungi hak-haknya. Sebaliknya tidak akan ada peluang kerja bagi masyarakat, tanpa ada perusahaan yang bisa menyerap pekerja," ujarnya saat membuka Bimbingan Teknis Jaminan Sosial Bagi Pemberi Kerja dan Pekerja Penerima Upah Tahun 2022, sekaligus Launching Klinik Layanan Konsultasi Ketenagakerjaan Mobile, Kamis, 15 September 2022.

Sesuai ketentuan, pemberi kerja wajib memberikan perlindungan sosial ke-

pada pekerja, baik berbentuk JKK, JKM, JHT, JKP dan Jamkes. Jadi, pemberi kerja dan pekerja sama-sama berkoordinasi dalam memajukan perusahaan. Semua pekerja pada prinsipnya berhak mendapat perlindungan. Perlindungan di sini tidak hanya dalam bentuk asuransi, tetapi juga bagaimana perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para pekerja.

"Jika hak dan kewajiban tersebut terpenuhi oleh pemberi kerja dan penerima kerja, maka akan meningkatkan produktivitas perusahaan dan nantinya akan berkontribusi dalam menciptakan kesempatan kerja (peluang kerja baru) bagi warga di sekitar perusahaan," terang mantan Irbansus pada Inspektorat NTB itu.

Ia menegaskan komitmennya sebagai pembantu Gubernur NTB akan terus bekerja memastikan seluruh hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha seimbang dan semuanya terlindungi, sehingga tidak terjadi perselisihan.

Kasus hubungan industrial seharusnya diselesaikan sejak dini. Jadi, perlu dilakukan langkah preventif sehingga tidak perlu sampai ke persidangan yang akan menyita waktu dan dana yang tidak sedikit.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meluncurkan Klinik Konsultasi Ketenagakerjaan Mobile. Di dalam mobil klinik konsultasi ketenagakerjaan itu, terang Gede Aryadi, akan ditugaskan tim terpadu terdiri dari pejabat pengantar kerja, pengawas ketenagakerjaan dan mediator, termasuk menyertakan BP Jamsostek untuk rutin turun ke perusahaan dan badan usaha untuk memberikan pembinaan. Sekaligus asistensi kepada pengusaha dan juga para pekerja, termasuk bagaimana Sistem Manajemen K3 dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat dan harmonis.

"Kami ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus melakukan upaya-upaya preventif guna menghindari sengketa hubungan industrial yang merugikan kita semua. Banyak sekali selama ini kasus perselisihan yang sebenarnya sederhana tapi penyelesaiannya jadi kompleks karena tidak ada pemahaman hubungan yang baik. Karena itu Disnakertrans melalui klinik

ini akan turun langsung mengevaluasi hubungan pekerja dan pemberi kerja," jelasnya.

Aryadi berharap kepesertaan Jamsostek terus meningkat. Pengusaha yang tidak ikut program Jamsostek akan rugi karena jika ada masalah ketenagakerjaan, seperti kecelakaan kerja, negara tidak bisa hadir melindungi dan pengusaha sudah pasti akan dituntut untuk mengcover semua biaya pengobatan kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerjanya.

"Dengan mengikuti program perlindungan sosial dari BP Jamsostek, jika terjadi musibah kecelakaan kerja, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali, karena itu akan ditanggung secara sepenuhnya oleh Jamsostek," ungkapnya.

Selain itu, menjadi peserta aktif Jamsostek akan memperoleh Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. Potensi penerima BSU di NTB sebanyak 141.190 orang dan sedang proses verifikasi oleh pusat.

Proses verifikasi dilakukan secara bertahap, pada tahap 1 sudah terverifikasi sebanyak 29.916 orang dan sedang dalam proses transfer ke rekening masing-masing penerima. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan pencairan tahap 2 dan tahap 3.

Data angkatan kerja di NTB Februari 2022 sebanyak 2,78 juta orang. Penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 2,02 juta orang (75,67 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 650,23 ribu orang (24,33 persen). • LSA/**





CARA PEMPROV SULSEL TINGKATKAN PRODUKSI PADI

Berbagai cara dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung dan meningkatkan hasil panen para petani di wilayahnya. Salah satunya dengan meluncurkan Program Mandiri Benih. Program ini merupakan program prioritas Pemprov Sulsel yang diinisiasi oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Benih yang dibagikan gratis ini minim penggunaan bahan kimia dan penangkaran dilakukan di Sulawesi Selatan oleh Instalasi kebun benih milik Pemprov yang bekerja sama dengan para petani penangkar.

Program bantuan benih ini menyasar 100.000 hektare lahan pertanian yang tersebar di Kabupaten/kota di Sulsel. Hasilnya adalah seperti yang dirasakan oleh para petani yang terlibat dalam program tersebut. Salah satunya adalah petani peserta Program Mandiri Benih Tahun 2022 di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

"Alhamdulillah di Desa Ujung Tanah di Bola, Kabupaten Wajo untuk satu hektare meningkat dari sebelumnya men-

jadi 7,2 ton per hektare," kata Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, baru-baru ini.

Hal ini berdasarkan pengubinan yang dilakukan pada luas 2,5 x 2,5 meter, di mana hasil sebelumnya hanya 5 ton per hektare.

Salah seorang petani dari Kelompok Tani Lasapeda, Muhammad Tamrin, menyampaikan rasa syukurnya. "Saya mengucapkan kepada Bapak Gubernur Sulsel, Andi Sudirman, terima kasih banyak telah memberikan bantuan Mandiri Benih kepada kami. Sehingga panen kami meningkat dari yang dulunya hanya mencapai 5 ton. Alhamdulillah berkat dari bantuan Bapak, juga bimbingan penyuluh, sehingga panen kami bisa meningkat menjadi 7 ton. Mudah-mudahan ke depannya perhatian dan kebijakan

tetap berpihak kepada kami," harapnya.

Untuk di Kabupaten Wajo, pada Musim tanam April-September 2022, bantuan Mandiri Benih sebanyak 75 ribu kilogram menyasar 3.000 hektare lahan pertanian yang diperuntukkan bagi kelompok tani penerima bantuan sebanyak 2.339 orang petani.

Sedangkan, rencana bantuan benih musim tanam Oktober 2022 hingga Maret 2023 dengan luas 5.975 hektare, jumlah bantuan benihnya 149.375 Kg.

Hasil serupa juga disampaikan petani di Kabupaten Sidrap. Menurut mereka, bantuan benih padi unggul yang disalurkan Pemprov Sulsel menunjukkan hasil yang memuaskan. Dari benih padi unggul itu, petani di Kabupaten Sidrap merasakan produksi padi yang besar. Bahkan

naik dua ton dari sebelumnya.

"Alhamdulillah, bantuan benih gratis ini lebih meningkatkan hasil pertanian kami dari tahun sebelumnya," ucap petani asal Sidrap, Wahyuddin.

Tahun ini, lanjut dia, produksi dari Program Mandiri Benih mencapai 9,3 ton per hektare. Sementara, tahun lalu hanya 7,5 ton per hektare.

Petani dari Kelompok Tani Tipuminasa, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, ini pun menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

"Kami dari Kelompok Tani Tipuminasa, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, mengucapkan, terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman atas benih padi Mandiri Benih," tuturnya.

Dampak benih mandiri yang telah diluncurkan Gubernur Sulsel Andi Sudirman juga dirasakan oleh petani di Kabupaten Bone dan Maros. Mereka merasa bersyukur karena kuantitas dan kualitas produksi pertanian mengalami peningkatan yang menggembirakan.

Contoh di Kabupaten Bone, seperti pengambilan ubinan bantuan benih padi APBD I di Poktan Ta'disangka, Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Rabu, 24 Agustus 2022.

Petani setempat, M Jafar yang memiliki luas ubinan 2,5-2,5 meter dengan hasil ubinan 6,5 kg. Produktifitas 10,4 ton per hektare. Varietas Inpari 32.

Kelompok Tani lainnya, yaitu Karya Baru, Desa Paccinge, Kecamatan Patimpeng, dengan ubinan 4,5 kg setara dengan 7,2 ton per hectare. Kemudian, Kelompok Tani Radda 2, Desa Karella, Kecamatan Mare dengan hasil ubinan 6,0 kg atau setara dengan 9,6 ton per hektare.

Lalu, Kelompok Tani Samaenre, Desa Mare, Kecamatan Mare dengan hasil ubinan 5,0 kg atau setara dengan 8,0 ton per hektare.

Selanjutnya, Kelompok Tani Luppereng II, Desa Padatuo, Kecamatan Tonra, dengan hasil ubinan 4,8 kg atau setara dengan 7,6 ton per hektare.

DIPUJI PENGAMAT

Pengamat pertanian Suardi Bakri menilai bahwa program Mandiri Benih yang diinisiasi Gubernur Sulsel Andi Sudirman

Sulaiman adalah sebuah program yang sangat strategis dalam meningkatkan produksi pertanian berbagai sektor termasuk perkebunan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulsel.

"Mandiri benih adalah program yang sangat baik dari pak gubernur. Ya, ka-

menjaga kuantitas dan kualitas pertanian.

"Pak gubernur kita tahu benar apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan produksi pertanian di Sulsel. Persoalan benih itu yang utama dan pak gubernur sudah laksanakan di Sulsel," jelas Suardi.



rena ini meningkatkan produksi pertanian secara kualitas dan kuantitas," kata Suardi.

Doktor pertanian yang saat ini menjabat Dekan Pertanian UIM ini mengatakan, persoalan benih berkualitas adalah prinsip utama dan sangat vital dalam

Dengan adanya mandiri benih ini, lanjut Suardi, maka ke depan penguatan kelembagaan petani harus ditingkatkan.

"Kelompok tani yang terverifikasi faktual harus menjadi sebuah keharusan oleh pemerintah," tandasnya. •

SUKSES KENDALIKAN INFLASI PEMPROV SULSEL RAIH TPID AWARD 2022

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terpilih sebagai salah satu daerah penerima penghargaan TPID Award 2022 dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan meraih predikat sebagai TPID Provinsi terbaik dalam pengendalian inflasi sepanjang 2021 untuk wilayah Sulawesi.

Penghargaan itu diterima pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah TPID Tahun 2022 di Hotel Shangri-La Surabaya, baru-baru ini.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengungkapkan, capaian TPID Award ini sebagai bukti sinergitas dan kerja sama yang baik

antara Pemprov Sulsel, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI), Biro Perekonomian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya.

"Alhamdulillah Sulsel menjadi provinsi terbaik dalam menjaga inflasi, khususnya di Pulau Sulawesi," kata Andi Sudirman Sulaiman pada Rapat

Paripurna dengan agenda penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Terhadap Ranperda Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pengantar Pengajuan Nota Keuangan Pada Rancangan Peraturan Daerah Sulsel tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 di Kantor DPRD Sulsel.

Namun, captain tersebut hendaknya tidak membuat semua pihak berpuas diri. Ke depan, tantangannya bisa lebih besar. Untuk itu, upaya dalam memacu inflasi harus menjadi perhatian, termasuk mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi. Sinergi bersama harus diperkuat. Harus ada upaya bersama dalam menangani inflasi.

"Kita harus berpacu menekan inflasi dan penanganan inflasi harus dilaksanakan, kerja sama harus serempak seperti kita menangani pandemi COVID-19 yang menjadi perhatian Bapak Presiden," ungkapnya.

Masalah inflasi pasti akan berdampak pada perubahan alokasi dalam anggaran. Untuk itu, pemerintah daerah akan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). Sehingga, ia mengharapkan dukungan legislatif agar mekanisme sistem penganggaran memiliki fleksibilitas dan adaptif.

"Kementerian Keuangan sudah menginstruksikan, termasuk APBN dilaksanakan sistem penganggaran yang sangat fleksibilitas tinggi, karena momentum global dan perubahan dari dampak perang, pandemi dan seterusnya. Kita harus lebih fleksibel dalam sistem penganggaran dan menjadi perhatian kita," kata Andi Sudirman.

"Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menekan inflasi. Walaupun in-





flasi terjadi peningkatan, namun secara umum di Sulsel angkanya masih terjaga dan diupayakan tidak melewati angka nasional,” tambahnya.

PASTIKAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT TERPENUHI

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani menjelaskan, menghadapi inflasi yang akan terjadi selanjutnya dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi. Salah satunya dengan membentuk Tim Satgas yang akan melakukan operasi pasar.

“Inflasi yang terjadi sekarang kita harus kerja sama memastikan kebutuhan pokok, seperti cabai, minyak goreng, telur, itu yang kita harus segera bentuk. Tim satgas untuk kendalikan operasi pasar,” katanya usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri, belum lama ini.

Tidak hanya itu, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk dapat membantu pemerintah dalam memenuhi ketersediaan bahan pangan bagi

masyarakat.

“Kita tentu ingin memastikan ketersediaan, misalnya cabai. Masyarakat diminta untuk mengatasi dengan memaksimalkan lahan yang ada di rumah,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang memimpin rapat tersebut meminta kepada para gubernur berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah, baik secara langsung maupun secara virtual. Menurutnya, dibutuhkan sinergitas dan konsistensi dalam mengendalikan inflasi di daerah.

“Tolong gubernur jangan ragu melakukan rapat, baik dengan cara langsung, hybrid atau virtual dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kuncinya sinergi, konsistensi, dan kompak. Ini problem yang cukup panjang,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Tito juga meminta agar satgas pangan di daerah diaktifkan dan bertugas untuk memonitor kondisi pangan setiap harinya dan melaporkan kondisi harian tersebut ke pemerintah tingkat dua, tingkat satu, hingga ke tingkat pusat.

DORONG POTENSI WISATA DI DESA

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, terus mendorong sejumlah potensi wisata di desa yang berada di wilayahnya. Langkah ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dari desa yang diharapkan akan membantu menekan angka inflasi.

Sebagai wujud komitmen tersebut, gubernur termuda di Indonesia ini meluncurkan Program Desa Andalan dalam mendukung kemandirian desa melalui potensi wisata di desa.

“Dengan program Desa Andalan, kita melakukan pilot project potensi wisata di desa. Kita menggelontorkan sejumlah anggaran bantuan keuangan untuk mendorong pengembangan potensi wisata di desa,” kata Andi Sudirman.

Andi Sudirman mengatakan, ada bantuan keuangan senilai Rp8 miliar untuk mendukung revitalisasi kawasan wisata Rammang-Rammang di Kabupaten Maros, pengembangan wisata Buttu Macca di Kabupaten Enrekang, bahkan bantuan keuangan Rp20 miliar untuk mendukung pembangunan akses jalan menuju wisata Ollon di Tana Toraja. ●

ADA (BANYAK) KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN

Pondok pesantren selama ini dikenal sebagai lembaga pendidikan agama Islam dengan tujuan menciptakan ulama di masyarakat sekaligus membentuk karakter umat yang berakhlak dan berakidah baik. Namun siapa sangka, dalam perkembangannya banyak sekali perubahan hingga menimbulkan semacam budaya kekerasan atas nama senioritas.

Kekerasan itu bukan hanya dalam hal fisik, namun juga psikis hingga menimbulkan trauma mendalam bagi para korbannya. Atas banyaknya perubahan negatif tersebut, berbagai pihak kemudian ramai-ramai bersuara, termasuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Bahkan, Wapres berharap kasus kekerasan ini tidak menjelekkan pesantren. Wapres juga memberikan perhatian khusus terhadap kejadian yang kerap menimpa lembaga pen-

tan kepada lembaga pendidikan ini supaya ada penekanan terhadap pengasuhan. Kalau tidak, ini akan berulang," kata Yaqut di Istana Merdeka, 8 September 2022.

Kasus yang menjadi banyak perhatian yakni kekerasan terhadap seorang siswa Pondok Modern Darussalam Gontor 1 Pusat bernama Albar Mahdi (17) yang meninggal dunia setelah mengalami penganiayaan.

Pihak pondok pesantren mengakui adanya dugaan penganiayaan oleh

Kriminal Polres Ponorogo, AKP Nikolas, di Palembang.

Pelaku penganiayaan Albar Mahdi merupakan dua orang santri kakak kelas korban yang duduk di kelas 6 atau 12 SMA. Dua santri tersebut sudah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing.

Kasus terungkap ketika ibu korban mengadu ke Hotman Paris Hutapea. Sang ibu kecewa karena pondok pesantren tak mengungkap penyebab kematian anaknya yang sebenarnya. Sang ibu mendapati jenazah anaknya penuh dengan luka lebam. Setelah itu, kepolisian mulai mengusut kasus penganiayaan yang berujung kematian santri Gontor tersebut.

Gontor bukan satu-satunya pesantren yang menjadi sorotan karena kekerasan. Kasus kekerasan lainnya yakni pengeroyokan di Ponpes Darul Qur'an Lantaburo, Cipondoh, Tangerang, Banten. Santri berinisial RAP meninggal dunia diduga akibat dikeroyok pada 27 Agustus 2022.

Polisi telah menetapkan 12 santri sebagai tersangka dalam kasus ini. Para tersangka dijerat Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat 3 UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 170 ayat 2 huruf E KUHP dengan ancaman penjara di atas 7 tahun.

Dari 12 tersangka, hanya lima orang yang ditahan. Sedangkan, tujuh tersangka lainnya dititipkan kepada orang tuanya. Kedua belas santri yang jadi tersangka pengeroyokan yakni AI (15), BA (13), FA (15), DFA (15), TS (14), S (13), RE (14), DAP (13), MSB (14), BHF (14), MAJ (13) dan RA (13).

Hal yang sama juga terjadi di Ponpes Modern Daar El Qolam



didikan berbasis agama Islam ini.

"Ini jadi perhatian. Mestinya, akhlak dibangun untuk menghormati satu sama lain, menghargai, dan mencintai," kata Wapres di Palembang, 7 September 2022.

Sementara, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menyoroti adanya masalah pengasuhan pada lembaga pendidikan berbasis asrama. Apalagi, orang tua santri tidak berada di sekitar anaknya setiap saat.

"Kami akan terus lakukan pendeka-

sesama santri. Bahkan, polisi juga telah mengusut kasus kekerasan terhadap santri asal Palembang tersebut.

Dari peristiwa ini, aparat telah memeriksa 18 orang saksi, di antaranya staf pengajar Ponpes Gontor, dokter Rumah Sakit Sakit Yasyfin Darussalam Gontor Ponorogo, dan dua santri rekan Albar Mahdi.

"Termasuk pemeriksaan terhadap dua orang terduga pelaku penganiayaan yang merupakan senior korban," ungkap Kepala Satuan Reserse

Tangerang. Seorang santri meninggal dunia usai berkelahi dengan temannya di lingkungan pondok pesantren pada 7 Agustus 2022.

Perkelahian bermula dari toilet di kamar korban yang berinisial BD (15). Pelaku RE (15) datang seraya mendorong pintu kamar mandi dan mengenai BD hingga memicu amarah.

Setelah keluar dari kamar mandi, keduanya langsung berkelahi. Sejumlah santri yang menyaksikan perkelahian mencoba meleraikan mereka, namun perkelahian tak berhenti. Korban terus berbicara sehingga pelaku terpancing emosinya. Akhirnya RE masuk ke kamar BD dan memukulnya hingga terjatuh dan meninggal dunia.

Polisi pun langsung turun tangan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Herry memperkosa 13 santriwati. Salah satunya di Pesantren Tahfidz Madani. Ia sempat dijatuhi vonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Bandung, sebelum akhirnya ditingkatkan menjadi hukuman mati.

Sebetulnya, masih banyak kekerasan lainnya yang belum terungkap karena kasusnya mungkin tidak sampai menghilangkan nyawa.

Hasil penelusuran kami, banyak orang tua santri yang terpaksa memulangkan anaknya karena tidak tahan menjadi korban bullying di Ponpes yang dilakukan para seniornya. Para santri yang menjadi korban ini diintimidasi untuk tidak melapor ke keluarga atau orang tua.

"Anak saya itu terkadang sering dimintai uang, sandal juga sering dipin-

tuk kekerasan di dunia pendidikan, baik di sekolah maupun ponpes agar segera dihentikan.

Perintah tegas Ma'ruf Amin itu disampaikan oleh Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, di sela-sela kunjungan kerja Wapres di Sumatera Selatan.

"Wapres memberikan satu arahan agar jangan sampai terjadi kekerasan yang seperti itu lagi di lembaga pendidikan, apakah itu pesantren atau pun lembaga pendidikan berasrama yang lain ataupun apakah yang berlatar belakang agama ataupun tidak," ungkap Masduki.

Menurut Wapres, segala bentuk kekerasan di lembaga pendidikan tidaklah tepat, apapun alasan dan motifnya. Kekerasan yang dimaksud



Sejumlah saksi diperiksa. Polisi juga melakukan autopsi guna mengetahui penyebab kematian korban. Polisi lalu menetapkan RE sebagai tersangka yang kemudian ditahan di sel anak Polresta Tangerang.

Kasus lain yang sempat terjadi di lembaga pendidikan tersebut antara lain Herry Wirawan, seorang pengasuh pondok pesantren di Kota Bandung yang ditangkap pada Mei 2021 usai memperkosa belasan santriwati di berbagai tempat.

Herry adalah pemilik Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda Antapani, dan Madani Boarding School Cobiru.

jam paksa dan tidak pulang. Terpaksa kami beli baru lagi, sering itu. Terakhir anak saya dikeroyok, meski badannya agak besar tapi kalau orangnya banyak yah kena juga. Makanya setelah mengetahui itu, anak saya tarik pulang. Bahaya kalau lama-lama," ungkap Soleh, orangtua santri salah satu Ponpes di Sumatera Selatan.

Hentikan Kekerasan di Ponpes

Kasus kekerasan di pondok pesantren belakangan ini ramai disorot. Kasus memalukan itu mengundang berbagai pihak untuk memberi tanggapan, termasuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan tegas, Wapres meminta agar segala ben-

itu juga termasuk hukuman yang menyebabkan kekerasan fisik harus dihilangkan.

"Kita ambil pelajaran kepada lembaga pendidikan yang lain agar jangan terjadi seperti itu lagi. Karena ini kan beruntun ya, banyak sekali kejadian-kejadian (kekerasan) seperti itu, dulu juga pernah terjadi di lembaga pendidikan negara (seperti) Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), terus di mana lagi, di mana lagi, banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu yang disebabkan oleh proses yang dihubungkan dengan pelatihan fisik bagi seorang siswa misalnya," terangnya. ●rhd/**]



BERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM UNTUK KELUARGA AM

Kasus kematian santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor asal Palembang, Sumatera Selatan, Albar Mahdi, akibat penganiayaan para seniornya mendapat perhatian langsung dari Gubernur Sumsel, Herman Deru.

Hujan yang mengguyur Kota Palembang, Minggu 11 September 2022 petang, tidak menyurutkan langkah kaki Gubernur Herman Deru menyambangi kediaman orang tua almarhum Albar Mahdi yang berlokasi di Jalan Mayor Zen Lorong Sukarame No.35, RT27/RW07, Kelurahan Sei Lais, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Herman Deru datang ke rumah duka untuk memberikan semangat dan menyampaikan rasa duka cita. Datang dengan menggunakan sepeda motor, kehadiran Herman Deru bahkan menjadi kejutan bagi warga sekitar.

Dalam pertemuan singkatnya dengan keluarga dan kerabat Albar Mahdi, Herman Deru kembali menyebut Pemprov Sumsel siap berikan pendampingan hukum kepada keluarga Soimah

jika diperlukan, guna menemukan titik terang atas permasalahan yang menyebabkan anaknya meninggal dunia.

"Kami berikan tawaran pendampingan hukum kepada keluarga AM agar mendapatkan keadilan hukum. Mencari titik terang penyebab meninggalnya anak dari Ibu Soimah ini," ucap Herman Deru.

Disamping itu, Herman Deru berharap penegak hukum dapat menegaskan kebenaran agar keluarga Siti Soimah tidak penasaran dan semua permasalahan cepat terselesaikan.

"Kita percayakan pada aparat untuk bekerja dan sama-sama kawal kasus ini hingga tuntas. Dan kepada pihak keluarga almarhum semoga tetap diberikan ketabahan," ujarnya.

Selain itu, Herman Deru juga mengingatkan kepada keluarga bahwa kejadian ini merupakan ulah dari oknum.

"Jangan sampai semata-merta menyalahkan Ponpesnya," tuturnya.

Bahkan, Herman Deru mengungkapkan, jika ke depannya Soimah dan keluarga membutuhkan bantuan, dirinya memberikan keluasan untuk menemuinya secara langsung.

"Kita serahkan kepada pihak hokum dan saya turut berbelasungkawa. Untuk bantuan, kapan pun dan di mana pun saya siap. Ke rumah pun boleh jika memang perlu bantuan," tegasnya.

Sementara itu, ibu almarhum Albar Mahdi, Soimah menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Gubernur Herman Deru dan jajaran yang telah memberikan kepedulian dan perhatian.

"Terima kasih kepada Pak Gubernur Herman Deru yang sudah menawarkan bantuan pendampingan hokum agar permasalahan ini dapat segera

diselesaikan dan juga sudah berkunjung ke rumah kami dan turut berelasungkawa atas kepergian anak kami,” ungkap Soimah.

Kasus ini tengah ditangani oleh Polres Ponorogo. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengaku pihaknya tengah mendalami motif dugaan penganiayaan terhadap Albar Mahdi.

Sedangkan, pihak Ponpes Gontor juga telah menegaskan akan kooperatif memberikan informasi secara terbuka untuk mengungkap kasus yang menimpa almarhum Albar Mahdi.

Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo juga telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Albar Mahdi yang menyebabkan meninggal dunia setelah mengikuti acara perkemahan.

Kedua tersangka merupakan santri senior dari Ponpes yang sama dengan Albar Mahdi. Mereka adalah MFA (18) warga Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan IH (17) warga Pangkal Pinang, Bangka Belitung.

“(MFA dan IH) ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kapolres Ponorogo, AKBP Catur Cahyono Wibowo, Senin, 12 September 2022.

Dari hasil penyelidikan petugas, diketahui bahwa kedua tersangka itu memukul korban dengan menggunakan kayu di bagian perut dan menendang korban. Selanjutnya, kedua tersangka dijerat UU Perlindungan Anak.

Pernyataan Sikap Keluarga

Meninggalnya Albar Mahdi yang merupakan putra sulung pasangan Siti Soimah dan Rusdi menimbulkan luka yang mendalam. Sebagai seorang ibu, Soimah hampir tidak kuasa menahan kesedihan atas kematian sang anak.

Terkait banyaknya tanggapan dan perhatian dalam kasus kekerasan ini, keluarga almarhum pun akhirnya memberikan pernyataan sikap terhadap masalah tersebut yakni sebagai berikut:

1. Terhadap adanya kunjungan dari Pimpinan Ponpes Gontor ke kediaman saya dengan bertakziah bersama saya dan keluarga besar dan pada sore harinya telah melakukan ziarah ke makam anak saya Albar Mahdi, saya

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Tujuan mereka mengunjungi saya dan keluarga dapat saya maknai adalah suatu bentuk tindakan yang nyata kepada keluarga kami, yaitu untuk menghibur dan mengucapkan belasungkawa agar keluarga kami bersabar dalam menghadapi cobaan yang sedang kami alami.

2. Bahwa dikarenakan masalah ini sudah memasuki ranah hukum, maka saya tetap akan melanjutkan proses hukum tersebut menuntut keadilan

anak saya, sehingga anak saya harus menjalani otopsi, ekshumasi dan saya sebagai seorang ibu untuk menyetujui proses otopsi, ekshumasi tersebut benar-benar sangat membuat batin saya terguncang.

3. Saya sebagai seorang ibu dari Albar Mahdi tetap terus akan melanjutkan perjuangan anak saya. Karena sebelum anak saya meninggal selalu berceloteh kepada saya, yang ingin memperbaiki sistim ponpes.

Rupanya dengan meninggalnya almarhum baru saya bisa mengerti



yang sesungguhnya untuk anak saya Albar Mahdi.

Begitupun kepada pihak-pihak yang terlibat yang mencoba menghilangkan bukti-bukti, menutup-nutupi atas peristiwa penganiayaan terhadap

maksud celotehan tersebut adalah untuk memperbaiki sistem agar tidak terjadi tindakan kekerasan di lembaga pendidikan manapun dan pengalihan pengasuhan dan pengawasan kepada senioritas. ●

POLEMIK PENJABAT KEPALA DAERAH DIIZINKAN MUTASI DAN PECAT PEGAWAI

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengizinkan Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), maupun Penjabat Sementara (Pjs) kepala daerah memberhentikan hingga memutasi pegawai tanpa izin dari Kemendagri. Izin tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 821/5292/SJ.

SE yang diteken oleh Mendagri Tito Karnavian pada 14 September 2022 itu ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota di seluruh Indonesia. Dikeluarkan-nya Surat Edaran tersebut juga bertujuan agar pengelolaan pembinaan kepegawaian di daerah berjalan lebih efektif dan efisien.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan, SE tersebut berisi dua poin pokok dalam mendukung pembinaan kepegawaian di daerah agar lebih efektif dan efisien. Pertama, Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin bagi PNS yang tersangkut korupsi dan pelanggaran disiplin berat.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 PP 94/2021 bahwa kepala daerah harus menetapkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersangkut korupsi.

Benni mencontohkan, apabila ada seorang ASN yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, maka bupati akan melakukan pemberhentian sementara.

Namun, hal ini tidak bisa langsung dilakukan, karena harus izin Mendagri terlebih dahulu. Sedangkan amanat PP 94/2021 menyatakan pegawai yang bersangkutan harus segera diberhentikan sementara.

"Sehingga, dengan izin yang tersebut dalam SE, ASN yang melakukan pelanggaran dapat segera diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Benni dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 17 September 2022.

Poin kedua, Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah yang akan melepas dan menerima ASN yang mengusulkan pindah status kepegawaian antar daerah (mutasi antardaerah), maupun antarinstansi (mutasi antarinstansi).

Dengan demikian, Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana yang diatur sebelumnya.

"Upaya ini dilakukan agar proses pindah status kepegawaian tersebut berjalan lebih efektif dan efisien," terang Benni.

Sebagai contoh, ketika seorang Pj bupati akan melepas ASN-nya pindah ke kabupaten lain. Kedua kepala daerah, baik yang melepas maupun menerima, harus mendapatkan izin Mendagri lebih dulu sebelum menandatangani surat melepas dan menerima pegawai tersebut. Padahal, pada tahap selanjutnya, mutasi antardaerah tersebut akan tetap diproses oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Dengan demikian, untuk mempercepat proses pelayanan mutasi, maka melalui penandatanganan izin melepas dan izin menerima tersebut diberikan," ungkap Benni.

Pada dasarnya, SE itu hanya memberikan persetujuan amat terbatas, hanya 2 urusan di atas kepada Pj Kepala Daerah untuk kecepatan dan kelancaran birokrasi pembinaan kepegawaian, dan sangat jauh berbeda dengan kewenangan kepala daerah definitif.

Namun untuk mutasi pejabat internal daerah, seperti pengisian jabatan tinggi pratama dan administrator, Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tetap harus mendapatkan izin tertulis dari Mendagri. Kalau tidak dapat izin dari Mendagri, maka kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan oleh daerah.

"Selanjutnya, setelah proses pembinaan kepegawaian tersebut dilaksanakan, maka Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tetap harus melaporkan kepada Mend-



Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan

agri paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak kebijakan tersebut diambil," pungkasnya.

SE BERTENTANGAN DENGAN PP

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai bahwa SE Mendagri Tito Karnavian tentang kewenangan Pj kepala daerah untuk memecat atau memutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Menurut Ombudsman, aturan itu bertentangan dengan PP 49/2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

"SE itu tidak bisa mengatur tentang dibolehkannya Pj kepala daerah untuk memutasi ASN. Karena pembatasan itu ada di PP Nomor 49 Tahun 2008, pasal 132A," kata Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, kepada media, Senin, 19 September 2022.

Ada pun ketentuan yang bertentangan dengan aturan SE tersebut terdapat dalam Pasal 132A, PP 49/2008, yang berbunyi: (1) Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:

- a. melakukan mutasi pegawai;
- b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
- c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
- d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Demikian bunyi pasal yang dimaksud Robert dari Ombudsman. SE Mendagri terbaru itu tidak mewajibkan adanya persetujuan dari Mendagri melainkan hanya laporan.

"SE Mendagri itu adalah turunan dari carut marutnya tata aturan kita, tata regulasi kita yang tidak dibenahi dari hulu. Kami menganggap, hulunya itu perlunya diatur PP tentang penjabat kepala daerah. Selagi payung hukum di hulu ini belum dibuat, maka

nyusun rekomendasi. Rekomendasi nantinya ditujukan kepada atasan terlapor yakni Presiden," kata Robert.

Apa konsekuensinya bila nantinya Mendagri tidak mematuhi rekomendasi Ombudsman? "Kita nggak tahu, kan Presiden yang akan mengambil keputusan. Kita minta nanti rekomendasinya menjadi bahan pertimbangan Presiden," kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, menilai Pj Kepala Daerah harus tetap izin dan konsultasi dengan Kemendagri sebelum keputusan untuk memutasi atau memberhentikan pegawainya.



Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang

kecelakaan akan banyak sekali, lebih jempalitan rekomendasi-rekomendasi yang ada," kata Robert.

Sebenarnya, Ombudsman tidak masalah apabila Mendagri memang ingin memberikan kewenangan Pj, Plt, ataupun Pjs untuk memecat atau memutasi pegawai. Namun demikian, tata aturannya harus sesuai kaidah formal, yakni ubah dulu PP 49/2008 itu. Soalnya, kedudukan PP lebih tinggi ketimbang SE. Untuk itu, Ombudsman melakukan langkah-langkah untuk menyusun rekomendasi.

"Sekarang, kami Ombudsman pada tahapan resolusi monitoring untuk me-

"Karena posisinya sebagai Pj, maka kewenangan yang bersangkutan melakukan mutasi harus terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat izin dari Kemendagri. Ini mutlak dilakukan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Junimart Girsang.

Namun, Junimart juga menilai bahwa sebetulnya tidak masalah jika Pj Kepala Daerah memecat atau memutasi aparatur sipil negara (ASN). Hanya saja dia menekankan, jangan sampai nantinya pemecatan atau mutasi itu justru menimbulkan masalah baru seperti gugatan ke lembaga peradilan. ●



GERAK CEPAT AMANKAN DATA PRIBADI

Kebocoran data pribadi yang kian masif menandakan masih lemahnya sistem keamanan siber di Indonesia. Gerak cepat menghadirkan sistem pertahanan dan payung hukum yang kuat kian mendesak, alih-alih saling melempar tanggung jawab, membuat kegaduhan, dan membuang energi.

Data pribadi semestinya menjadi hak milik perseorangan yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, dan dilindungi kerahasiaannya. Namun, kini data pribadi seolah sudah kehilangan privasinya. Diperdagangkan secara bebas dan dengan mudahnya dapat diakses oleh siapa saja yang bukan pemiliknya.

Awal pekan lalu, publik resah lantaran 1,3 miliar data registrasi kartu SIM diduga mengalami kebocoran. Data berupa nomor ponsel yang didaftarkan sejak tahun 2017 hingga Agustus 2022 itu dijual pada forum jual beli data Breached.to oleh akun Bjorka. Di dalamnya juga tercatat data nomor in-

duk kependudukan (NIK).

Tak berhenti di situ, Bjorka kembali menawarkan 105 juta data penduduk yang diduga berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komponen data yang ditawarkan pun lebih lengkap, antara lain nama lengkap, nomor kartu keluarga (KK), usia, hingga alamat.

Belum selesai dengan miliaran data yang bocor, publik kian dihebohkan dengan dugaan bocornya sekitar 180 data milik Badan Intelijen Negara (BIN). Akun Strovian dalam forum jual beli data yang sama diduga menjadi pelakunya.

Bahkan, data pribadi sejumlah petinggi Tanah Air pun turut terekspos. Beberapa di antaranya adalah data

pribadi Presiden Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate, Ketua DPR Puan Maharani, hingga Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Tohir.

Dengan kata lain, kebocoran data tak berbeda dengan Covid-19. Tak pandang bulu. Dapat menyerang siapa saja. Pengawasan sedemikian rupa yang hanya bersifat individu menjadi tidak mempan manakala sistem keamanan secara keseluruhan masih lemah.

Presiden Joko Widodo lantas menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 September 2022. Menteri Komuni-

kasi dan Informatika, Johnny G Plate, menyampaikan bahwa Kepala Negara menginstruksikan jajaran terkait untuk segera berkoordinasi dan menelaah lebih lanjut terkait dugaan kebocoran sejumlah data milik tokoh public, termasuk surat-surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

"Di rapat dibicarakan bahwa ada data-data yang beredar oleh salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang ter-update sekarang, sebagian data-data yang lama untuk saat ini. Hanya tim lintas kementerian/lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam," ucap Johnny.

Johnny menuturkan bahwa pemerintah juga akan membentuk tim untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya dalam rangka menjaga kepercayaan publik. Tim tersebut akan terdiri dari berbagai unsur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Republik Indonesia, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

"Perlu ada emergency response team yang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," tuturnya.

Selain itu, Johnny juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun kekuatan nasional dengan bekerja sama dan menjaga kekompakan. Salah satunya dalam menghadapi bahaya di dalam ruang digital.

"Bahaya di dalam ruang digital itu adalah tentunya tindakan kriminal digital. Ini yang harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat itu normal dalam demokrasi, dihormati dalam demokrasi. Tapi, pada saat untuk kepentingan negara secara keseluruhan, marilah kita jaga kekompakan," ujarnya.

Johnny mengatakan, pemerintah akan terus melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data

Pribadi (RUU PDP). Johnny berharap dengan disahkannya RUU PDP dapat menjadi payung hukum baru untuk menjaga ruang digital di Tanah Air.

"RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat I oleh Panja Komisi I DPR dan pemerintah. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II yaitu rapat paripurna DPR. Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital kita," ucapnya.

Satgas Perlindungan Data

Johnny menyebut bahwa payung hukum untuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data tengah dibentuk agar bisa memulai tugasnya menangani serangan siber di ruang digital Indonesia. Satgas Perlindungan Data dihadirkan melalui koordinasi antara BSSN, BIN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan semuanya diatur melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Johnny memastikan bahwa para penegak hukum juga bekerja untuk mengamankan ruang digital Indonesia dari serangan siber yang belakan-

gan ini semakin masif. Ia berpendapat bahwa langkah-langkah yang diambil oleh penegak hukum disiapkan untuk sejalan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Satgas Perlindungan Data diumumkan oleh Pemerintah pada Rabu, 14 September 2022, sebagai langkah untuk merespon serangan-serangan siber di ruang digital Indonesia.

Johnny menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan evaluasi agar dapat mencegah serangan siber, khususnya di kementerian dan lembaga negara.

"Kami melakukan evaluasi bagaimana untuk lebih meningkatkan keseluruhan sistem dalam rangka penanganan atau pencegahan serangan siber," kata Johnny, Senin, 19 September 2022.

"Kalau pengamanan data, untuk jangka pendeknya saya kira saat ini kan BSSN sedang bekerja. Secara teknis BSSN sedang bekerja, berkoordinasi juga dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk berkoordinasi dengan Kominfo. Tapi, untuk jangka menengah dan panjang, penanganannya kan harus dilakukan dengan baik," jelas Johnny.

Menurut Johnny, hal pertama yang



dilakukan adalah konsolidasi pada sektor penyelenggara negara dengan membentuk satuan tugas yang dikoordinasikan langsung oleh Menko Polhukam, Mahfud MD.

"Nah, juga kita melakukan pendalaman-pendalaman teknis ya karena tidak saja regulasi, pasti dibutuhkan juga teknis sistem dan perangkat dan SDM karena serangan siber tentu tidak bisa dicegah. Dia berlangsung terus menerus setidaknya dalam dua bagian yang penting," tambah Johnny.

Serangan siber tersebut, menurut Johnny, pertama terkait dengan bagian umbrella, yaitu yang berkorelasi dengan firewall. Llau, kedua, thalos, yaitu berhubungan dengan penanganan insiden serangan siber.

"Misalnya, dengan melakukan penetration test yang menguji keandalan sistem dari kementerian/lembaga maupun sektor privat. Semua penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang menyediakan sistem elektronik juga harus menyiapkan agar bisa tahan terhadap serangan siber," papar Johnny.

Menurut Johnny, PSE swasta juga wajib menjaga dan melindungi data pribadi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

"Dan dielaborasi lebih dalam di RUU Perlindungan data pribadi. Jadi, ada dua bagian, yang satu di sektor pemerintahan termasuk penyelenggara sistem elektronik publik di pemerintahan, seperti Peduli Lindungi atau aplikasi di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, itu PSE publik. Tapi, ada aplikasi atau PSE privat, seperti Google, Facebook, Tokopedia, Goto, Bhineka, Bukalapak, semuanya punya kewajiban," jelas Johnny.

Namun, Johnny mengakui bahwa PSE pemerintah saat ini juga tersimpan tidak pada satu tempat. Sehingga daya tahan terhadap serangan siber juga berbeda-beda.

"Kalau pemerintah kan macam-macam, kita evaluasi semua supaya cloud-nya lebih bisa dalam sistem yang sama. Karena kalau cloud-nya berbeda-beda, yang sangat banyak ini, tentu sistemnya beda, engine-nya

beda, kelemahan dan kekuatan berbeda-beda ini yang perlu disederhanakan. Itu yang perlu dievaluasi," tambah Johnny.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan, ada dua hal yang mendasari pembentukan Satgas Perlindungan Data. Salah satunya adalah amanat dari RUU PDP yang akan segera disahkan oleh DPR.

"Sejauh ini, RUU PDP telah disahkan di tingkat I oleh DPR dan akan segera disahkan di tingkat II melalui sidang paripurna DPR," ujar Mahfud.

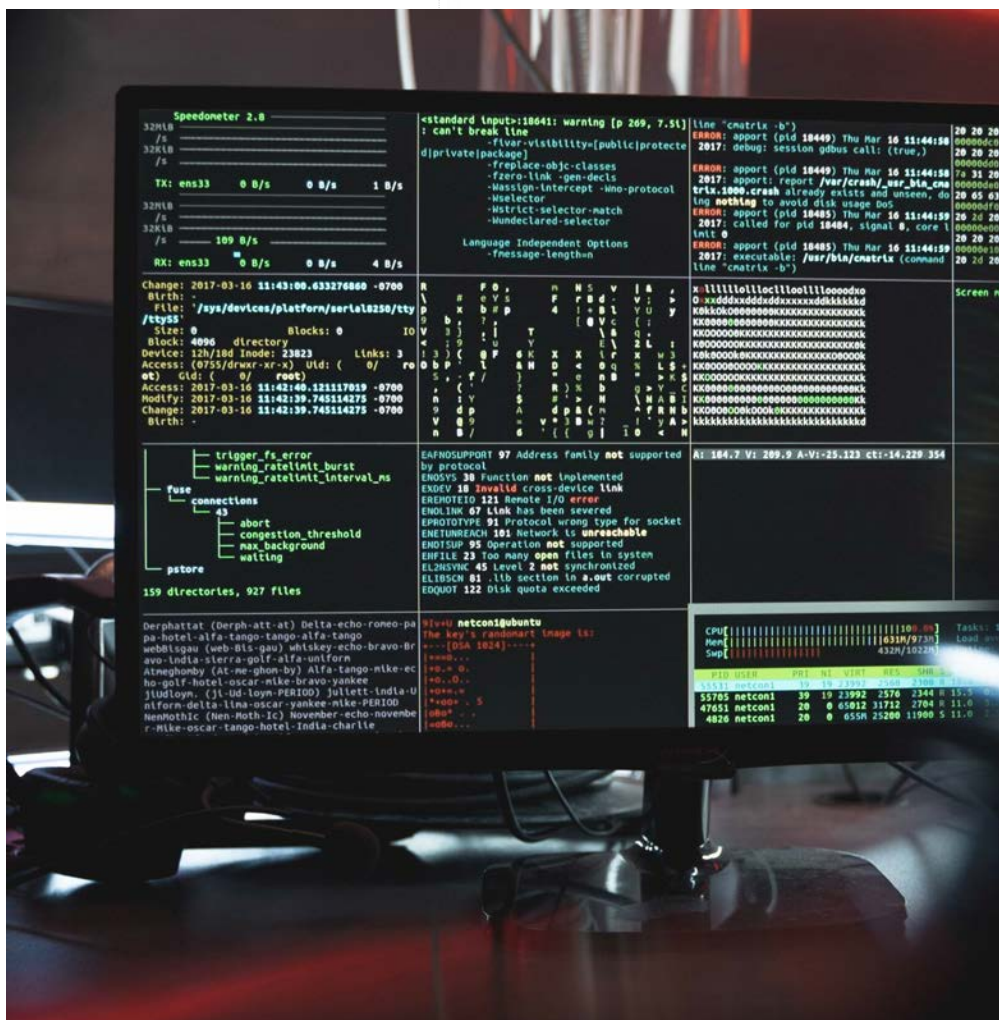
Dia menambahkan, pembentukan

telah mengingatkan bangsa Indonesia tentang pentingnya membangun sistem keamanan siber yang lebih canggih.

Terkait dengan peretasan yang dilakukan oleh Bjorka, menurut Mahfud, data-data yang bocor merupakan data yang bersifat umum, bukan data-data rahasia negara.

"Ini cuma data-data umum yang sifatnya umum dan isinya sampai detik ini belum ada yang (data rahasia negara) dibobol," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, motif peretasan oleh Bjorka bukan motif yang membahayakan, melainkan motif yang meng-



satgas untuk melindungi data, terutama data negara, dari berbagai ancaman kebocoran ataupun peretasan, seperti yang dilakukan oleh Bjorka.

Mahfud menyampaikan alasan lain terkait pembentukan Satgas Perlindungan Data. Yakni, peristiwa peretasan, terutama yang diklaim dilakukan oleh seseorang bernama Bjorka. Hal ini

gabungkan persoalan politik, ekonomi, dan jual beli. "Motif-motif kayak itu tidak ada yang terlalu membahayakan," ucap dia.

Meski begitu, Mahfud menekankan kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah senantiasa serius dalam menangani kasus-kasus kebocoran data.

Pemerintah Juga Perlu Dihukum

Peneliti bidang hukum The Indonesian Institute, Hemi Lavour Febrinandez, menyebut bahwa pelaku peretasan anonim, Bjorka, saat ini terancam pidana 8 tahun penjara serta denda Rp800 juta. Sanksi tersebut merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang larangan bagi setiap orang untuk mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara menerobos atau menjebol sistem pengamanan.



Namun, Hemi menilai, seharusnya pemerintah juga dijatuhi sanksi atas kelalaian menjaga data publik. "Padahal, pihak yang harusnya dijatuhi sanksi bukan hanya peretas yang melakukan pencurian data pribadi masyarakat. Namun, juga kepada instansi atau lembaga yang tidak mampu untuk menjaga data-data tersebut,"

terang Hemi dikutip dari laman resmi The Indonesian Institute, Senin, 19 September 2022.

Ketiadaan sanksi hukum kepada pihak yang menghimpun, menyimpan, dan mengelola data pribadi masyarakat ketika terjadi pencurian hingga kebocoran data, menurut Hemi, menjadi sebuah permasalahan paling mendasar.

"UU ITE hanya memberikan ancaman sanksi kepada peretas dan mengabaikan kelalaian dari instansi maupun lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga data pribadi tersebut," ujarnya.

Ia juga menyayangkan sikap pemerintah lebih memfokuskan diri untuk memburu Bjorka pasca serangkaian doxing yang ia lakukan.

"Hal itu terbukti dengan pembentukan emergency response team yang bertugas untuk menindaklanjuti serangan-serangan siber yang diterima beberapa waktu terakhir. Tim khusus ini terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Badan Intelijen Negara (BIN)," katanya.

Hemi menyebut kasus Bjorka dan kasus kebocoran data pribadi yang terjadi berulang menunjukkan kebutuhan akselerasi atau percepatan pembahasan RUU PDP oleh DPR bersama Presiden selaku pembentuk undang-undang.

"Menghadirkan rujukan instrumen hukum perlindungan data pribadi menjadi sebuah keharusan agar terdapat mekanisme pencegahan, penindakan, hingga jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang telah lalai melindungi data masyarakat, serta pelaku yang melakukan pencurian data-data pribadi tersebut," tandasnya.

Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengatakan, upaya pemerintah mengejar Bjorka saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Sejauh ini, belum terungkap dari mana sumber kebocoran data registrasi SIM Card tersebut. Pihak operator, Kominfo sampai Dukcapil sudah saling membantah.

"Ini pemilik datanya saja tidak diungkapkan oleh pemerintah, dalam hal

ini BSSN yang bertugas mengawasi. Masa tidak bisa menjawab siapa pemilik data yang bocor ini?" tanya Alfons.

Ia menambahkan, memang jika dilihat dari data yang bocor dimana ada data registrasi SIM 2018-2020 dan Kominfo baru memiliki data registrasi SIM 2021. Maka ia menilai patut diduga bahwa data memang bocor bukan dari Kominfo.

"Tetapi ini bukan berarti pemerintah bisa lepas tangan dan membiarkan hal ini menguap. Harus diselidiki bagaimana ada instansi lain yang bisa memiliki data registrasi SIM yang sangat lengkap ini," tambah dia.

Ia menilai perlu dilakukan audit bagaimana pengelolaan data dilakukan di instansi yang mengalami kebocoran data ini. Hal ini yang harus dijelaskan oleh pemerintah.

"Kalau BSSN tidak bisa, mungkin Satgas yang dibentuk Menkopolhukam bisa menginvestigasi dan menjelaskan terang benderang bagaimana hal ini bisa terjadi. Daripada menghabiskan energi mengejar Bjorka yang notabene tidak menyelesaikan persoalan yang sebenarnya," sebutnya.

Menurutnya, posisi Indonesia di ranah siber sangat lemah. Ibarat sepak bola, di mana Indonesia negara dengan populasi nomor 4 dunia tetapi rankingnya di FIFA ada di posisi bawah.

Kata Alfons, walaupun Kominfo bukan pihak yang membocorkan data, seharusnya diberi wewenang eksklusif mengelola data SIM atau ditunjuk jelas dalam peraturan. Sehingga, hal ini menutup celah bagi instansi lain memiliki atau mengelola data ini tanpa persetujuan Kominfo.

"Jadi kalau ada kebocoran data bisa dimintai pertanggungjawaban. Daripada yang dilakukan hari ini, semua menyangkal, sibuk menyangkal, dan tidak mau mengakui siapa yang mengelola data. Masa tidak mampu mengungkapkan siapa sebenarnya yang mengumpulkan data registrasi SIM sebanyak 1,3 miliar dan dilakukan bertahun-tahun," lanjutnya.

"Operator bisa dimintai pertanggungjawaban kok kepada siapa data ini diberikan. Itu langkah yang sangat mudah tetapi tidak dilakukan," pungkas Alfons. ●



MenPAN RB Abdullah Azwar Anas

BUKAN INSTAN BUKAN KARBITAN

Melihat rekam jejaknya, Abdullah Azwar Anas jelas bukan figur karbitan. Ia telah meniti jenjang yang relatif panjang hingga berada di posisinya sekarang: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terkait dengan Revolusi Industri 4.0 yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi.

Paling tidak, Abdullah Azwar Anas menjadi figur yang menambah daftar bekas bupati yang duduk sebagai menteri kabinet. Pasca Reformasi, baru dua bekas bupati yang menjadi menteri: Gamawan Fauzi yang pernah menjabat Bupati Solok, Sumatera Barat dan menjadi Menteri Dalam Negeri di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta Syahrul Yasin Limpo yang pernah menjadi Bupati Gowa, Sulawesi Selatan yang mengisi posisi Menteri Pertanian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Anas adalah menteri ketiga yang pernah menjadi bupati. Bupati, administrator kabupaten, bukan wali kota yang lingkup tugasnya di kota, seperti Menteri Sosial Tri Rismaharini yang pernah menjadi Wali Kota Surabaya.

Saat menjadi Bupati Banyuwangi, Jawa Timur dua periode (2010-2021) itulah Abdullah Azwar Anas yang berpasangan dengan wakilnya, Yusuf Widyatmoko banyak menorehkan kinerja mengesankan. Antara lain peresmian Bandar Udara Blimbing-sari yang sebelumnya bermasalah di masa bupati sebelumnya.

Bandar udara Banyuwangi itu kini tetap melayani turun-naik penumpang. Malah menjadi landmark (bangunan yang menjadi identitas) populer di



bumi Blambangan, sebutan Kabupaten Banyuwangi. Lebih dari itu, Bandara Banyuwangi di Blimbingsari itu masuk Jajaran 20 Arsitektur Terbaik Dunia dalam ajang Aga Khan Awards for Architecture (AKAA) 2022.

Sukses Bandara Banyuwangi tak terlepas dari visi Anas untuk kemajuan Banyuwangi. Kombinasi bandara dengan pengembangan pariwisata dan berbagai event dan festival membuat Banyuwangi kian berkembang. Memanfaatkan limpahan wisatawan Bali yang menjadi tetangga sebelah timur Banyuwangi yang terpisah oleh Selat

wangi menjadi kabupaten pertama yang meraih nilai A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Dari sisi lain, Banyuwangi terbaik menjadi kabupaten terbaik layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kementerian PANRB pada 2019.

Banyaknya prestasi itu mengantar Azwar menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode, yakni pada 2010-2015, dan 2016-2021. Bahkan Banyuwangi pernah mengukir sejarah tingkat internasional, yaitu juara United Nations World Tourism Organi-

dangkan pada Pilkada 2015, ia mendapat usungan dari PDIP.

Dari rekam jejak sebelumnya, Abdullah Azwar Anas merupakan figur yang berlatar belakang santri. Lahir di Banyuwangi pada 6 Agustus 1973, awal pendidikan formalnya adalah madrasah ibtidaiyah yang berpindah-pindah antara Banyuwangi dan Sumenep, Madura. Pendidikan SMP ia tempuh di Banyuwangi, selanjutnya SMA di Jember. Dari Jember ia masuk Jakarta untuk menempuh pendidikan di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan Fakultas Sastra Universitas Indo-



Bali namun tersambung dengan kapal penyeberangan dari pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana, Bali.

Alhasil, Anas dan Banyuwangi menarik perhatian dunia. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini menggelar berbagai festival kebudayaan, mulai dari Banyuwangi Ethno Carnival, Banyuwangi Jazz Festival, Tour de Ijen, yang dikemas dalam perayaan Banyuwangi Festival. Pemkab Banyuwangi memanfaatkan inovasi pariwisata dengan beragam festival yang berhasil meningkatkan laju kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Banyuwangi.

Anas pun sukses membawa Banyu-

zation (UNWTO) untuk kategori kebijakan publik bidang pariwisata terbaik di dunia.

Kerja keras Azwar berhasil menurunkan angka kemiskinan di Banyuwangi hingga ke level 7,5 persen pada 2019. Sementara pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi meningkat dari hanya Rp20,86 juta (2010) menjadi Rp51,1 juta per tahun (2019).

Nah, perjalanan menjadi Bupati Banyuwangi itu membuatnya berpindah partai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Saat maju dalam pilkada 2010, kendaraan politik Abdullah Azwar Anas adalah PKB. Se-

nesia. Hingga pendidikan pasca sarjana di FISIP UI ia selesaikan pada 2005.

Beriringan dengan pendidikan di Jakarta, Anas tercatat sebagai Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama 2000 - 2003. Berlanjut kemudian menjadi Ketua Gerakan Pemuda Ansor periode 2003-2009. Dunia politik pun mulai melekat dengan Anas yang pernah menjadi anggota MPR termuda yang dilantik pada usia 24.

Pasca Reformasi 1998, Anas yang berada di PKB dua kali gagal masuk parlemen melalui Pemilu 1999 dan 2004. Namun, akhirnya ia duduk sebagai anggota DPR melalui pergantian antarwaktu untuk mengisi kursi

anggota Fraksi PKB yang meninggal dunia. Usai menjadi anggota parlemen periode 2004-2009, Anas pindah jalur dengan mengikuti Pilkada hingga menjadi Bupati Banyuwangi dua periode 2010-2021, termasuk berpindah partai dari PKB ke PDIP itu.

Setelah menyelesaikan masa jabatan Bupati Banyuwangi pada 2021, agaknya Presiden Joko Widodo terkesan dengan rekam jejak Anas dalam menerapkan kendali pemerintahan berbasis elektronik (e-Govern-

iden RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Nah, perangkat rentang kendali penting dalam penerapan Inpres 2 Tahun 2022 adalah aplikasi katalog elektronik (e-Katalog) berbasis TIK. Pengembangnya, ya LKPP yang kepala lembaganya adalah Anas. Tar-

dalam negeri (PDN). Inpres tersebut juga menginstruksikan agar sedikitnya Rp400 triliun dari APBN dan APBD 2022 agar dibelanjakan untuk PDN dengan prioritas produk UMKM.

Jadi, e-Katalog (daftar barang dan jasa yang tersusun sistematis dan berada dalam jaringan internet) untuk Pemda ini fungsi pentingnya adalah menjadi aplikasi belanja online untuk produk dan jasa berdasarkan rincian Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk Kementerian dan Lembaga pemerintah pusat, tentu saja rujukannya adalah APBN.

Dalam hal ini, e-Katalog untuk Pemda dan K/L merupakan aplikasi hasil pengembangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Sebagai salah satu aplikasi yang menjadi mata rantai dalam sistem pengadaan pemerintah, e-Katalog ini memiliki sejumlah fasilitas. Antara lain, layanan informasi untuk pengecekan jadwal dan status kontrak bagi penyedia. Penambahan fitur ini didasari atas kebutuhan penyedia akan informasi terbaru seputar status pemrosesan pada tahap prakatalog. Pemanfaatannya dapat menggunakan telepon genggam (smartphone) maupun komputer lebih besar.

Dengan e-Katalog itu pula akan terlihat daftar barang dan jasa yang digunakan. Baik produk impor maupun produk dalam negeri. Maka e-Katalog juga dapat berfungsi sebagai mata rantai yang memudahkan upaya menerapkan program P3DN. Semakin banyak Pemda yang menggunakan e-Katalog, kian mudah pula melihat daftar produk dalam negeri yang dibelanjakan.

Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022, Presiden mengaku senang atas meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang memiliki e-Katalog untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa. Toh Presiden pun menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar terus mengawal



ment) yang sejatinya banyak mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Maka Presiden Jokowi mengangkat Anas menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Januari 2022.

Apa kaitannya kinerja e-Government Anas di Banyuwangi dengan LKPP? Jelas sekali kaitannya karena seiring pengangkatan Anas, terbit Instruksi Pres-

getnya jelas peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Sedangkan katalog itu memiliki pangkalan data yang menghimpun lebih dari satu juta daftar produk dalam negeri

Dalam Inpres yang ditandatangani pada 30 Maret 2022 itu Presiden menginstruksikan agar sedikitnya 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menyerap produk UMKM dan Koperasi hasil produk

secara konsisten kepatuhan kementerian/lembaga, Pemda, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri.

Alhasil, penggunaan e-Katalog lokal di lingkungan Pemda memang mengalami peningkatan pesat sejak Inpres 2 Tahun 2022 itu terbit. Dari semula hanya 46 meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 123 Pemda.

Toh Anas sebagai Ketua LKPP mengakui, penggunaan e-Katalog di lingkungan Pemda itu baru mencapai 22,4 persen dari 425 pemda di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, ia mendorong agar lebih banyak lagi pemerintah daerah yang membentuk e-Katalog Lokal.

akan melakukan jemput bola dengan melakukan konsultasi secara intensif agar Pemda bisa bergerak lebih cepat.

LKPP sendiri telah melakukan sejumlah penyesuaian regulasi untuk mendukung arahan Presiden Jokowi terkait peningkatan produk dalam negeri.

Anas menyebut Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah amanatkan agar kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD) meningkatkan belanja produk dalam negeri, memperbesar porsi belanja untuk usaha kecil, mikro dan koperasi (UMK-Koperasi) serta percepatan belanja APBN/APBD melalui Katalog Elektronik

erja Anas tampak tetap mengesankan. Aplikasi e-Katalog dari lembaganya terbukti memiliki multifungsi dengan pangkalan data yang menghimpun lebih dari satu juta item produk dalam negeri. Tinggal penerapannya oleh aparat (K/L/PD) sebagaimana ia kemukakan agar optimal pemanfaatannya.

Optimalisasi itu tentu saja berada di wilayah kewenangan PAN RB. Maka, mudah dipahami mengapa kemudian Presiden Joko Widodo memilih Anas menjadi MenPAN RB menggantikan Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia pada 1 Juli 2022. Meskipun Anas belum setahun menjadi Kepala LKPP.

"Saya kira beliau ngga usah di-anu-



"Katalog Lokal akan menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi daerah karena di situlah UMK dan pelaku usaha lokal bisa mudah dalam mengakses belanja pemerintah," ungkapnya. Menurut Anas, kunci pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan pemerataan ekonomi ke daerah-daerah.

Ia menjelaskan, Katalog Lokal akan jadi etalase bagi UMK-Koperasi untuk dapat memajang produk terbaik mereka sehingga bisa dibeli pemerintah daerah setempat. Untuk mengakselerasi pembuatan e-Katalog Lokal, LKPP

(e-Katalog). "Dari kebijakan Presiden tersebut, diamanatkan bahwa 40 persen belanja dialokasikan untuk UMK-Koperasi," tandas suami Ipuk Fiestiani-dani itu.

Lebih jauh, ia mengemukakan, terdapat empat poin perubahan kebijakan belanja pemerintah atas arahan Presiden Jokowi, yaitu proUKM Koperasi, propemerataan ekonomi, terintegrasi dan terdigitalisasi, serta mudah diakses dunia usaha. Khusus untuk daerah, ia juga mengingatkan untuk aktif mengecek e-Katalog lokal.

Tak sampai setahun di LKPP, kin-

lah. Saya kira enggak usah diberi pesan-pesan. Sudah ngerti apa yang harus dilakukan. Bukan ngerti, tapi sangat ngerti," ungkap Presiden Jokowi usai melantik Anas sebagai Men PAN RB pada Rabu, 7 September 2022.

Tentu saja mengerti seperti ungkapan Jokowi itu adalah hasil proses Anas meniti jenjang yang panjang. Seiring pula dengan kompetensi dan kemampuannya menyesuaikan diri dengan perubahan di era Revolusi Industri 4.0. Abdullah Azwar Anas memang bukan figur karbitan, apalagi instan. •



Wawancara Eksklusif Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi CUMA DI POJOKAN DAN JADI BEBAN RAKYAT? LEBIH BAIK TIDAK LOLOS PARLEMEN!

Di belakang meja kerjanya tergelar matras tidur tipis yang sederhana. Pernah berminggu-minggu Ridho Rahmadi tidak pulang ke rumahnya di Yogyakarta. Menginap di Kantor DPP Partai Ummat menjadi kebiasaan.

Maklum saja, tanggung jawabnya selaku ketua umum sangat besar. Di tahap pertama, memastikan partai yang baru dideklarasikan pada April tahun lalu itu lolos verifikasi administrasi dan faktual yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sebelum tanggal 12 Agustus (Partai Ummat mendaftar ke KPU sebagai calon peserta Pemilu 2024), kantor ini setiap hari 24 jam nonstop dipenuhi anak-anak muda yang bekerja menginput data," kata Edo, sapaan akrabnya, ketika Koran Info Indonesia berkunjung ke Kantor DPP Partai Ummat di kawasan Tebet Timur, Jakarta Selatan, Sabtu (27/8/2022).

Verifikasi sukses, pekerjaan besar selanjutnya adalah mengantarkan Partai Ummat lolos masuk parlemen. Target Partai Ummat tidak main-main. Bahkan banyak yang menganggap tidak realistis: masuk tiga besar pemenang Pemilu Legislatif 2024.

Dunia politik bukan habitat asli dari pria kelahiran 1985 ini. Gelar master yang ia genggam adalah artificial intelligence (kecerdasan buatan), sedangkan gelar doktornya di bidang data science. Semua pencapaian akademis itu diraihinya di Benua Eropa.

Ayah mertua Edo, Amien Rais, berperan besar menjerumuskannya ke dunia politik. Tokoh Gerakan Reformasi 98 yang rajin mengkritik kekuasaan itu menjabat Ketua Majelis Syuro sekaligus 'simbol' utama partai berbasis Islam tersebut.

"Saya banyak belajar dari Bapak. Beliau (Amien Rais) sebenarnya orang yang sangat soft. Tapi ketika ada kezaliman, dia berbicara apa adanya dan itu pun sudah yang paling soft," katanya.

Awalnya hanya berniat membantu membangun sistem IT partai, Edo malah mendapat mandat menjadi ketua umum. Itu pun dadakan, tanpa ia sangka-sangka, datangnya dari forum para pendiri partai. Jadilah ia salah satu ketua umum termuda dalam jajaran elite partai politik kekinian.

Berikut kutipan wawancara Pemimpin Redaksi **Info Indonesia**, Aldi Gultom, dengan Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi.

Apa pembeda Partai Ummat dengan partai-partai lain, terutama partai berbasis Islam yang ada sekarang?

Betul, kami memang partai berasaskan Islam Rahmatan Lil'alam. Artinya, berdasar Islam, tapi output-nya untuk Rahmatan Lil'alam untuk semua. Tidak hanya umat Islam tapi untuk semuanya. Bahkan, tidak hanya manusia, tapi alam juga sebagainya. Kemudian kita berangkat dengan semangat "al amru bi al adli wa an nahyu 'an al dzulmi." Jadi kalau kita berangkat dari semangat Amar Makruf Nahi Mungkar ya, kita ajak kepada kebaikan, kemudian kita cegah kemungkaran itu relevan dengan pribadi dan kehidupan kita di masyarakat.

Yang Anda sampaikan itu sepertinya sudah umum dibicarakan pihak lain..

Ya memang, pasti butuh waktu untuk melihat yang membedakan Partai Umat dengan partai lain. Kami adalah gabungan dari orang-orang yang baru di dunia politik dengan segala macam idealismenya, termasuk saya. Saya sendiri sampai sekarang masih kurang pas mengaku politisi.

Kita perlu narasi baru yang keluar

dari titik jenuh politik nasional. Referensi yang kita lihat di media dan media sosial membuat kita jenuh. Misalnya, menjelang Pilpres langsung sebut nama, tidak ada diskusi dengan pemikiran terbuka, tidak ada diskusi kriteria, langsung nama.

Masalah aktual apa yang jadi fokus Partai Ummat?

Kita berbicara tentang ekonomi suatu negara. Kita bicara 90 persen penduduk Indonesia yang di atas 15 tahun, yang jumlahnya 126,5 juta itu 90 persen-nya tidak kuliah karena alasan ekonomi, dan soal ekonomi digital Indonesia khususnya platform belanja online yang nilainya Rp400 triliun tapi hanya 10 persen produk UMKM atau lokal. Kita berbicara tentang keadilan dan kezaliman. Kami ingin tegakkan keadilan lawan kezaliman. Berangkat dari semangat tersebut untuk menegakkan keadilan multidimensional lewat jalur konstitusional.

Jadi model ekonomi seperti ini adalah model ekonomi komprador. Indonesia yang luas ini, yang potensinya besar itu cuma dijadikan alas saja. Apa yang tersisa untuk ekonomi Indonesia? Hampir tidak ada.

Lalu, apa yang Partai Ummat tawarkan?

Kami bermimpi untuk menginisiasi marketplace digital, secara teknis mungkin sama, bahkan kalau bayangan saya dari segi IT tidak perlu aplikasi super. Tapi yang didorong di sana adalah UMKM lokal. Kita balik, kalau di platform lain 90 persen-nya produk asing, di tempat kita 90 persen produk dalam negeri. Dan ingat dari lima rakasa belanja online yang ada seka-

rang, tiga di antaranya milik asing sejak lahir sampai sekarang dan dua sisanya mayoritas pemilik sahamnya asing. Hampir-hampir benar-benar tidak ada yang murni. Jadi kita buat marketplace digital untuk umat, untuk rakyat.

Ide-ide tadi terdengar sangat identik dengan anak muda. Apakah segmen itu yang jadi sasaran?

Salah satu fokus kami, selain merawat segmen loyalis Amien Rais, kami ingin menanam pohon baru di lahan

kemarin sudah dua kali zoom meeting berkaitan dengan verifikasi. Dalam mekanisme sekarang, segala macam perubahan dan perbaikan lewat Sipol, so far so good, kami di pusat dan semua daerah sering berkomunikasi.

Partai Ummat punya target politik yang cukup tinggi yaitu masuk tiga besar pemenang Pemilu Legislatif 2024. Serius?

Sangat serius. Kalau kita masuk parlemen tentu harus lewat Parliamen-

tidak (lolos parlemen).

Proyeksi tiga besar itu karena kami ingin menjadi satu kelompok yang menjadi inisiator. Umpamanya, Undang-Undang ini harus kita revisi, yang akrobatik, pasal karet harus kita revisi. Kita tidak tahu masa depan, tapi hari ini kita usahakan yang terbaik. Kalau hanya antara ada dan tiada, buat apa kita berjuang?

Partai Ummat mencitrakan dirinya sebagai oposisi pemerintah?

Pemerintah kan subjek. Pertama, kami fokusnya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Kezaliman-kezaliman ekonomi, kezaliman pendidikan, kezaliman kesehatan, kezaliman agraria. Kan satu persen orang kaya Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. Itu yang tercatat loh. Ini contoh-contoh kezaliman.

Nah, pemerintah sekarang adalah subjeknya, dalam beberapa hal menjadi dirigen, mengorkestrasi hal-hal yang kita anggap zalim. Tapi sebenarnya yang kita lawan adalah objek atau kezalimannya, siapa di baliknya, tentu kami ingin mengubahnya.

Sejauh mana pemikiran Amien Rais memengaruhi visi-misi dan kerja-kerja politik Partai Ummat?

Pak Amien Rais itu kan simbol utama Partai Ummat, simbol alasan berdirinya Partai Ummat. Yang disampaikan beliau itu pemikiran-pemikiran dasar dari Partai Ummat yang kemudian dikembangkan. Tentu kita punya visi-misi besar, yang sifatnya kebangsaan juga, kalau kita berbicara dalam konteks demokrasi.

Pemikiran beliau masih relevan dengan aspirasi anak-anak muda yang menjadi incaran Partai Ummat?

Coba kita hubungkan dengan gerakan Reformasi 98. Saya melihat ada upaya sistematis untuk menghilangkan atau memutus sejarah yang benar tentang reformasi. Itu sebenarnya bisa kita hidupkan lagi. Ayo, kita gulirkan Reformasi Jilid 2, atau bahkan Sumpah Pemuda Jilid 2, untuk membuat sentimen positif bagi perjuangan anak-anak muda. ●



suburnya anak muda. Contoh konkretnya adalah pada program yang akan kami luncurkan dalam waktu dekat setelah urusan verifikasi faktual selesai.

Bagaimana semangat kader-kader dan pengurus Partai Ummat di daerah-daerah terkait verifikasi?

So far so good. Jadi KPUD sudah sangat aktif menghubungi DPD, kemudian kami berkoordinasi. Kemarin-

tary Threshold yang 4 persen yang dikonversikan sekitar 6-7 juta suara. Kalau kita masuk, ya tentu bersyukur. Tapi masuk parlemen dengan pasukan yang cuma di pojokan jumlahnya sedikit, mau apa? Cuma mengikuti, kemudian menyetujui semua dan cuma jadi beban rakyat. Kita perlu bermimpi besar, tentu perlu target besar diiringi dengan rencana-rencana kerja yang realistis. Sudah masuk ke sana (parlemen), tapi tidak aspiratif, ya mending

Wawancara Eksklusif Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Agus Jabo Priyono.

PEMILU 2024: THE LAST BATTLE

Rumah dua lantai di bilangan Rawasari, Jakarta Pusat, itu terlihat lengang. Di pekarangan berdiri plang bertulis Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (DPP PRIMA).

Saat Info Indonesia berkunjung, hanya ada beberapa anggota partai yang berjaga. Salah satunya Alif Kamal, yang menjabat wakil ketua umum.

"Ketum (ketua umum) masih di jalan," ucap Alif. Sosok ketua umum yang dimaksud adalah Agus Jabo Priyono.

Agus Jabo dan Alif Kamal, dua nama yang tidak asing di telinga para pentolan gerakan reformasi 1998.

Jauh sebelum mendirikan PRIMA, keduanya bergerilya politik di Partai Rakyat Demokratik (PRD). Agus Jabo pernah menjabat ketua umum partai terlarang di masa Orde Baru itu.

"Kawan-kawan sedang sibuk melengkapi syarat administrasi, mereka menyebar di beberapa titik. Pekerjaan berat, kami terus berkoordinasi soal kendala-kendala di Sipol (sistem informasi partai politik)," ungkap Alif.

Jaringan kuat para eks aktivis PRD di daerah-daerah menjadi salah satu fondasi berdirinya PRIMA. Mereka bergandengan dengan serikat buruh, pelaku UMKM, kaum profesional, hingga kelompok muda atau pemilih pemula.

Buah kerja keras para kader cukup menggembirakan. PRIMA sejauh ini menjadi satu dari 24 parpol calon peserta Pemilu 2024 yang dinyatakan lolos ke tahap verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"PRIMA ini kami dirikan untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Proklamasi. Ada dua hal. Pertama, menjadikan Indonesia berdikari. Kedua, menjadikan Indonesia yang adil makmur," ucap Agus Jabo yang baru tiba di ruang kerjanya.

Berikut kutipan wawancara khusus Pemimpin Redaksi **Info Indonesia**, Aldi Gultom, dengan Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono.

Bagaimana cerita singkat PRIMA berdiri dan siapa saja yang menjadi pelopornya?

PRIMA dideklarasikan pada 1 Juni 2021. Sebenarnya motornya itu adalah para aktivis yang selama ini berjuang mendampingi masyarakat, baik itu petani, buruh, kaum miskin di daerah-daerah. Harus diakui yang menjadi pelopor memang teman-teman (aktivis) 98.

Mayoritas mereka adalah mantan anggota PRD?

Lebih tepatnya adalah mereka yang tidak mau Terafiliasi atau bergabung dengan partai politik yang ada. PRD hanya salah satu unsur di dalam PRIMA. saya sendiri dulu ketua umum PRD. Mereka sama-sama memiliki kegelisahan terhadap kondisi bangsa negara.

Tidak ada tokoh-tokoh politik besar atau pengusaha besar di balikny?

PRIMA adalah partai rakyat biasa yang dimotori para aktivis, yang mewadahi semua unsur ke-Indonesiaan. Perekrutan kami salah satunya melalui aplikasi dan sudah ribuan orang mendaftar lewat situ. Kami ada data-nya.

Anda bilang PRIMA ingin mewujudkan cita-cita Proklamasi. Sejauh ini kita belum mengarah ke sana?

Pertama soal negara berdikari. Berdikari dalam pemahaman kami itu berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan punya kepribadian. Nyatanya, Indonesia saat ini mengalami kerusakan besar, yaitu kerusakan kultural dan kerusakan struktural.

Karena kultur kita yang menjadikan struktur kita rusak, kita jadi kehilangan

kedaulatan, kehilangan kemandirian, kehilangan kepribadian. Itulah latar belakang PRIMA didirikan.

Bagaimana dengan cita-cita Indonesia adil dan makmur?

Kita juga kehilangan itu, padahal para pendiri bangsa menyatakan Indonesia kita dirikan agar berdikari dan adil makmur. Sampai sekarang kedua cita-cita itu tidak terwujud.

Siapa yang paling bertanggung jawab?

Karena sistem politik kita adalah sistem yang didukung partai politik, maka yang paling bertanggung jawab adalah partai politik. Mereka yang membangun sistem ini, lewat regulasi-regulasi yang dihasilkan undang-undang yang diputuskan parlemen.

Partai-partai politik tidak mampu mewujudkan apa yang menjadi semangat kemerdekaan, cita-cita proklamasi. Kalau diteruskan, Indonesia ke depan akan sangat berbahaya. Baik itu menyangkut eksistensi negara maupun menyangkut persoalan kemanusiaan.

Kalau kita terus ada di luar sistem maka kita tidak bisa memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan-persoalan kebangsaan.

Sebagian rakyat sudah antipati terhadap parpol, Anda malah bikin partai baru..

Kita sangat sadar banyak orang tidak mau membuat partai politik. Membutuhkan dana yang sangat besar terutama sumber daya uang.

Kami ingin menggugurkan tesis itu. Untuk membangun satu partai politik sebagai pilar kenegaraan itu tidak harus tergantung uang. Membangun partai tidak harus berduit banyak dan

kami sudah membuktikan itu. Kami coba mereorganisasi jaringan sebelumnya dengan cara gotong royong untuk melengkapi syarat-syarat kepartaian sesuai undang-undang, ternyata dari proses kemarin di Sipol kita bisa.

Jadi, PRIMA juga ingin membantah anggapan butuh banyak uang untuk berpartai?

Tesis membangun partai membutuhkan duit banyak itu hanya buatan oligarki supaya partisipasi politik masyarakat untuk ikut proses politik, dalam pengambilan keputusan, itu orang takut.

Kami sudah membuktikan bahwa dengan bergotong royong dan usaha yang keras kita mampu membangun partai politik, walau hanya bermodalkan kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Indikatornya jelas, KPU kemudian secara formal

mengakui bahwa syarat-syarat Sipol kami diterima. Tidak harus menggunakan uang banyak.

Saat ini apa perkembangan terakhir dari verifikasi administrasi?

Kalau Sipol kan sudah selesai, kemudian KPU sedang melakukan verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi itu kan sebetulnya mengkonfirmasi ke partai-partai politik apakah data di sipol yang sudah diserahkan kepada KPU itu benar atau tidak. Kalau dalam unsur kepartaian itu mereka punya kantor ada pengurusnya dan 30 persen itu harus perempuan, apakah sudah memenuhi syarat-syarat dan segala macamnya. Kami sedang dalam proses itu.

Dalam laporan-laporan yang disampaikan tim IT yang terlibat proses verifikasi dan LO, untuk sementara Insya Allah PRIMA aman. Kami sangat siap untuk masuk ke verifikasi faktual.

Partai orang-orang biasa, tapi punya keberanian luar biasa. Punya target luar biasa di Pemilu 2024?

Bagi kami politik elektoral 2024 ini adalah the last battle. Bagi aktivis 98, ini pertempuran terakhir, momentum

yang sangat krusial untuk berjuang dalam arena elektoral. Tidak hanya berjuang, tidak hanya ikut, tapi harus menang.

Menang berarti lolos masuk DPR RI?

Menang itu

artinya melampaui parliamentary threshold 4 persen. Kita orang yang tahu diri, realistis bahwa kesadaran masyarakat itu belum sepenuhnya rasional. Feodalisme dalam politik masih kuat.

Di sisi lain, dari berbagai macam hasil survei, rata-rata menyatakan bahwa masyarakat yang terafiliasi ke dalam parpol itu hanya sekitar 14 persen. Sisanya 86 persen itulah harapan kita, yaitu mereka yang belum terafiliasi ke parpol.

Saya menyampaikan ke teman-teman bahwa kita harus melampaui 4 persen sebagai syarat lolos parlemen, itu saja dulu. Kalau kita memang punya keinginan untuk mewujudkan Indonesia berdikari adil dan makmur, Pemilu 2024 momentum bagi kekuatan perubahan. Kita berjuang di dalam sistem, di parlemen, di dalam rangka memengaruhi proses penyusunan dan pembuatan regulasi.

Ada strategi khusus untuk mencapai itu?

Kami sudah petakan daerah mana saja yang nanti menjadi prioritas, sudah memetakan kekuatan kita di mana, sudah menghitung bagaimana potensi sumber daya yang kami siapkan untuk memenangkan itu.

Dalam konteks bursa pencalonan Pilpres 2024, bagaimana sikap PRIMA?

Sekarang tokoh-tokoh yang muncul di survei-survei itu kan hanya dilihat publik dari media sosial seperti Instagram atau TikTok, mereka hanya menonjolkan sisi personal tanpa menunjukkan gagasan apa yang mau ditawarkan. Sedangkan PRIMA selalu mengukur kualitas dari calon-calon pemimpin itu dari gagasannya.

PRIMA belum punya kandidat untuk didukung?

Menurut kami, mestinya orang-orang yang menjadi capres adalah ketua umum partai. Logikanya kan begitu, siapa yang ingin menjadi presiden harus berpartai di Indonesia. Kalau tidak berpartai enggak bisa. Nah, ketua umum menjadi representasi dari ide-ide partainya. ●



Wawancara Eksklusif Presiden Partai Buruh, Said Iqbal PERJUANGKAN WELFARE STATE BERTUMPU PANCASILA

“Ini partai enggak asal-asalan dibikin. Asalkan enggak dikerjain, asalkan enggak ada operasi intelijen, pasti lolos.”

Demikian Said Iqbal membuka wawancara eksklusif yang berlangsung di ruang tamu kediaman pribadinya, beberapa waktu lalu.

Partai yang dimaksud tentu saja Partai Buruh. Yang jabatan presidennya sudah ia genggam sejak kongres bulan Oktober 2021.

Pernyataan itu sudah pasti memancing penasaran. Memang ada indikasi operasi intelijen itu?

“Saya sudah menghadap sama bapak-bapak jenderal, kata mereka ‘enggak, enggak ada’. Kita ngomong perlu terbuka. Yang namanya operasi kan enggak ada indikasinya,” ucapnya.

Dia bahkan sampai menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan keinginannya membangkitkan Partai Buruh.

“Saya sampai minta kepada Bung Andi Gani (pemimpin kelompok buruh, Andi Gani Nena Wea) diajak ketemu bapak presiden dan saya ngomong terbuka, ‘Pak Presiden minta izin’, istilah orang Jawa kulonuwun-lah mau menghidupkan kembali Partai Buruh,” ungkapnya.

Said Iqbal bukan orang biasa di dunia pergerakan buruh nasional, bahkan pengalamannya mendunia. Selama tiga periode ia menjadi salah satu petinggi Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) yang berpusat di Jenewa, Swiss.

“Kantor saya di Jenewa, dalam setahun bisa enam kali bolak-balik ke sana untuk bersidang, saya mewakili Asia Pasifik. Tidak banyak orang tahu, tapi dengan adanya Partai Buruh saya perlu menyampaikan ini. Artinya, partai ini punya jaringan internasional,” ungkapnya.

Partai Buruh juga bukan pemain baru dalam riwayat kepemiluan pasca-Orde

Baru. Dedengkotnya ialah mendiang Muchtar Pakpahan, tokoh legendaris pergerakan buruh nasional. Sayang perolehan suaranya selalu di bawah satu persen.

Said menganggap Muchtar sebagai guru politiknya. Namun, selama Muchtar masih hidup, ia terus menolak ajakan mendiang untuk bergabung ke Partai Buruh.

Sampai akhirnya, momentum perlawanan terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law) memprovokasi kesadaran Said bersama para pentolan buruh dari berbagai organisasi lainnya untuk membangkitkan kembali Partai Buruh.

“Dalam perlawanan terhadap Omnibus Law, secara politik kami merasa kalah. Kelas pekerja harus punya partai yang mewakili mereka. Selama ini tidak ada partai di parlemen yang secara khusus mewakili kelas pekerja,” ucap Said.

Berikut wawancara eksklusif Pemimpin Redaksi Info Indonesia, Aldi Gul-tom, dengan Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal.

Bagaimana kesiapan Partai Buruh di seluruh daerah?

Sekarang kepengurusan Partai Buruh itu sudah ada di 34 provinsi, berarti sudah ada di 100 persen ya. Kemudian, sudah ada di 440 kabupaten dan kota. Total kabupaten kota se-Indonesia itu 514. Nah, kami sudah ada di 440, berarti 86 persen, di atas syarat 75 persen. Kepengurusan di tingkat kecamatan juga sudah ada di atas syarat 50 persen.

Dengan melihat sebaran infrastruktur, rasanya kami pasti lolos verifikasi administrasi dan faktual karena ada di 100 persen provinsi, 86 persen kabupaten-kota, 65 persen kecamatan, dan sudah punya kader terdaftar 315 ribu orang.

Apa sebetulnya yang menjadi kegelisahan Anda dan kawan-kawan sehingga merasa harus menghidupkan lagi Partai Buruh?

Jujur saja, yang melatarbelakangi Partai Buruh dihidupkan kembali itu lolosnya Omnibus Law. Secara politik, kami merasa aspirasi tidak tersampaikan. Secara politik kami mengalami kekalahan terbesar.

Kalau Norwegia bikin partai sosial demokrat karena urusan minyak bumi, di beberapa negara Amerika Latin karena persoalan jaminan sosial dan upah. Kalau di Indonesia, penyebabnya (Partai Buruh bangkit) adalah Omnibus Law. Bayangkan, masak bisa outsourcing seumur hidup? Enggak ada itu di seluruh dunia. Amerika Serikat yang paling liberal dan kapitalis saja enggak ada outsourcing seumur hidup.

Apa kritik utama terhadap Omnibus Law?

Maaf ya, ini kelompok ‘modal hitam’ terlalu serakah, mereka pakai Omnibus Law. Enggak mungkin undang-undang investasi disandingkan dalam satu wadah dengan yang namanya undang-undang ketenagakerjaan, enggak mungkin.

Kalau ketenagakerjaan itu kan isinya perlindungan, kesejahteraan. Kalau investasi itu tentang efisiensi, penurunan biaya, ketepatan waktu, bagaimana mau dicampur? Maaf, saya tidak anti investasi. Banyak kelompok pengusaha yang baik, tapi ada banyak juga yang serakah.

Apa isu utama yang diusung Partai Buruh?

Kalau partai ini menang, kita ngomongin jaminan sosial saja. Isu lain sudah ada partai lain yang bicara. Sekarang

yang ngomongin jaminan sosial siapa?

Soal BPJS Kesehatan dan Jaminan Hari Tua kita sudah menang, selanjutnya apa? Ada lima lagi yang kami mau bikin. Jaminan makan, jaminan pengangguran, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, dan jaminan air bersih.

Kalau Omnibus Law menyerahkan urusan kesejahteraan rakyat kepada swasta, itu tidak bisa. Partai Buruh ingin peran negara menyejahterakan rakyatnya lebih luas.

Apa penjabaran dari konsep welfare state (negara kesejahteraan) yang dijadikan asas oleh Partai Buruh?

Welfare state yang bertumpu pada Pancasila. Terutama sila kedua dan kelima. Welfare state menurut kami itu harus memenuhi tiga prinsip, yaitu kesetaraan kesempatan, redistribusi kekayaan, dan tanggung jawab publik.

Bahasa anak mudanya, 'lu boleh kaya, tapi jangan miskinin gue dong, lu pengusaha yang hebat, lu mau jalan-jalan, tapi lu jangan miskinin gue dong, jangan bikin upah gue murah, lu harus berbagi dong. Kalau lu mau kaya sendiri ya gue lawan', itu bahasa anak mudanya.

Contoh kebijakan konkret apa yang akan ditawarkan jika nanti masuk parlemen?

Saya kasih contoh soal jaminan makan yang jadi gagasan kami. Kasih setiap orang miskin Rp500 ribu per bulan. Kasih mereka makanan dalam bentuk jaminan sosial, cash money, transfer ke ATM, tapi enggak boleh diuangkan kayak KIP (Kartu Indonesia Pintar).

Setiap bulan negara transfer Rp500 ribu ke orang miskin yang jumlahnya, katakanlah, 30 juta sekarang ini. Berarti, 30 juta dikali Rp500 ribu, cuma Rp15 triliun sebulan. Dikali 12 bulan, cuma Rp180 triliun setahun. Itu uang kecil sekali. Ambil saja deh dari cukai rokok, enggak usah pakai APBN. Cukai rokok Rp130 triliun. Apa yang salah dari kebijakan kasih makan orang miskin?

Benar, kalau Allah izinkan Partai Buruh masuk parlemen, itu yang saya bikin pertama. Saya perintahkan fraksi Buruh kasih makan orang miskin dari dana Rp180 triliun. Itu kecil, kalau enggak mau dari cukai rokok, ambil dari pajak nikel

dan batu bara.

Rakyat senang? Pasti senang, enggak usah BLT-BLT karena BBM naik. Kasih rakyat miskin jaminan makan seumur hidup!

Lalu, setelah jaminan makan ada jaminan pengangguran. Ada yang bilang masak pengangguran dibayar? Jadi begini yang dimaksud pengangguran adalah orangnya kerja lalu dipecat, apa

anggaran yang tepat. Mungkin di tahun pertama tidak bisa semua, tapi bertahap, yang penting itu semua akan bisa terlaksana dalam lima tahun.

Ada prediksi perolehan suara Partai Buruh pada Pemilu 2024?

Teman-teman wartawan internasional dan nasional selalu mempertanyakan dua. Satu, apa bedanya Partai Buruh



karena dia ada kesalahan, apa dia memang mau istirahat sambil dia mencari pekerjaan baru, itu yang disebut pengangguran, itulah yang dibayar negara. Logikanya apa? Waktu dia kerja, dia bayar pajak. Waktu dia kehilangan pekerjaan dengan alasan apapun, negara bayar dia, itu yang disebut unemployment insurance. Iurannya dari pemerintah dan dari buruhnya sendiri.

Kemudian, akan ada jaminan pendidikan, perumahan, jaminan air bersih, itu semua bisa kita capai dengan politik

lama dengan yang baru. Toh, Anda selalu partai, yang istilah mereka adalah partai nol koma. Saya katakan, ada perbedaan yang mendasar antara Partai Buruh yang didirikan oleh almarhum Bang Muchtar dengan yang sekarang.

Partai Buruh yang sekarang ini mempersatukan kelas. Ada buruh, petani, nelayan, aktivis perempuan, masyarakat adat, aktivis HAM, disabilitas, buruh migran, guru, kaum miskin kota. Prioritas kami masuk dulu parlemen, lewati parliamentary threshold 4 persen. •



GAWAT, INFLASI MAKIN MENINGKAT

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan dampak yang luar biasa bagi kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Dampak nyata yang terasa yakni meningkatnya inflasi begitu cepat. Melihat situasi ini, Presiden Joko Widodo memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi di lapangan.

Kegundahan Presiden Jokowi ini kembali disampaikannya saat memberikan pengantar pada rapat pengendalian inflasi bersama para kepala daerah di Istana Negara, 12 September 2022.

Sebelumnya, Joko Widodo pada pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022 juga meminta masing-masing kepala daerah dengan inflasi tertinggi memperhatikan daerah-

ahnya dengan sungguh-sungguh dan diminta segera menekan hingga ke level 5 persen.

Presiden menyebut lima provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi adalah Jambi 8,55 persen, Sumatera Barat 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen dan Aceh 6,97 persen.

"Tolong ini dilihat secara detil yang menyebabkan ini apa agar kita bisa selesaikan bersama dan bisa turun lagi di

bawah 5 persen, syukur bisa di bawah 3 persen," jelasnya.

Dia memerintahkan agar kepala daerah tingkat kota hingga provinsi dapat mencermati penyebab inflasi yang saat ini menjadi momok di semua negara di tengah krisis pangan.

Namun dalam perkembangannya, jumlah daerah yang mengalami peningkatan inflasi bukan hanya lima, tapi bertambah menjadi 10 daerah kabupaten/kota dan 10 provinsi.

Presiden Jokowi mengungkapkan data 10 kabupaten/kota dengan besaran inflasi tinggi. Presiden lantas meminta agar kondisi tersebut dicermati dan meminta pemerintah daerah setempat segera melakukan intervensi di lapangan.

"Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan," ujar Jokowi saat rapat pengendalian inflasi bersama para kepala daerah di Istana Negara, Senin, 12 September 2022.

Sepuluh kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi, yakni Luwuk (7,8 persen), Jambi (7,8 persen), Kotabaru (7,5 persen), Sampit (7,5 persen), Tanjung Selor (7,4 persen), Jayapura (7,4 persen), Sintang (7,4 persen), Bungo (7,2 persen), Padang (7,1 persen), dan Sibolga (6,9 persen).

Jokowi juga mengungkapkan data sepuluh provinsi dengan angka inflasi yang tinggi. "Dan juga 5 provinsi dari 10 provinsi hati-hati. Saya juga enggak tahu ini kenapa. Tolong dilihat betul ini, di Sumatera 5 provinsi itu," kata Jokowi.

Jokowi juga kembali mengingatkan dan memberikan penekanan bahwa lima provinsi dengan angka inflasi tinggi berada di Pulau Sumatera. Kenaikan inflasi tersebut berasal dari harga pangan.

"Supaya kita juga tahu bahwa akibat inflasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan harga pangan ini hati-hati. Kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan itu 74 persen. Begitu harga pangan naik, artinya di sebuah daerah kemiskinan juga akan terkerek naik," tegas Presiden.

Apalagi harga beras sebagai komponen utama yang dapat meningkatkan inflasi. "Jadi hati-hati, kalau harga beras di daerah bapak ibu sekalian itu naik meski hanya Rp200 atau Rp500 perak itu segera diintervensi, karena itu menyangkut kemiskinan di kabupaten, di kota yang bapak ibu pimpin itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya," tambah Presiden.

Untuk itu, Presiden meminta agar kepala daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota harus tahu rantai pasokan pangannya.

"Pasokan berasnya dari mana, kalau

harus membeli dari luar provinsi, kabupaten atau kota. Telur dipasok dari kabupaten atau kota mana, bawang merah dibeli dari kota atau kabupaten mana? Semua ini harus ada datanya dan kalau masih ada yang belum tahu mengenai ini agar minta informasi ke Menteri Perdagangan atau Badan Pangan Nasional, informasi ada di situ," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan untuk mengatasi inflasi.

"Posisi per hari ini, 2 persen dana

han ekonomi sebuah daerah itu sangat besar," tegas Presiden.

Jokowi melanjutkan, apabila kondisi inflasi di daerah ini tidak segera diintervensi, maka angka kemiskinan akan mulai naik. Ada cara khusus yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu menekan laju inflasi, yakni memanfaatkan dua persen dana transfer umum.

"Ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyesuaikan akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu



transfer umum itu kira-kira masih Rp2,17 triliun, kemudian belanja tidak terduga Rp16,4 triliun, baru digunakan Rp6,5 triliun. Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota," tambah Presiden.

Presiden menegaskan agar realisasi APBD terus dikejar per September 2022 karena realisasinya masih 47 persen.

"Masih kecil sekali. Saya minta sekali lagi kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota agar waktu yang tinggal Oktober, November, dan Desember ini betul-betul anggaran yang ada segera bisa direalisasikan. Karena kita tahu kontribusi APBD terhadap pertumbu-

dengan mensubsidi mereka. Ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa dibantu dari subsidi ini," kata Jokowi.

"Juga UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM, transportasi umum juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa saja dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi," sambungnya.

Selain itu, Kepala Negara juga menyarankan agar pemerintah daerah memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga untuk memberikan subsidi biaya transportasi pengangkutan barang. Misalnya, untuk mengangkut bawang merah, telur, atau bawang putih dari daerah tertentu.

"Artinya, misalnya harga bawang merah naik, bawang merah banyak berasal dari Brebes. Misalnya ini provinsinya Lampung, Brebes-Lampung berapa biaya transportasinya? Rp3 juta. Ini yang ditutup Rp3 juta oleh pemerintah daerah, sehingga harga yang terjadi harga petani di Brebes dan harga jual sama," kata Jokowi.

Hadiah Untuk Daerah Pengendali Inflasi

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengendalikan laju inflasi ini.

Umum (DTU) dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk penanggulangan dampak inflasi karena kenaikan harga BBM.

"Kita menggunakan Dana Insentif Daerah (DID), di mana kita gunakan insentif untuk daerah yang bisa menangani inflasinya. Nanti kita akan gunakan data BPS dan kemampuan untuk menstabilkan harga. Dari seluruh daerah kan BPS tiap bulan mengeluarkan inflasi di daerah masing-masing. Nanti kita beri insentif yang bisa mengendalikan dan untuk pemda yang inflasinya lebih

di mana peranan gubernur, wali kota, bupati menjadi sangat penting. Mendeteksi secara dini kemungkinan pergerakan harga-harga terutama pangan, angkutan dan lainnya menggunakan instrumen APBN dan APBD," tambah Sri Mulyani.

Untuk meredam potensi kenaikan inflasi, lanjutnya, dapat digunakan DAU dan DBH sebesar 2 persen, misalnya membantu ongkos transportasi untuk meredam kenaikan harga BBM atau intervensi dari suplai barang itu sendiri.

"Makanya kita akan kontinu terus, dil-



Salah satunya pemberian insentif senilai Rp10 miliar bagi pemerintah daerah yang dapat mengendalikan inflasi.

"Kami akan melihat kemungkinan memberikan sekitar Rp10 miliar bagi masing-masing daerah yang mampu menurunkan (inflasi), top 10 paling rendah, top 10 di provinsi, kabupaten, dan kota," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 13 September 2022.

Seperti diketahui Presiden Jokowi memerintahkan para kepala daerah menggunakan APBD untuk menahan laju inflasi akibat penyesuaian harga BBM. Caranya adalah dengan menggunakan 2 persen dari Dana Transfer

rendah dari level nasional," ungkap Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan sendiri sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi 2022, yang mewajibkan pemda untuk menyalurkan 2 persen dari DTU untuk bantuan sosial. Adapun bantuan sosial tersebut diarahkan kepada ojek, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), nelayan dan untuk penciptaan lapangan kerja, serta pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

"Seperti kemarin Pak Presiden sampaikan mengenai masalah pengendalian inflasi, terutama di daerah-daerah

ihat dalam minggu-minggu ke depan, pemda kesigapannya menggunakan APBD-nya, juga kemarin sudah disampaikan Pak Presiden, Mendagri mengenai penggunaan dana tidak terduga. Itu masih ada Rp9,5 triliun, kalau DTU, DAU, dan DBH itu sekitar Rp2,7 triliun," ungkap Sri Mulyani.

Menkeu berharap ada seluruh pemda bisa menggunakan APBD secara cepat, tepat dan akuntabel untuk bisa mengatasi potensi kenaikan harga di daerah.

"Bahkan bisa digunakan untuk ban-sos. Jadi itu semua tujuannya keputusan yang dilakukan kemarin bisa berdampak dan dampak negatifnya bisa diminimalkan melalui langkah-langkah di pemda," tambah Sri Mulyani. ●

TURUNKAN INFLASI DI BAWAH 5 PERSEN

Meski terjadi lonjakan yang cukup tajam, pemerintah tetap berkeyakinan inflasi 2022 bisa terkendali di bawah lima persen, meskipun ada kenaikan harga BBM subsidi. Untuk mencapai target di bawah 5 persen itu, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, bekerja maksimal untuk dapat menekan laju inflasi.

Presiden memperkirakan tambahan inflasi yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan berkisar di angka 1,8 persen.

"Dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu, saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama-sama dengan pusat, bekerja seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi COVID-19. Saya yakin Insya Allah bisa kita lakukan, sehingga inflasi di tahun ini kita bisa kendalikan inflasi di bawah lima persen," ungkap Jokowi.

Pemerintah daerah juga harus dapat berperan maksimal dalam turut menekan laju inflasi. Salah satunya dengan mengalokasikan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar dua persen dari APBD dalam bentuk bantuan sosial transportasi untuk nelayan, ojek dan transportasi umum.

Selain itu, anggaran tersebut juga bisa digunakan oleh pemda untuk membantu usaha kecil, mikro, menengah (UMKM) dalam pembelian bahan baku yang naik. Anggaran belanja tidak terduga juga bisa digunakan oleh daerah untuk mengatasi dampak kebijakan kenaikan harga BBM subsidi.

Sementara untuk mencapai target di bawah 5 persen itu, pemerintah menerapkan strategi utama untuk mengantisipasi kenaikan inflasi pada akhir tahun. Melalui strategi ini, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, meyakini kalau inflasi pan-

gan turun hingga di bawah 5 persen pada akhir tahun.

"Pemerintah menargetkan inflasi pangan di bawah 5 persen, karena sundulan inflasi dari sektor energi bisa 1,6-2 persen, jadi kita harus berhati-hati," katanya.

Airlangga mengatakan langkah-langkah ekstra akan dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Pertama, memperluas kerja sama antardaerah, terutama untuk daerah surplus atau defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.

Kedua, melaksanakan operasi pasar

tisipasi tingginya permintaan di akhir tahun. Keenam, menyusun neraca komoditas pangan strategis oleh seluruh pemerintah daerah.

Ketujuh, memperkuat sarana dan prasarana penyimpanan produk hasil panen, terutama di daerah sentra produksi. Kedelapan, memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan untuk mempercepat stabilitas harga.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo menyampaikan bahwa hal



dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders. Ketiga, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi.

Keempat, menggunakan anggaran belanja tak terduga dalam pengendalian inflasi, mengoptimalkan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk ketahanan pangan, dan pemanfaatan 2 persen DTU untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

Kelima, mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan, misalnya cabai, untuk mengan-

penting yang dapat menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi, di antaranya menggalakkan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen, mengawasi penyaluran BBM subsidi, mengumumkan persentase inflasi di kabupaten/kota setiap bulannya, dan mengintensifkan jaring pengaman sosial.

Selain itu, kinerja TPID juga perlu ditingkatkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta merespons cepat atas perkembangan harga dari hari ke hari. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Agustus sebesar 4,69 persen (year-on-year/yoy). ●



TEROBOSAN DAERAH ATASI INFLASI

Peningkatan inflasi di daerah mendorong pemerintah melakukan intervensi langsung di lapangan sekaligus menciptakan terobosan seperti yang telah diperintahkan Presiden Joko Widodo. Salah satu bentuk intervensi itu adalah dengan membuat program Beli Kreatif Sumsel (BKSS) yang diinisiasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, Sandiaga Uno.

Melalui peluncuran BKSS ini perekonomian Sumsel diyakini akan semakin tumbuh signifikan.

"Tiga bulan kedepan, saya yakin Beli Kreatif Sumsel akan tunjukkan hasilnya yang sangat tepat sasaran. Siap-siap saja pertumbuhan ekonomi akan meningkat," jelas Sandiaga saat diluncurkan di Sumsel didampingi Gubernur Herman Deru, di Griya Agung, Rabu (14/9).

Menparekraf RI Sandiaga Uno menga-

takan, dalam program BKSS ini sebanyak 200 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan dikurasi dengan pemberian pelatihan, pendampingan agar mereka dapat meningkatkan omset secara signifikan. Selanjutnya setelah tiga bulan, mereka akan dievaluasi pada bulan November tepatnya.

Menurutnya UMKM yang mau bergabung dalam program ini bisa melalui Dinas Pariwisata dan akan difasilitasi dan diberikan insentif dengan beberapa

mitra e-commerce dan top brand yang ada. Sehingga para pelaku UMKM bisa bergabung dalam BKSS dengan mudah.

Program BKSS ini juga menurutnya merupakan turunan dari program Gernas Bangsa Buatan Indonesia 2022. Program Beli Kreatif Sumatera Selatan merupakan program pendampingan yang dilakukan oleh Direktorat Pemasaran Ekonomi Kreatif, kepada pelaku kreatif subsektor fesyen, kriya dan kuliner.

Dalam program ini, para pelaku kreatif mendapatkan pelatihan digital marketing terintegrasi, perluasan pasar ke dalam marketplace unggulan, literasi keuangan, bantuan layanan cuti bayar pajak dan lainnya.

"Adapun peserta program adalah sebanyak 200 pelaku kreatif dan UMKM yang dijangkau dari 17 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan," paparnya.

Sandiaga mengatakan program BKSS ini penting dan menjadi unggulan sebagai upaya mendorong terbukanya peluang usaha dan lapangan pekerjaan.

"Ini cara kita beradaptasi di tengah pandemi. Kemarin UMKM mendapat tekanan luar biasa karena pandemi. Baru selesai pandemi ada lagi distrupsi rantai pasokan. Kini dihantam inflasi. Kami yakin dengan Gernas BBI dan BKSS ini bisa melahirkan adaptasi serta pola inovasi pemasaran secara digital. Dan sudah terbukti omset yang meningkat," tambahnya.

Sementara itu Gubernur Sumsel H. Herman Deru menegaskan dirinya sangat bangga dengan peluncuran program BKSS di Sumsel.

Meskipun inflasi di Sumsel diakuinya masih belum di bawah 5 persen namun ekonomi kreatif telah membantu perekonomian Sumsel tumbuh di atas ekonomi nasional.

"Saat ini banyak sekali yang bisa kita aktivasi tapi Saya harap tiga poin penting jadi pijakan, pertama keterampilan dan kreatifitas para UMKM ditambah, permodalan dan ketiga bantuan pemasaran. Ini penting dan tidak bisa dipisahkan," jelasnya.

Dengan adanya 200 UMKM yang masuk saat ini diharapkan Herman Deru dapat melengkapi 2 juta UMKM yang tergabung di e-commerce.

"Semoga 200 UMKM yang dari Sumsel ini melengkapi 2 juta yang ada di e-commerce menjadi 2,2 juta," jelasnya.

Herman Deru juga mengapresiasi Menparekraf yang masih memperhatikan kelangsungan UMKM. Sebab sejatinya menurut dia, UMKM merupakan garda terdepan menjaga ketangguhan ekonomi.

"Kehadiran Pak Menteri melaunching ini akan semakin menambah semangat, kreatifitas produk dan kreatifitas cara

membelinya sehingga ekonomi Sumsel semakin tumbuh," paparnya.

Dengan dorongan Menparekraf, ia juga meyakini dapat menekan inflasi Sumsel di bawah 5 persen.

"Mohon doanya, salah satunya di sektor pariwisata adanya daerah yang kita unggulan yakni OKU Selatan dengan Sriwijaya Ranau Gran Fondo serta Desa Tebet Lereh di Kota Pagaralam yang masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI)," ungkapnya.

Launching program BKSS tersebut ditandai dengan pemukulan gendang, dilanjutkan dengan peninjauan booth Kriya Sriwijaya.

Siapkan Delapan Strategi

Selain memaksimalkan kegiatan UMKM, Gubernur Herman Deru yang baru saja dilantik sebagai Ketua Komite

nomian Sumsel baik dari sisi permintaan maupun lapangan usaha. Percepatan dan perluasan program vaksinasi juga menumbuhkan optimisme para pelaku usaha dan mendorong kinerja di beberapa sektor.

Adapun pertumbuhan ekonomi Sumsel pada 2022 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 4,18% hingga 5,78% (yoy) yang didukung perbaikan pada hampir seluruh komponen terutama konsumsi dan investasi, serta membaiknya kinerja lapangan usaha (LU) antara lain LU pertambangan dan penggalian, LU industri pengolahan, LU pertanian, kehutanan dan perikanan, serta LU perdagangan besar dan eceran.

Sementara itu, perkembangan inflasi di tahun 2022 juga diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun 2021, namun tetap berada di dalam kisaran



Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumsel oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin terus mensosialisasikan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) sebagai upaya laju inflasi daerah.

Herman Deru mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan nasional serta berbagai indikator dini, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021.

Bahkan menurutnya perbaikan aktivitas perekonomian global dan domestik mendorong peningkatan kinerja pereko-

target inflasi nasional.

Perbaikan perekonomian akan meningkatkan daya beli masyarakat seiring dengan peningkatan pendapatan sebagai dampak peningkatan aktivitas ekonomi. Inflasi 2022 diperkirakan meningkat pada seluruh kelompok yakni volatile food, administered price, dan core inflation.

Sejauh ini terang Herman Deru Pemprov Sumsel juga telah melakukan upaya dan kegiatan terobosan dalam rangka memantapkan dan memulihkan ekonomi dengan melakukan 8 strategi yakni pengembangan industri hilirisasi sumber daya alam. •



JOKOWI BOLEH 3 PERIODE URUSANNYA SOAL ETIKA

Celah konstitusi masih terbuka untuk mempertahankan Joko Widodo berkuasa di puncak pemerintahan satu periode lagi. Menariknya, wacana tersebut datang dari lembaga negara yang tugas utamanya menjaga konstitusi.

Awalnya, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono Suroso, dalam keterangan pers menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden tidak bisa menjabat lebih dari dua periode, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Namun demikian, tidak ada aturan bahwa presiden yang sudah menjabat selama dua periode itu maju kembali sebagai cawapres pada pemilihan umum berikutnya.

Fajar merujuk UUD 1945 pasal 7 yang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Dengan kata lain, bunyi pasal tersebut tidak melarang bagi Presiden yang sudah menjabat dua periode untuk maju kembali sebagai wakil Presiden pada pemilu selanjutnya.

"Saya tidak dalam konteks mengatakan boleh atau tidak boleh. Saya hanya menyampaikan bahwa yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 itu soal presiden atau wakil presiden menjabat 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama satu periode dalam jabatan yang sama," kata Fajar dalam keterangan tertulis, Senin, 12 September 2022.

Dalam perspektifnya, bunyi pasal itu tidak mengandung larangan atau variabel hambatan lain bagi presiden dua periode untuk menjadi wakil presiden di

periode berikutnya.

Menurut Fajar, jika presiden dua periode ingin menjadi wakil presiden di periode selanjutnya, maka persoalannya lebih terkait dengan etika politik.

"Kalau itu secara normatif boleh saja. Tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya," kata Fajar dikutip dari CNN Indonesia.

Pernyataan juru bicara MK itu tentu bagai bola panas yang menyambar para politikus. PDI Perjuangan sebagai partai berkuasa yang memenangkan Jokowi dalam dua pemilihan presiden memberi tanggapan.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto alias Pacul mengatakan, Jokowi bisa saja menjadi cawapres pada Pilpres 2024,

tetapi hal itu sangat bergantung pada kesepakatan parpol atau gabungan parpol.

Pacul mengingatkan bahwa keputusan capres-cawapres PDIP sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Dia juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi pasti memiliki pandangan sendiri soal celah konstitusi tersebut.

"Aturan mainnya mengizinkan. Apakah peluang itu mau dipakai atau tidak, kan urusan Pak Presiden Jokowi," kata Pacul.

Dari kalangan pengamat politik, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan, Jokowi sebaiknya ekstra hati-hati dalam menanggapi isu sensitif ini.

"Sah saja ia kembali ikut kontestasi, tapi potensi menang itu belum tentu," kata Dedi kepada Info Indonesia.

Menurutnya, parpol pasti membuka ruang untuk mengusung Jokowi sebagai cawapres jika kans untuk menang makin besar. Namun, dia sendiri menilai saat ini lebih banyak masyarakat yang mendorong regenerasi kepemimpinan nasional.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024, Timothy Ivan Triyono, selaku penggaung isu Jokowi Tiga Periode mengaku kurang sreg jika mantan Wali Kota Solo itu maju sebagai cawapres di 2024.

Dia bahkan menyebut wacana itu sebagai dagelan politik. "Jadi, Jokpro sendiri dengan pergerakannya, dengan namanya, yang diusung menjadi capres adalah Jokowi dan Prabowo cawapresnya," kata Timothy.

Menurutnya, terlepas dari hambatan konstitusi yang masih berlaku sekarang, Jokowi masih menjadi sosok pemimpin yang layak untuk diberi kesempatan menjabat presiden satu periode lagi.

Jika Jokowi hanya menjadi wapres, maka besar kemungkinan program-program kerjanya tidak berlanjut sesuai harapan.

Jokpro pun terus mendorong agar Jokowi menjadi capres di Pemilu 2024 dan berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Saat ini kita mulai kesampingkan simulasi atau skema Jokowi menjadi

cawapres, karena itu tidak baik bagi pendidikan politik kita kepada masyarakat," ujarnya.

Sepuluh Tahun Cukup

Pengamat ekonomi politik dari Universitas Surakarta (UNSA), Agus Trihatmoko, mengatakan, wacana Jokowi cawapres 2024 terkesan positif bila pertimbangan utamanya adalah keberlanjutan program kerja. Namun, wacana itu menjadi kurang tepat karena Jokowi sudah mendapat kepercayaan rakyat untuk menjabat presiden dua periode atau 10 tahun.

"Di sanalah kesempatan menempatkan program jangka pendek dan jangka panjang yang diperkirakan secara umum akan diteruskan oleh penggantinya di kemudian hari," kata Agus kepada Info Indonesia.

"Hal itu akan diuji pada sistem demokrasi ketika hadir calon kandidat presiden dan wapres yang baru," ujarnya.

Kehadiran Jokowi di puncak eksekutif selama lima tahun lagi sebenarnya tidak bermasalah secara aturan.

"Tapi, biarlah ada darah segar suatu kepemimpinan baru. Itu akan memberikan peluang hadirnya gagasan baru dan atraktif. Rakyat harus yakin dengan pikiran terbuka bahwa banyak orang hebat yang mungkin belum mendapat kesempatan memimpin negara ini," katanya.

Agus juga berpendapat, bisa saja benar ada dukungan kelompok investor atau dunia industri jika Jokowi ingin bertahan di kekuasaan. Namun, investor yang dimaksud tentu hanya mereka yang mendapat banyak keuntungan



Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono Suroso.

Kata dia, sebuah program kerja pemerintahan lama bisa diteruskan, dikoreksi atau dihentikan oleh pemimpin selanjutnya. Itulah demokrasi politik yang objektif sehingga rakyat menentukan apakah janji politik seorang kandidat bisa diterima atau ditolak.

Dia mengakui ada banyak kebijakan Presiden Jokowi yang baik bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Namun, tidak sedikit juga yang dinilai tidak tepat menurut pandangan objektif masyarakat. Contohnya, kebijakan tata kelola minyak goreng dan migas.

dari kebijakan pemerintahan Jokowi.

"Secara substantif perlu disurvei apakah juga bagi kelompok investor dan pengusaha secara umum, termasuk para kelompok usaha menengah," terangnya.

Pengamat komunikasi politik, Jamiludin Ritonga, menganggap keterangan jubir MK ihwal presiden yang sudah dua periode boleh bertarung lagi di Pilpres 2024 selama menjadi cawapres memberi angin segar kepada loyalis Jokowi.

"Kelompok ini menginginkan Jokowi mendampingi Prabowo Subianto pada

kontestasi Pilpres 2024,” kata Jamiluddin.

Dia tidak heran bila muncul kembali kelompok yang mewacanakan pasangan Prabowo-Jokowi untuk 2024-2029. Kelompok yang ingin Jokowi menjadi pemimpin negara lagi seolah mendapat legalitas untuk memperjuangkan pasangan tersebut terwujud pada Pilpres 2024.

Masalahnya, menurut Jamiluddin, apakah Jokowi bersedia menjadi cawapresnya Prabowo? Tentu jawabannya ada pada Jokowi sendiri. Apabila Jokowi bukan sosok yang ambisius, tentu saja ia akan menolak tawaran cawapres.

Bagi Jamiluddin, akan tidak terhormat dari presiden turun menjadi wakil presiden. Dalam isu ini, yang muncul adalah persoalan moral dan etika.

menggunakan celah konstitusi untuk mempertahankan jabatan.

“Karena itu, kalangan pro-demokrasi harus merespons penegasan MK tersebut. Celah tersebut agar cepat ditutup agar orang-orang ambisius tidak berlama-lama memimpin negeri tercinta,” kata mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta itu.

Sementara itu, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasis Raharjo Jati, meyakini, Jokowi tidak akan tergoda untuk dicalonkan menjadi cawapres.

“Saya pikir dalam konteks ini Pak Jokowi tidak akan tergoda untuk maju lagi dalam posisi cawapres karena baginya dua periode sudah cukup,” kata Wasis.

Sulit Ditebak dan Terlihat Menikmati

Walau sudah dibantah sebagai per-

lain.

“Kalau (isunya) dari saya, saya terangkan. Kalau bukan dari saya, saya enggak mau terangkan. Itu saja, terima kasih,” kata Jokowi.

Tidak sekali Jokowi diserang isu yang menggambarkan dirinya ingin tetap berkuasa di puncak pemerintahan. Jauh sebelumnya ramai gagasan Jokowi Tiga Periode, perpanjangan masa jabatan presiden, atau penundaan Pemilu 2024.

“Pertanyaan terkait tiga periode sudah saya jawab. Begitu sudah dijawab, muncul lagi (isu) perpanjangan, juga sudah saya jawab. Ini muncul lagi jadi wapres. Itu dari siapa?” tegasnya

Belakangan, Humas MK secara resmi mengklarifikasi pernyataan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono. MK menyatakan pernyataan tersebut sebagai pendapat pribadi juru bicara.

“Pernyataan mengenai isu dimaksud bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan MKRI,” demikian keterangan tertulis dari Humas MK, Kamis, 15 September 2022.

Humas MK menjelaskan pernyataan tersebut merupakan respons atas diskusi informal dengan wartawan melalui chat aplikasi WhatsApp. “Bukan dalam forum resmi, doorstep, apalagi dalam ruang atau pertemuan khusus yang sengaja dimaksudkan untuk itu.”

Namun, polemik sudah terlanjur berkembang. Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, bahkan sempat memberikan tanggapan bahwa presiden dua periode tidak bisa mencalonkan diri sebagai wapres karena batasan di pasal 7 dan 8 UUD 1945.

Pasal 7 UUD 1945 mengatur “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Sedangkan Pasal 8 (1) berbunyi “Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wapres sampai habis masa jabatannya.”

Dengan demikian, jika Presiden Jokowi menjadi wapres pada 2024, maka



Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga

“Sebaliknya, bila Jokowi sosok ambisius, tentulah tawaran itu akan diterima dengan suka cita. Tinggal dicari pembenarannya agar pencalonannya sebagai cawapres seolah karena desakan dan keinginan rakyat,” ujarnya.

Jokowi akan mencari alasan yang paling logis untuk membenarkan pilihannya itu. Paling tidak, atas kehendak rakyat akan dijadikan tameng pembenaran untuk menutupi ambisiusnya itu.

Ia berharap Jokowi tidak memilih peluang tersebut. Sebab, kalau itu terjadi, maka akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia. Orang-orang yang bernaflu kekuasaan bisa

nyataan resmi Mahkamah Konstitusi, wacana presiden dua periode tidak dilarang konstitusi untuk menjadi cawapres pada 2024 masih menjadi pergunjungan publik. Sampai akhirnya Presiden Jokowi pun ikut menanggapi. Namun, jawaban Jokowi yang bersayap justru memunculkan lebih banyak interpretasi.

Saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka Jumat, 16 September 2022, Jokowi tidak tegas menyikapi polemik terkait peluang dirinya menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya menyiratkan bahwa isu pencalonannya sebagai wapres dibuat oleh pihak

pasal 8 ayat (1) UUD 1945 tidak akan dapat dilaksanakan karena akan bertentangan dengan Pasal 7.

Jokowi Sulit Ditebak

Direktur Executive Partner Politik Indonesia, AB Solissa, menilai, tanggapan Jokowi yang bersayap atas polemik tersebut menunjukkan ciri khas sang presiden.

Dia menyebut Jokowi selalu mendayung di antara dua karang, sehingga membuat publik tidak bisa membaca sikap politiknya yang tegas. Ketidaktegasan presiden terutama sangat tampak dalam isu amendemen konstitusi untuk mengubah batas masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Setiap kebijakan politik yang bakal diambil seringkali didahului dengan melakukan cek ombak atau testing the water. Kalau resistensi publik dianggap terlalu kuat, barulah Jokowi mengambil sikap tegas," ujar AB Solissa kepada Info Indonesia.

AB sendiri melihat wacana Jokowi menjadi cawapres berkaitan dengan gencarnya kelompok loyalis atau relawan Jokowi mengonsolidasikan wacana Jokowi Tiga Periode selama satu tahun terakhir.

Karena gagasan Jokowi Tiga Periode mendapat reaksi keras dari sebagian masyarakat dan aktor politik, termasuk di internal PDIP, dimunculkan isu cawapres sebagai jalan tengah.

"Satu-satunya cara adalah dengan mendorong Jokowi untuk menjadi cawapres agar dia tetap eksis dalam kekuasaan," ujarnya.

Dia menyatakan persoalan ini lebih kental urusan kepantasan dan kepatutan, bukan soal hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih.

"Jokowi sudah seharusnya berpikir untuk meninggalkan legacy besar untuk bangsa ini dengan menempatkan dirinya sebagai seorang negarawan, bukan lagi sebagai politikus," terang AB.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, meyakini Presiden Jokowi menikmati wacana perpanjangan masa jabatan, presiden tiga periode maupun pencalonan sebagai wapres. Kata Dedi, ketiga isu itu senada dan kelihatan sekali

Jokowi setengah merestui.

"Memang tidak ada larangan menjadi cawapres, tetapi itu jelas penanda buruk bagi demokrasi karena tidak ada regenerasi," kata Dedi.

Menurut dia kemungkinan Jokowi menjadi cawapres sangat kecil setidaknya karena dua hal. Pertama, menjaga wibawa Jokowi supaya tidak dianggap terlalu gila kekuasaan oleh rakyat.

Kedua, potensi kekalahan bisa lebih besar jika Jokowi menjadi cawapres. Terlebih, tren elektabilitas Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang disebut-sebut sebagai capres jika Jokowi mencalonkan wapres, cenderung stagnan.

Di sisi lain, Jokowi juga mengalami penurunan kepercayaan publik. Bila dia memaksa diri ikut pencapresan maka kelompok yang kontra akan makin besar.

Terkait ketidaktegasan Jokowi dalam menjawab polemik itu, Dedi melihat

antidemokrasi. "Masak Presiden hanya mengatakan informasi itu bukan dari dirinya dan tidak mau merespons narasi yang menjadi isu liar secara nasional. Sebelumnya saat isu tiga periode muncul, Presiden juga hanya bilang itu wacana," kata Ubedilah.

Berdasarkan logika hukum atau dalam terminologi fiqh politik, seorang presiden yang telah menjabat dua periode disebut mafhum muwafaqah. Presiden yang sudah dua periode dilarang menjabat untuk ketiga kalinya. Apalagi menjabat jabatan yang lebih rendah sebagai wapres.

Di sisi lain, Jokowi menjadi wapres tidak dapat dibenarkan secara logika hukum tata negara. Apabila presiden membiarkan wacana tersebut bergulir, maka maknanya presiden secara tidak langsung membiarkan kekeliruan pemahaman terhadap konstitusi UUD 1945.



Direktur Executive Partner Politik Indonesia, AB Solissa

Jokowi selama ini terkesan ingin kembali berkuasa. "Jika Jokowi tertarik mengikuti desakan relawannya, dengan wacana cawapres, jelas ini jebakan untuk reputasi Jokowi sebagai bagian dari tokoh bangsa," terangnya.

Pengamat sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyesalkan tidak tegasnya Presiden Jokowi menyikapi wacana dirinya bisa menjadi cawapres di Pilpres 2024. Menurut dia, ketegasan sebagai presiden diperlukan untuk menegaskan keberpihakannya pada demokrasi.

Jika tidak, kata Ubed, hal itu membenarkan kesimpulan bahwa Jokowi

Presiden, menurut Ubed, juga berhak mengklarifikasi hal tersebut karena presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan tetapi juga kepala negara. Jokowi memiliki otoritas merespons narasi dari lembaga negara lainnya yang keliru.

Ubed menjelaskan badan atau lembaga-lembaga negara itu memiliki wewenang dan tugas sesuai batas waktunya. Hal itu merupakan fungsi hukum tata negara agar tidak ada kekuasaan yang absolut. Diatur dan ditata secara sistematis agar tidak membuat kekuasaan yang absolut, tetapi menjaga agar demokrasi tetap sehat. ●



DUNIA KRISIS ENERGI, REAKTOR NUKLIR HIDUP LAGI

Krisis energi mengembalikan minat sejumlah negara terhadap proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Negara-negara Eropa hingga Asia menyalakan kembali reaktor pembangkit nuklir mereka dan menghidupkan lagi proyek yang tertunda pasca bencana nuklir Fukushima di Jepang pada 2011.

Amerika Serikat dan Badan Energi Internasional mengatakan bahwa tenaga nuklir sangat penting untuk mencapai target nol emisi karbon atau net zero emission 2050. Nuklir juga dapat memastikan keamanan energi di tengah lonjakan harga bahan bakar fosil yang salah satunya disebabkan gangguan pasokan akibat perang Rusia dan Ukraina

Kini, tenaga nuklir mungkin berada pada jalur kebangkitannya menuju zaman keemasannya pasca krisis minyak 1970-an yang melahirkan banyak proyek baru meski di tengah tentangan politisi dan aktivis lingkungan. Namun, untuk membangkitkan kembali nuklir, masalah pendanaan dan keamanan harus diatasi terlebih dahulu.

"Jika harga bahan bakar fosil tetap tinggi 3-4 tahun ke depan, saya pikir itu

dapat memicu zaman keemasan nuklir, terutama di Asia. Karena di situlah mereka paling sensitif terhadap harga dan yang paling membutuhkan. Sekitar 80 persen dari pertumbuhan permintaan listrik dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi di Asia, mengingat kemerosotan ekonomi di Eropa dan AS," kata kepala riset energi dan energi terbarukan Asia di Wood Mackenzie, Alex Whitworth, dikutip Reuters, Jumat, 5 Agustus 2022.

Dia mencontohkan di Filipina, di mana pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr mempertimbangkan untuk menyalakan PLTN Bataan yang operasinya ditangguhkan sejak proyek tersebut selesai pada 1984, yang pembangunannya menghabiskan dana hingga USD2,3 miliar.

Pemerintah Filipina tengah mendiskusikan proposal untuk merehabili-

tasi pembangkit listrik nuklir Bataan di tengah krisis energi saat ini yang telah mendorong harga bahan bakar pembangkit listrik tradisional ke rekor tertingginya, yakni batu bara dan gas alam.

Selain Filipina, Jepang dan Korea Selatan juga mempertimbangkan untuk menyalakan kembali reaktor nuklirnya. Bahkan membangun pembangkit baru untuk mengatasi krisis energi di tengah tingginya harga bahan bakar dan tuntutan untuk mengurangi emisi karbon.

Vietnam juga tengah meninjau kembali dua proyek pembangkit nuklir yang ditangguhkan pada 2016 karena masalah keamanan dan keterbatasan anggaran. Negara-negara Asia mendorong pembangunan pembangkit nuklir baru, karena kawasan ini merupakan pusat manufaktur dunia. Juga membutuhkan listrik beban dasar untuk melengkapi energi terbarukan menggantikan bahan bakar fosil.

Sementara di Eropa, Inggris telah memberikan persetujuan pada Juli lalu untuk proyek nuklir baru keduanya dalam dua dekade terakhir. Diskusi pendanaan untuk proyek pembangkit nuklir Sizewell C tengah berlangsung dan keputusan akhir investasi ditargetkan pada 2023.

IEA mengatakan bahwa kapasitas nuklir global harus meningkat dua kali lipat pada 2050 untuk mencapai target dekarbonisasi 2050. Termasuk untuk mengisi daya kendaraan listrik, memproduksi bahan bakar non fosil seperti hidrogen dan amonia untuk memangkas emisi karbon industri.

Chairman Rolls Royce SMR, Paul Stein, mengatakan, Singapura, Filipina, dan Jepang tengah membahas teknologi baru seperti reaktor modular kecil yang lebih murah dan dapat dibangun lebih cepat dibandingkan reaktor konvensional.

"Ekonomi negara timur jauh yang sangat terindustrialisasi juga sangat membutuhkan peningkatan pesat tenaga nuklir, seperti halnya industri Eropa dan Amerika, bahkan mungkin lebih," ujar Stein.

"Biaya rata-rata listrik yang dihasilkan oleh PLTN konvensional selama masa pakainya kurang dari setengah

dari pembangkit berbahan bakar gas dengan harga saat ini, dan berada dalam kisaran yang sama dengan tenaga batu bara," kata Whitworth dari Wood Mackenzie.

Dia menyebut nuklir akan menyediakan sekitar 5 persen dari pasokan listrik Asia Pasifik dan diperkirakan akan meningkat menjadi 8 persen pada 2030, berdasarkan proyek-proyek yang telah diumumkan. Desain reaktor China dan Rusia mendominasi proyek yang sedang dibangun sejak 2017, tetapi sanksi terhadap Moskow terkait perang di Ukraina telah menimbulkan pertanyaan tentang kelanjutan pembangkit yang dirancang Rusia.

Finlandia telah membatalkan rencana untuk sebuah proyek oleh pemasok nuklir negara Rusia Rosatom.



Penundaan dan pembengkakan biaya dari tinjauan keselamatan tambahan setelah Fukushima dan pandemi COVID-19 juga telah mengganggu proyek.

"Tingginya biaya awal reaktor dan kekhawatiran seputar pembuangan bahan bakar limbah dan masalah keamanan secara keseluruhan juga merupakan hambatan," kata pakar industri.

Anggaran untuk proyek Hinkley Point C utilitas Prancis EDF, yang sedang dibangun di Inggris, telah meningkat dan akan mulai menghasilkan satu dekade lebih lambat dari yang dijanjikan semula. EDF menyalahkan pandemi karena membatasi staf, sumber daya, dan rantai pasokan.

Di Amerika Serikat, dua reaktor di Plant Vogtle di Georgia dijadwal-

kan untuk dibuka pada 2023 setelah penundaan enam tahun yang menyebabkan biayanya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi USD30 miliar.

"Pengeluaran biaya yang sangat besar dan penundaan yang lama tentu telah menimbulkan kekhawatiran bagi siapa saja yang ingin membangun pembangkit listrik tenaga nuklir berkapasitas besar," kata Timothy Fox, seorang analis di kelompok riset ClearView Energy Partners.

Pemerintah AS juga mengesahkan program senilai USD6 miliar untuk membantu pembangkit nuklir yang kesulitan pendanaan dan mendukung kebijakan tambahan untuk sektor ini.

Senat juga mengumumkan RUU yang dapat mendorong pembangunan reaktor nuklir canggih dan

mencegah penutupan pembangkit tua. RUU tersebut berisi kredit pajak produksi untuk pembangkit nuklir yang ada untuk menghasilkan listrik "nol-emisi".

Di Eropa, hanya ada beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir yang sedang dibangun, tetapi Prancis memiliki rencana untuk membangun hingga 14 reaktor baru pada 2050. Uni Eropa yang melabeli investasi tenaga nuklir sebagai ramah iklim awal bulan ini juga diperkirakan akan mengeluarkan dana publik dan swasta untuk proyek-proyek baru.

Jepang Kembali Nyalakan Pembangkit Nuklir

Pemerintah Jepang dikabarkan

akan menyalakan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang sebelumnya dimatikan setelah bencana Fukushima pada 2011. Jepang juga berencana mengembangkan teknologi reaktor nuklir generasi terbaru.

Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, disebut tengah menyiapkan perubahan besar pada kebijakan energi nuklir, satu dekade setelah bencana Fukushima. Bagian dari kebijakan ini termasuk memperpanjang usia reaktor yang ada.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi krisis energi setelah perang Rusia dan Ukraina menyebabkan perubahan pada lanskap energi global yang signifikan, serta mendorong kenaikan harga komoditas energi.

Jepang telah menonaktifkan se-

dan tenaga nuklir.

Pejabat pemerintah Jepang akan menuntaskan rencana transformasi hijau yang bertujuan memperlengkapi kembali ekonomi terbesar ketiga di dunia itu untuk memenuhi tujuan lingkungan.

Energi nuklir kini dilihat oleh sebagian kalangan di pemerintahan sebagai komponen untuk transformasi hijau tersebut. Opini publik juga telah bergeser, karena harga bahan bakar telah meningkat dan awal musim panas yang panas mendorong seruan untuk penghematan energi.

"Ini adalah langkah pertama menuju normalisasi kebijakan energi Jepang," kata Profesor Kebijakan Publik Universitas Tokyo, Jun Arima, seperti dikutip Reuters, Kamis 25 Agustus 2022.

lakukan setelah bencana Fukushima.

Kishida juga mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan untuk memperpanjang umur reaktor yang ada. Media lokal sebelumnya melaporkan ini bisa dilakukan dengan tidak memasukkan waktu reaktor tetap offline saat menghitung waktu operasinya.

Berdasarkan peraturan saat ini, Jepang menonaktifkan pembangkit nuklir setelah periode yang telah ditentukan, yang dalam banyak kasus adalah 60 tahun.

China Buat Reaktor Nuklir Antariksa

Selain Jepang, China juga mulai membuat proyek reaktor nuklir antariksa, di mana listrik yang dihasilkan mampu mendukung 10 stasiun luar angkasa internasional menurut perkiraan NASA.

"Kementerian Sains dan Teknologi China menyetujui proyek reaktor nuklir luar angkasa yang bertujuan menghasilkan megawatt listrik," demikian dikutip SpaceNews, 1 September 2022.

Misi luar angkasa biasanya mengandalkan tenaga nuklir jika sinar matahari lemah, seperti sisi jauh bulan atau permukaan Mars. NASA, Defense Advanced Research Projects Agency atau DARPA, dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS), juga memiliki proyek nuklir.

Kementerian Sains dan Teknologi China mengumumkan persetujuan tersebut setahun setelah ahli mengingatkan AS untuk membuat proyek nuklir luar angkasa lebih banyak.

"Pesaing strategis termasuk China secara agresif berinvestasi dalam berbagai teknologi luar angkasa, termasuk tenaga nuklir dan propulsi. Amerika Serikat perlu bergerak dengan langkah cepat untuk tetap kompetitif dan menjadi pemimpin dalam komunitas antariksa global," ujar penasihat senior NASA untuk anggaran dan keuangan, Bhavya Lal, berbicara di depan Komite Sains, Antariksa, dan Teknologi Dewan Perwakilan Rakyat AS.

NASA memang sudah terlibat dalam membangun infrastruktur untuk misi perjalanan ke bulan di bawah program Artemis. Ini termasuk menguji teknologi luar angkasa. Namun, per-



Dirjen EBTKE, Dadan Kusdiana

bagian besar pembangkit nuklirnya selama 10 tahun terakhir sejak krisis nuklir di pembangkit listrik Fukushima Daiichi yang dipicu oleh gempa bumi besar dan tsunami pada 2011.

Jepang yang rawan gempa juga mengatakan tidak akan membangun reaktor baru, sehingga perubahan dalam kebijakan itu akan menjadi perubahan haluan yang mencolok.

Kishida mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah menginstruksikan para pejabat untuk membuat langkah-langkah konkret pada akhir tahun, termasuk meningkatkan pemahaman publik tentang energi berkelanjutan

Dia menambahkan, Jepang membutuhkan tenaga nuklir karena jarangnya tidak terhubung dengan negara tetangga, dan tidak mampu meningkatkan produksi bahan bakar fosil dalam negeri. Bulan lalu, pemerintah mengatakan berharap untuk memulai kembali lebih banyak reaktor nuklir tepat waktu untuk mencegah krisis listrik selama musim dingin.

Pada akhir Juli, Jepang memiliki tujuh reaktor yang beroperasi, dengan tiga lainnya offline karena pemeliharaan. Banyak lainnya masih menjalani proses perizinan di bawah standar keamanan yang lebih ketat yang diber-

jalanan ke permukaan bulan diperkirakan baru akan digelar pada 2025.

Sedangkan, China sudah menggunakan tenaga nuklir selama misi luar angkasa ke bulan. Saat itu, Tiongkok menggunakan Chang'e 3 dengan generator nuklir bertenaga plutonium untuk bertahan di bulan pada malam hari selama dua minggu.

China juga mengkaji pembuatan reaktor nuklir luar angkasa sejak 2019. "Ini sebagai bagian dari kepentingan China dalam mengembangkan tenaga nuklir untuk digunakan di luar angkasa," kata SpaceNews.

Media lokal yang didukung Beijing melaporkan bahwa prototipe desain nuklir luar angkasa selesai tahun lalu.

Kerja Sama Internasional Kembangkan Listrik Tenaga Nuklir

Pemerintah Indonesia juga tengah berupaya menggenjot pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Tanah Air. Hal ini sebagai upaya Indonesia dalam mencapai net zero emission pada 2060.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan, pihaknya mempunyai target untuk membangun kerja sama internasional dalam pengembangan PLTN di dalam negeri.

Sebelumnya, pada 2021, dilakukan pendataan terhadap beberapa vendor PLTN skala kecil beserta teknologi yang digunakan. Saat ini, sudah ada Keputusan Menteri ESDM untuk pembentukan tim penyusun kelembagaan PLTN.

"Target untuk PLTN komersial yang dibangun sesuai RPJMN adalah bangun kerja sama internasional," kata Dadan awal tahun ini.

Menurut Dadan, penentuan lokasi PLTN di Indonesia sendiri saat ini belum ditetapkan. Berdasarkan Kajian dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) serta Badan Litbang Kementerian ESDM, rencana pendirian PLTN di Indonesia akan dilakukan di wilayah Bangka Belitung dan Kalimantan.

"Kami juga terlibat melakukan kajian, termasuk di Bangka dan Belitung dan Kalimantan. Tapi memang belum

ada penunjukkan lokasinya," ujarnya.

Untuk besaran investasi yang diperlukan dalam pengembangan PLTN di Indonesia, Dadan belum dapat membeberkannya lebih jauh. Hal tersebut tergantung dari teknologi yang akan digunakan dan kapasitas yang akan terpasang.

Meski begitu, dari sejumlah proposal yang masuk ke Kementerian ESDM,

dah mulai menarik, tetapi dari pemerintah sesuai regulasi sekarang, kebijakan secara teknologi harus yang proven," kata Dadan.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan bakal mengandalkan PLTN dalam memenuhi kebutuhan listrik pada 2045. Pemerintah menargetkan suplai listrik mencapai 4.000 kwh per kapita untuk mencapai Indo-



Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida



Kepala riset energi dan energi terbarukan Asia di Wood Mackenzie, Alex Whitworth

beberapa pihak menyampaikan bahwa ongkos produksi listrik dari PLTN cukup menarik. Harga listrik PLTN saat ini di angka USD9-10 sen per kilowatt hour (kWh), dan ada yang di kisaran USD7 sen per kWh.

"Kajian dari sisi harga sebetulnya su-

nesia Emas 2045 atau sebagai top five ekonomi dunia.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, mengatakan, konsumsi listrik yang dibutuhkan pada 2045 tidak akan cukup dari sektor EBT. ●



Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022

BUTUH KOMITMEN PEMERINTAH TRANSISI KENDARAAN LISTRIK

Pemerintah Indonesia percaya diri mampu menjaga ketahanan pangan di tengah kondisi krisis global akibat konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 7/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditandatangani pada 13 September 2022.

Inpres tersebut sebagai wujud komitmen Presiden Jokowi dalam menerapkan transisi energi dari sumber

fosil ke energi baru dan terbarukan. Nah, untuk mewujudkan desain besar transisi energi, pemerintah memulainya dengan melakukan transisi dan konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

Inpres 7/2022 ditujukan ke seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju, sekretaris kabinet, kepala staf kepresidenan, jaksa agung, panglima TNI, kepala Kepolisian Indonesia, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para

bupati/wali kota.

Melalui Inpres itu, Presiden Jokowi memerintahkan agar setiap menteri hingga kepala daerah menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik. Presiden juga menginstruksikan penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan Inpres 7/2022 akan menjadi modal besar bagi Indonesia jadi yang terdepan di level global



dalam transisi energi menuju peradaban yang lebih maju.

"Di saat negara lain berlomba-lomba menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim, kita jangan hanya jadi penonton. Kita harus jadi aktor utama. Inpres ini memberikan semangat untuk mewujudkan itu," kata Moeldoko dalam keterangannya, Kamis, 15 September 2022.

Menurut Moeldoko, transisi kendaraan konvensional ke listrik juga diharapkan dapat menjadi solusi masalah besarnya subsidi BBM di APBN. Juga menjadi upaya menghemat devisa serta menciptakan kemandirian energi nasional. Selain itu, transisi ke energi listrik juga diharapkan dapat mendorong pencapaian emisi bersih pada 2060.

Terkait penghematan devisa, penggunaan kendaraan listrik dapat menghemat devisa negara hingga lebih dari Rp2.000 triliun, karena akan membantu upaya menurunkan impor BBM. "Digantikan kendaraan listrik yang lebih murah dan diproduksi dalam negeri

energinya. Penghematan devisa negara bisa mencapai Rp2.000 triliun lebih," katanya.

Moeldoko memastikan KSP akan mengawal penuh implementasi Inpres tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. "Sejak awal KSP terus mendorong Inpres ini disahkan. Sudah pasti, KSP akan mengawal implementasinya di kementerian/lembaga hingga di pemerintahan daerah," katanya.

Berdasarkan Inpres 7/2022, penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah, dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, PT PLN tengah mengoptimalkan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik dalam mendukung arahan Presiden Jokowi untuk menjadikan kendaraan listrik sebagai kend-

araan dinas pemerintah. PLN telah menyiapkan layanan pendukung home charging beserta instalasi charging kendaraan listrik di rumah pelanggan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan PLN telah berkolaborasi dengan produsen kendaraan listrik dan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dalam penyediaan layanan home charging untuk memudahkan pemilik kendaraan listrik. Perusahaan setrum negara itu juga memberikan diskon pengisian daya sebesar 30 persen mulai pukul 22.00-05.00 WIB.

Langkah tersebut merupakan upaya PLN untuk menjawab kebutuhan pengguna kendaraan listrik. Darmawan menyebut, pengisian kendaraan listrik akan lebih banyak dilakukan di rumah, seperti halnya pengisian daya handphone maupun laptop.

"PLN siap mendukung arahan Presiden terkait penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah," kata Darmawan.

Darmawan menyebut, PLN juga su-

dah menghadirkan 150 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 117 lokasi. PLN juga masih berencana untuk menambah 110 unit SPKLU sampai akhir 2022.

PLN juga menyediakan tujuh unit Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), lima unit di Jakarta dan dua unit di Surabaya. Tahun ini, PLN juga menyiapkan pengadaan 70 unit SPBKLU dengan jumlah 300 baterai yang lokasinya tersebar di Pulau Jawa dan Bali.

"Tentunya semua ini harus kolaborasi. Kami terus berkomunikasi dengan BUMN lain, misalnya Kereta Api, Ang-

masyarakat terkait kendaraan listrik.

"Masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan kelistrikan apalagi untuk kendaraan listriknya. Mau tambah daya, pasang baru, bahkan membeli kendaraan listrik ini bisa melalui EVDS yang terintegrasi dengan PLN Mobile," kata Darmawan.

Dapat Dukungan Luas

Kejaksanaan Agung mendukung program Presiden Jokowi mengenai penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah dengan diterbitkan Inpres 7/2022.

kan Kejaksaan Agung perlu melakukan perencanaan dan alokasi anggaran terlebih dahulu. Menurut ia, pengadaan kendaraan listrik untuk operasional memerlukan waktu, namun hal itu bisa saja dilakukan segera apabila ada perubahan anggaran untuk pengadaan pada akhir tahun.

"Kalau pengadaan biasanya memerlukan waktu. Bisa saja tahun ini kalau ada anggaran perubahan pada akhir tahun untuk pengadaan itu," ujarnya.

Bupati Jember, Jawa Timur, Hendy Siswanto, mendukung penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas secara bertahap sesuai dengan Inpres



kasa Pura, Pelindo, TWC, Jasa Marga, bagaimana kita akan membangun SPKLU di lokasi-lokasi strategis ini," ujar Darmawan.

Agar bisa mempercepat penetrasi kendaraan listrik di pasar, PLN sudah berkolaborasi dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) terkait pembiayaan yang terjangkau dan mudah bagi masyarakat yang mau beralih ke kendaraan listrik.

PLN pun telah meluncurkan Electric Vehicle Digital Services (EVDS) yang terintegrasi dengan SuperApps PLN Mobile untuk menjawab kebutuhan

"Kejaksanaan bagian dari pemerintah, tentu sangat mendukung program dimaksud dalam rangka mengurangi pencemaran udara atau emisi karbon," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana.

Menurut Ketut, pihaknya sudah mendapatkan informasi mengenai inpres tersebut dan sudah diedarkan ke setiap bidang dan daerah.

"Tentu kami akan menindaklanjuti dengan mempertimbangkan anggaran yang ada," ujarnya.

Mengenai pengadaan kendaraan listrik itu, Ketut Sumedana mengata-

7/2022. "Alhamdulillah, Inpres tentang pemakaian mobil listrik sudah ditan-datangi, namun untuk Pemerintah Kabupaten Jember tentunya akan dilakukan secara bertahap karena hal itu menyangkut persoalan anggaran," katanya.

"Selain persoalan anggaran, kami juga perlu mempersiapkan lebih matang tentang perangkat lainnya yang mendukung pemakaian mobil listrik, sehingga perlu didiskusikan bersama dengan anggota DPRD Jember," tuturnya.

Menurutnya, Tim Anggaran Pem-

kab Jember belum memasukkan pengadaan mobil listrik dalam rancangan Peraturan daerah APBD Jember tahun anggaran 2023, sehingga hal tersebut perlu didiskusikan bersama dengan anggota DPRD.

"Kemungkinan akan dicoba 1 atau 2 mobil listrik terlebih dahulu dengan persetujuan anggota dewan, namun yang pasti Pemkab Jember akan mengkaji terlebih dahulu," katanya.

Hendy menjelaskan, Pemkab Jember juga mencoba membuat kebijakan untuk hemat energi dengan menerbitkan surat edaran bersepeda angin kepada seluruh ASN dari rumah menuju ke kantornya.

"Saya juga mengajak instansi pemerintah lainnya, serta swasta dan masyarakat umum untuk juga menerapkan kebiasaan bersepeda ke kantor untuk hemat energi dan membuat biru langit Jember," ujarnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap melakukan pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai setelah terbit Inpres 7/2022.

"Kami akan dukung pengadaan mobil-mobil dinas atau kendaraan roda empat maupun roda dua. Kami akan mulai secara bertahap menggunakan kendaraan listrik," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai tersebut diharapkan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan lebih ramah lingkungan. Namun, Riza tidak memberikan detail berapa alokasi anggaran untuk pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai tersebut.

Meski begitu, Riza menambahkan Pemprov DKI sudah memulai menggunakan kendaraan bermotor listrik yakni angkutan umum massal TransJakarta. Saat ini, Pemprov DKI sudah menggunakan 30 unit bus listrik dan ditargetkan hingga 100 unit hingga akhir 2022.

Kemudian, mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Selain itu, melakukan sinergi dan pengawasan kepada setiap satuan perangkat kerja dan daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis

baterai sebagai kendaraan dinas.

Selanjutnya, memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Sementara, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mewanti-wanti pemerintah tidak menggunakan mobil listrik impor untuk kendaraan dinas pejabat.

Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, menjelaskan, pengadaan mobil listrik berbasis baterai untuk kendaraan dinas semestinya bisa dipenuhi dari produksi lokal.

"Yang saat ini yang sudah siap kalau

kendaraan yang dibuat atau dirakit di Indonesia. Jangan sampai kendaraan itu diimpor semua, ini harus ada kesesuaian," ujarnya.

Untuk itu, Kukuh berpendapat, harus ada dorongan terhadap para produsen mobil atau pabrikan-pabrikan mobil agar secepatnya merealisasikan perakitan atau produksi mobil listriknya di dalam negeri. Sebab, permintaannya sangat tinggi.

"Potensi kita besar sekali, kalau 99 mobil per 1.000 penduduk kemudian naikin satu saja, itu kan menjadi 100 mobil per 1.000 penduduk. Naikin satu saja itu ada 270 ribu mobil yang dijual.



tidak salah ada dua pabrikan dan itu kapasitas produksi dalam negerinya di kisaran 13 ribu unit per tahun. Apakah itu bisa menjawab?" kata Kukuh dalam diskusi virtual Forwot, Kamis, 15 September 2022.

Kukuh menuturkan pemerintah perlu memahami bahwa produksi mobil listrik di Tanah Air masih minim. Makanya, dia tak ingin pemerintah akhirnya mendatangkan kendaraan berbasis setrum dengan memperbanyak impor lantaran bisa merusak devisa negara.

"Kita menginginkan kalau pun ada percepatan penggunaan kendaraan listrik, itu menggunakan kendaraan-

Kalau itu semua mobil listrik, siapa yang mau memproduksi di sini?" kata Kukuh.

Kukuh berujar, sejauh ini baru dua pabrikan yang punya varian mobil listrik dan produksinya di Indonesia. Dua pabrikan itu adalah Wuling Motors dan Hyundai Motor Indonesia. Wuling mengeluarkan produk Wuling Air EV dan Hyundai merilis produk Hyundai Ioniq 5.

"Karena itu harus dibuat di dalam negeri, jangan sampai itu diisi produk-produk impor. Itu akan merusak neraca devisa kita. Kita ingin semua diproduksi dalam negeri yang menggunakan bahan baku dalam negeri," ucapnya. •



POLEMIK JIS BUKAN MASALAH POLITIS

Jakarta International Stadium (JIS) bisa jadi tak bisa lepas dari polemik dan kontroversi sejak pertama kali diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, 24 Juli 2022.

Menjelang laga FIFA Matchday antara Indonesia melawan Curacao, 24 dan 27 September mendatang, PSSI menyebut JIS tidak layak menggelar salah satu pertandingan tersebut. JIS awalnya akan menjadi lokasi pertandingan pada 27 September 2022.

Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menyebut, JIS belum layak secara infrastruktur untuk menggelar laga dengan kehadiran penonton hingga 80 ribuan orang.

Berdasarkan hasil inspeksi tim Infrastructure Safety and Security PSSI, JIS belum memenuhi kelayakan 100 persen infrastruktur. Kelayakan infrastruktur itu di antaranya mencakup

area penurunan tim, sirkulasi aktivitas terkait pertandingan di outer perimeter menumpuk di barat utara.

Bahkan, concourse timur belum dapat digunakan, perimeter tribune perlu pengkajian ulang, pagar perimeter di bawah concourse barat tidak kokoh. Sarana prasarana pendukung seperti kantung parkir, transportasi umum, dan jalan akses menuju stadion juga dinilai PSSI belum sesuai standar.

Yunus menjelaskan, untuk menggelar sebuah pertandingan FIFA Match Day yang mengundang animo banyak penonton, maka perlu dilakukan simulasi terkait jumlah penonton.

"Mulai dari 25 persen, 50 persen, 75 persen, 100 persen dari perhitungan maximum safety capacity," kata Yunus,

Jumat, 7 September 2022.

Namun, sehari berselang, Yunus meralat pernyataannya dengan menyebut bahwa JIS adalah loka tanding yang megah dan memenuhi standar FIFA. Yunus mengakui JIS adalah stadion apik, namun di sisi lain ada kekurangan yang masih disoroti PSSI.

"Kalau soal stadion kita harus akui. Itu megah layaknya stadion di Eropa. Demikian juga rumput stadion. Semua berstandar FIFA. Namun uang kita soroti itu sarana dan prasarana perimeter stadion yang belum selesai 100 persen," jelas Yunus.

PSSI pun berharap masukan yang diberikan kepada JIS tidak disikapi secara salah oleh berbagai pihak, termasuk netizen.

"Jadi netizen, pelaku sepak bola, atau siapapun yang senang dengan sepak bola jangan salah sangka atau menuduh PSSI yang bukan-bukan. Kritikan PSSI ini untuk kebaikan bersama. Ini hanya masalah waktu saja. Cepat atau lambat, JIS akan menjadi tempat bagi timnas berlaga. Apakah untuk senior, tim U-23, U-20, maupun U-16," terangnya.

Sementara, PT Jakarta Properindo (Jakpro) mengatakan siap bertemu PSSI membahas kemungkinan menggelar pertandingan Timnas Indonesia di JIS.

VP Corporate Secretary Jakpro, Syachrial Syarif, mengatakan, pihaknya sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan PSSI. Sebab, keberadaan JIS sebagai fasilitas olahraga kelas dunia ingin dimaksimalkan untuk Timnas Indonesia.

"Kami sangat mengapresiasi PSSI dan siap berkolaborasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan JIS untuk mendukung prestasi olahraga nasional. Sehingga adanya JIS ini, kita bisa menjadi fokus meningkatkan prestasi sepak bola nasional. Tentunya semangat kolaborasi ini pernah kita tuangkan menjadi komitmen yang sempat ditandatangani bersama pada 17 Agustus 2021 lalu," kata Syachrial.

Jakpro memaklumi persoalan yang melibatkan JIS dengan PSSI saat ini. Menurut Syachrial, hal tersebut bagian dari dinamika semangat sepak bola Indonesia.

"Karena itu, kami meyakini dinamika yang terjadi pun merupakan bagian dari semangat bersama untuk mengukir prestasi sepak bola berkelas internasional," kata Syachrial.

Bukan Soal Politik

Pernyataan PSSI yang menyebut JIS tak memenuhi standar FIFA dan tak layak menggelar duel internasional antara Indonesia melawan Curacao dipandang sarat kepentingan politik.

Menurut aktivis 98, Agung Nugroho, PSSI semestinya menghindari kepentingan politik. Sebab pernyataan PSSI tersebut dinilai jadi upaya menjegal citra Anies Baswedan dalam bursa capres 2024.

"Saya mensinyalir statemen PSSI

itu by order kepentingan politik local. Tujuannya untuk menjegal Anies Baswedan dalam bursa capres 2024," kata Agung kepada wartawan, Minggu 11 September 2022.

Agung menyayangkan PSSI yang ikut-ikutan dalam kepentingan politik satu kelompok dalam persaingan pilpres 2024. Sebab, pernyataan PSSI yang mengatakan JIS tidak standar FIFA adalah hal yang tak masuk akal. Itu mengingat klub Barcelona dan Atletico Madrid yang berlaga dalam Indonesian Youth Championship (IYC) 2021 justru memuji JIS, mulai dari fasilitas, rumput, sampai kemegahannya.

"Tanpa meremehkan penilaian PSSI, jadi agak aneh kalau klub kelas dunia seperti Barcelona dan Atletico Madrid saja memuji JIS. Jika tidak

2022.

Anies tidak banyak memberikan komentar terkait hal tersebut. Dia mengatakan hanya bisa tersenyum menanggapi pernyataan PSSI tersebut.

Sekjen PSSI Yunus Nusi lantas memuji sikap Anies Baswedan yang tidak membahas JIS secara politis.

"Saya berterima kasih kepada pak Anies Baswedan. Beliau menyampaikan statement untuk merespons statement saya dengan baik, tidak langsung membahas secara politis," kata Yunus di Hotel Sultan, Senin, 12 September 2022.

"Kenapa? Karena beliau juga tahu ini masalah konstruksi dan teknis. Saya paham apa yang disampaikan beliau, hanya kan oleh sebagian masyarakat membawanya ini ke ranah politik. Ini



Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

standar FIFA sudah pasti akan dapat keluhan," ungkap Agung.

Terlebih, perencanaan desain JIS turut didampingi langsung oleh Asesor FIFA yang juga merancang stadion berkelas dunia seperti Tottenham Hotspurs Stadium.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menanggapi santai penilai PSSI terkait kelayakan JIS untuk menggelar laga Timnas Indonesia melawan Curacao. Saat ditanya wartawan, Anies justru memberikan pertanyaan balik kepada awak media.

"Kira-kira mungkin enggak? Jawaban saya cuma itu saja. Kira-kira mungkin enggak? Kira-kira," kata Anies di kawasan Kota Tua, Sabtu, 10 September

yang tidak baik bagi kita di sepak bola," ujarnya.

Yang dimaksud politis oleh Yunus adalah komentar warganet atau netizen di media sosial. Pernyataan PSSI soal JIS belum memenuhi standar untuk menggelar laga internasional digoreng kubu pro dan kontra Anies.

"Makanya saya bersyukur Pak Anies menjawab kemarin dengan statement yang bagus, full, karena ini ranah konstruksi dan teknis. Beliau sudah paham itu," ucap mantan Ketua Asprov PSSI Kalimantan Timur tersebut.

Atas kejadian ini, lantas apakah PSSI akan memberikan pendampingan agar JIS layak digunakan untuk pertandingan Timnas ke depannya? ●



TAHUN SIBUK BAGI SHIN TAE-YONG

Keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2023 dipastikan akan membuat Shin Tae-yong ekstra sibuk. Sebab, pelatih asal Korea Selatan itu memiliki setidaknya empat agenda bersama Timnas Indonesia senior dan Timnas U-20.

Sejak pengujung tahun ini hingga pertengahan Januari 2023, Shin Tae-yong bakal menemani Timnas Indonesia untuk berlaga di Piala AFF 2022. Mimpi jadi juara Piala AFF yang sejauh ini belum terwujud bakal kembali jadi misi utama Shin Tae-yong di awal tahun. Piala AFF 2022 akan digelar pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023.

Setelah sibuk di awal tahun dengan timnas senior, mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu tidak akan punya banyak waktu untuk bersantai. Ia bakal dinanti oleh persiapan Piala Asia U-20.

Shin Tae-yong harus meramu tim dan memantau pemain-pemain muda potensial yang bisa jadi anggota skuad

Garuda Muda untuk bertarung di Uzbekistan. Piala Asia U-20 akan berlangsung pada 1-18 Maret 2023.

Persiapan menuju Piala Asia U-20 sendiri sejalan dengan persiapan Shin Tae-yong meramu tim untuk Piala Dunia U-20. Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 dan ajang ini adalah salah satu alasan Shin Tae-yong didatangkan oleh PSSI ke Tanah Air.

Dengan penampilan Timnas Indonesia di Piala Asia U-20, Shin Tae-yong bakal punya laga-laga berkualitas untuk melihat kekuatan dan kelemahan skuad Garuda Asia. Ia pun bisa melakukan pembenahan sebelum Piala Dunia U-20.

Selepas Piala Asia U-20, Shin Tae-yong bakal memimpin Indonesia di

Piala Dunia U-20. Sebagai tuan rumah, Indonesia diharapkan tidak sekadar jadi tim pelengkap turnamen. Piala Dunia U-20 akan berlangsung di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023.

Setelah Piala Dunia U-20 selesai, Shin Tae-yong harus memimpin Timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Asia. Setelah terakhir kali tampil di edisi 2007, Indonesia kembali bisa berlaga di Piala Asia edisi 2023.

Persiapan menuju Piala Asia ini tentu juga harus mulai dilakukan seiring persiapan Shin Tae-yong membenarkan Timnas Indonesia U-20. Dengan demikian, di paruh awal tahun depan, Shin Tae-yong bakal sibuk memimpin dua pemusatan latihan sekaligus.

Lolosnya Timnas Indonesia ke Piala

Asia U-20 menjadi catatan tersendiri bagi Shin Tae-yong. Dia menciptakan sejarah baru dengan menjadi pelatih pertama yang membawa Timnas Indonesia, yaitu senior dan kelompok umur lolos ke putaran final Piala Asia.

Sebelumnya Timnas Indonesia U-20, Shin Tae-yong juga meloloskan Timnas Indonesia senior ke Piala Asia melangkah ke putaran final untuk kelima kalinya. Skuad Garuda berhak tampil di Uni Emirat Arab pada tahun depan dengan status lima runner up terbaik babak kualifikasi.

Tergabung di Grup A bersama Yordania, Kuwait, dan Nepal, Indonesia mengumpulkan enam poin. Fachrudin Aryanto dan kawan-kawan hanya kalah tipis dari tuan rumah Yordania dengan skor 0-1.

Pencapaian ini membuat Shin sebagai satu-satunya pelatih Timnas Indonesia yang bisa melakukan hal tersebut. Timnas Indonesia sebelumnya empat kali tampil di Piala Asia dan 18 kali di Piala Asia U-19.

Empat pelatih Timnas Indonesia di Piala Asia sebelumnya adalah Danurwindo (1996), Nandar Iskandar (2000), Ivan Kolev (2004), dan Alfred Riedl (2007). Keempat pelatih ini sama-sama tak sempat menangani U-19.

Namun, Shin Tae-yong bukan yang pertama berhasil membawa dua kelompok usia ke Piala Asia. Pelatih pertama yang membawa dua kelompok usia ke Piala Asia adalah Fakhri Husaini, yakni bersama Indonesia U-16 dan Indonesia U-19.

Timnas Indonesia U-16 asuhan Fakhri tampil di Piala Asia U-16 2018 di Malaysia. Setahun berikutnya, Fakhri memastikan Indonesia U-19 meraih tiket ke Piala Asia U-19 2020. Sayang ajang ini batal digelar karena pandemi COVID-19.

Pemusatan Latihan di Eropa

Usai lolos ke Piala Asia U-20 2023, Manajer Timnas Indonesia U-20, Sumardji, memastikan sudah memberikan bonus berupa uang kepada penggawa Garuda Nusantara. Bukan itu saja, Marselino Ferdinan dan kawan-kawan juga akan mendapatkan tambahan ilmu dengan melakukan training camp (TC) ke Eropa.

Selanjutnya, tugas dari Sumardji se-

bagai manajer ialah memastikan persiapan Garuda Nusantara menuju Piala Dunia U-20 2023. Untuk itu, lokasi TC dan calon lawan yang dihadapi harus mumpuni dan dipilihlah Eropa sebagai tempat menempa diri armada Shin Tae Yong.

"Sekarang kami siapkan TC untuk mereka ke Eropa sebagai persiapan Piala Dunia U-20 2023 nanti," kata Sumardji, Minggu, 18 September 2022.

Sebelumnya, pada akhir Agustus lalu, Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, juga sempat menyatakan bahwa Timnas U-20 akan menjalani pemusatan latihan di Eropa setelah menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-20 2023. Pemusatan latihan tersebut menjadi bagian persiapan timnas Indonesia menghadapi Piala Dunia U-20 2023.



Pelatih Timnas Shin Tae-yong

Menurut Iriawan, terdapat dua negara dari Benua Biru yang menjadi alternatif pemusatan latihan Timnas Indonesia, yaitu Spanyol atau Belanda.

"Selesai dari Kualifikasi Piala Asia U-20, kita langsung berangkat ke Eropa. Bisa Spanyol, bisa juga Belanda," kata Iriawan.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu pun mengatakan memilih Belanda menjadi salah satu destinasi pemusatan latihan Timnas U-20 karena banyaknya pemain keturunan Indonesia. Menurut dia, hal itu mempermudah Shin Tae-yong mencari talenta terbaik untuk skuad Garuda Muda yang akan tampil di Piala Dunia U-20 2023.

"Kenapa di Belanda, karena pemain

keturunan kita banyak di sana. Supaya bisa cepat melihat, apakah bisa ditarik ke Timnas U-19," kata Iriawan.

Menurut Iriawan, Shin Tae-yong yakin keberadaan pemain naturalisasi bisa membuat Garuda Nusantara berbuat banyak di Piala Dunia U-20 2023. Shin Tae-yong telah mengajukan tujuh nama yang ingin dinaturalisasi. Tujuh nama itu adalah pemain asal Belanda dan memiliki darah Indonesia.

"Yang dua sudah pasti mau karena kami sudah komunikasi. Sedangkan, lima pemain lagi akan kami komunikasikan selanjutnya. PSSI sudah membentuk tim untuk segera berangkat ke Belanda guna bertemu dengan keluarga si pemain," kata Iriawan saat mengikuti rapat terbatas membahas soal progres persiapan Piala Dunia U-20 2023

yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 8 September 2022.

Dua pemain yang sudah bersedia membela Indonesia adalah Ivar Jenner (gelandang) dan Justin Hubner (bek tengah). Mereka sama-sama berusia 18 tahun. Saat ini, Ivar Jenner terdaftar sebagai pemain FC Utrecht U-21, sementara Justin Hubner masuk skuad Wolverhampton U-21.

Iriawan menambahkan bahwa Timnas Indonesia ditargetkan minimal lolos dari fase grup. Namun, jika ada penambahan pemain naturalisasi, dia menyebut Shin Tae-yong sudah berjanji kepada PSSI bahwa anak asuhnya bisa berbuat banyak. ●



MENGUNGKAP RAHASIA KEINDAHAN OBJEK WISATA ALAM

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam dan objek wisata yang beragam. Mulai dari lautan yang indah, gunung-gunung yang menawan, juga beberapa air terjun yang menantang.

Ada banyak objek wisata yang ada di daerah, namun minimnya informasi membuat kita tidak tahu betapa indahnya objek tersebut. Momen akhir pekan sepertinya bisa menjadi hari yang indah untuk berwisata, baik dengan keluarga, teman atau kekasih. Selain dapat mempererat hubungan antar anggota dalam keluarga, berwisata juga bermanfaat untuk menghilangkan stres, melahirkan perasaan rileks, pikiran tenang, dan membuat hidup bahagia.

Berikut ini beberapa rekomendasi objek wisata di Indonesia yang bisa dikunjungi bersama keluarga yang dapat dijangkau dengan mudah.

Air Terjun Bantimurung

Bagi masyarakat di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Air Terjun Bantimurung adalah salah satu objek wisata yang cukup terkenal. Terletak di lembah bukit kapur dengan vegetasi tropis yang subur di Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Bantimurung, di kawasan Taman Nasional Bantimurung. Lokasi wisata ini merupakan objek favorit masyarakat Sulawesi Selatan.

Air terjun ini memiliki tinggi sekitar 15 meter dan lebar sekitar 20 meter. Di bawah curahan air terjun ini terdapat sebuah tempat pemandian dari landasan batu kapur yang tertutup lapisan mineral. Kita bisa berendam dan mandi di pemandian ini.

Selain memiliki tempat pemandian, kawasan air terjun ini memiliki tangga yang berada di sebelah kiri air terjun. Tangga tersebut merupakan jalan menuju ke Gua Mimpi dan Gua Batu. Gua-gua ini mempunyai kedalaman sekitar 1.500 meter.

Satu lagi yang tak kalah menarik, kawasan wisata Air Terjun Bantimurung ini menjadi habitat berbagai spesies kupu-kupu. Jumlah spesies kupu-kupu di kawasan ini cukup banyak, mencapai kurang lebih 150 spesies langka. Oleh karenanya, objek wisata Air Terjun Bantimurung dijuluki sebagai Kingdom of Butterfly.

Di lokasi wisata ini tersedia beberapa fasilitas, seperti kolam renang,



Wisata Pulau Labengki

toilet, bungalow, pusat informasi dan toko-toko souvenir yang menjajakan barang-barang khas dari tempat wisata Air Terjun Bantimurung ini.

Nama Bantimurung sendiri konon berasal dari bahasa setempat. Terdiri dari dua kata, yaitu benti yang artinya air dan merrung yang artinya gemuruh. Karena suara yang dihasilkan air terjun ini bergemuruh.

Cagar Alam Kersik Luway

Objek wisata ini secara administrasi terletak di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, tepatnya di tiga kecamatan. Yakni Kecamatan Sekolaq Darat (Desa Sekolaq Darat), Kecamatan Melak (Desa Empas), dan Kecamatan Damai (Desa Keay).

Dari Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur, anda perlu menempuh jarak sejauh 350 kilometer atau sekitar 8 jam lamanya. Adapun jika ingin sampai lebih cepat, Anda bisa menggunakan jalur alternatif lain menuju kawasan ini.

Yaitu melalui jalur udara dengan waktu tempuh sekitar 45 menit dari Bandara Temindung Samarinda.

Adapun alternatif lain yaitu melalui jalur sungai dengan jarak tempuh sekitar 17 jam.

Cagar alam ini melindungi berbagai jenis tumbuhan yang saat ini semakin langka. Dirawat dan dibudidayakan, tujuan utama cagar alam ini adalah untuk menjaga eksistensi dari tumbuhan yang langka. Yang dilindungi di cagar alam ini adalah tumbuhan anggrek. Terdapat berbagai jenis anggrek yang cukup langka.

Banyak wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia, wisatawan mancanegara yang berkunjung untuk melihat berbagai jenis anggrek. Inilah yang menjadi daya tarik utama dari cagar alam ini. Seperti diketahui, anggrek merupakan suatu tanaman yang sangat jarang berbunga. Maka dari itu, cagar alam ini merawatnya agar tidak punah.

Sebanyak 72 jenis anggrek yang terdapat di Kersik Luway membuat para wisatawan tertarik untuk berkunjung. Namun, tidak ada yang pernah menyangka bahwa terjadi bencana kebakaran beberapa tahun

yang lalu. Hal ini mengakibatkan berkurangnya jenis anggrek. Sehingga saat ini masih terdapat 57 jenis anggrek yang bisa diselamatkan keberadaannya.

Berbagai macam jenis anggrek tersedia dan tumbuh di tanah Kalimantan ini. Bahkan anggrek yang paling langka, yaitu jenis anggrek hitam yang merupakan jenis endemik khas Kalimantan. Hanya tumbuh saat musim kemarau dan mekar hanya sekitar satu minggu, membuat jenis ini semakin dilindungi keberadaannya.

Selain floranya yang memukau, ternyata cagar alam ini juga didiami oleh berbagai jenis spesies hewan langka dan eksotis, yang bahkan hanya bisa ditemukan di Pulau Kalimantan. Spesies tersebut yaitu babi hutan, warik monyet, kijang, rusa, rangkong, biawak, parkir, punai, hingga berbagai spesies burung lainnya.

Itulah berbagai macam jenis spesies hewan yang jarang ditemukan di perkotaan, namun di pulau ini spesies tersebut hidup secara bebas dan aman. Hal inilah yang membuat daya

• INFO WISATA

tarik dari lokasi wisata yang eksotis ini semakin membuat penasaran.

Situ Patenggang

Objek wisata alam ini lokasinya terletak di Jalan Raya Ciwidey, Rancabali, Bandung, Jawa Barat. Situ Patenggang merupakan istilah yang berasal dari bahasa Sunda. Situ berarti danau dan Patenggang berasal dari kata pateang-teangan yang artinya saling mencari.

Terletak di selatan Kota Bandung, Situ Patenggang memiliki luas sekitar 60 hektare dengan keindahan alam sekitarnya, seperti perkebunan teh

harus terpisah jarak dan waktu karena adanya peperangan yang sangat lama.

Karena rasa cinta yang begitu dalam, akhirnya mereka dipertemukan kembali di suatu tempat yang sekarang dinamakan Batu Cinta.

Kemudian, Dewi Rengganis minta dibuatkan sebuah danau dan sebuah perahu untuk berlayar. Perahu ini yang sekarang menjadi sebuah pulau berbentuk hati (Pulau Asmara).

Dari cerita tersebut berkembanglah sebuah mitos. Untuk pasangan kekasih yang ingin hubungannya langgeng, mereka bisa datang ke Situ

tersebut terjadi dan mengabadikannya melalui foto atau video,” kata Kepala Dinas Pariwisata Lumajang, Yuli Harismawati.

Suhu udara dingin yang mendekati 0 derajat Celcius yang terjadi di kawasan Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, menyebabkan terjadinya fenomena frozen yang juga disebut embun upas.

“Fenomena tersebut terjadi hampir di setiap Juli sampai September. Karena pada bulan tersebut suhu di kawasan Ranupani mendekati nol derajat Celcius,” tutur Yuli.

Menurut dia, letak Ranupani yang



Wisata Situ Patenggang

Rancabali serta hutan pinus cagar alam Patenggang yang asri dan sejuk.

Wisatawan dapat menikmati keindahan alam sekeliling dengan menggunakan speed boat, perahu dayung warna-warni, sepeda air, dan perahu bebek.

Konon, Situ Patenggang terkait dengan cerita yang berkembang di masyarakat tentang kisah cinta putra prabu dan putri titisan dewi.

Mereka adalah Ki Santang dan Dewi Rengganis yang berpisah sekian lama. Pasangan sejoli tersebut memiliki ikatan cinta yang kuat, namun mereka

Patenggang, singgah di batu cinta, dan mengelilingi pulau asmara yang senantiasa akan mendapatkan cinta yang abadi

Embun Salju di Kaki Semeru

Fenomena embun salju atau embun upas (embun yang membeku) akibat dinginnya suhu di kaki Gunung Semeru di Desa Ranupani, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menjadi daya tarik wisatawan.

“Fenomena langka itu telah mencuri perhatian sejumlah wisatawan dan mereka sengaja menunggu fenomena

berada di ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut (mdpl) juga mempengaruhi fenomena alam tersebut, sehingga embun salju dapat dilihat di tanah datar di sekitar Danau Ranupani maupun Ranu Regulo.

“Bahkan embun salju juga menutupi tanaman di sekitar, sehingga nampak seperti salju yang sedang menyelimuti pinggiran di Desa Ranupani yang berada di kaki Gunung Semeru,” kata Yuli.

Dia menjelaskan, masyarakat yang akan melihat atau menikmati keindahan embun salju di Desa Ranupani

dan sekitarnya bisa datang sebelum matahari terbit, tepatnya pukul 05.00 WIB.

"Kalau ingin melihat tanaman tertutup embun salju tidak perlu jauh-jauh ke New Zealand, wisatawan bisa datang ke Desa Ranupani di Kabupaten Lumajang," ujar Yuli.

Jalur pendakian ke Gunung Semeru sendiri masih ditutup karena masih berstatus siaga atau level III sesuai dengan rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Pulau Labengki

Banyak yang menyebut pulau ini sebagai surga yang tersembunyi. Pulau Labengki merupakan salah satu pulau indah yang terletak di Sulawesi Tenggara.

Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Bagi Anda yang berencana singgah di Sulawesi Tenggara, berkunjung ke tempat ini tidak ada salahnya.

Pulau Labengki terbagi menjadi dua bagian, yakni Labengki Besar dan Labengki Kecil. Labengki Besar merupakan pulau tak berpenduduk dan kawasan hutan yang dilindungi. Berbeda dengan Labengki Kecil yang dihuni oleh Suku Bajo.

Terdapat pulau-pulau kecil dengan struktur bebatuan karst menyebar di sekitar kawasan kepulauan. Tak ayal banyak yang menyebutnya sebagai Raja Ampat versi Sulawesi. Gugusan batuan karst yang menjulang dari permukaan berpadu dengan gradasi warna air laut akan membuat Anda takjub dengan keindahan yang dimiliki pulau ini.

Karena merupakan kepulauan, cara yang tepat untuk menikmati panorama Pulau Labengki yaitu melalui jalur laut. Tidak perlu khawatir karena beberapa dermaga melayani penyebrangan menuju pulau eksotis ini.

Berangkat dari kota Kendari, Anda bisa melanjutkan perjalanan darat menuju Toli-toli, Kabupaten Konawe sekitar satu jam. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kapal menuju Pulau Labengki yang memakan waktu sekitar tiga jam. Anda akan dimanjakan

dengan indahnya lautan luas selama perjalanan menuju pulau tersebut.

Anda juga bisa lewat jalur Desa Sawa menuju dermaga setempat dengan menggunakan kendaraan umum selama satu setengah jam. Kemudian, perjalanan dilanjutkan sekitar satu setengah jam dengan menggunakan kapal menuju Pulau Labengki. Jika Anda memilih rute ini, selain menikmati keasrian desa-desa kecil, Anda juga akan mendapatkan pengalaman baru tak terlupakan.

Pilihan alternatif yang ketiga yaitu

melalui Desa Nil Tanasa, Kecamatan Soropia. Perjalanan darat dari Kendari menuju ke dermaga Tanasa dapat ditempuh sekitar setengah jam, lalu dilanjutkan dengan perjalanan laut selama dua jam menuju Pulau Labengki. Anda dapat memilih rute ini karena waktu tempuhnya yang relatif singkat.

Keindahan alam di sekitar Pulau Labengki diakui Direktur MURI, Aylawati Sarwono yang mendampingi para penyelam ketika mencoba snorkeling dan berjalan di antara gugusan karst dengan panorama air laut yang sangat



melalui Desa Lasolo. Dari Kendari menuju dermaga Lasolo dapat ditempuh dengan jalur darat sekitar dua setengah jam. Perjalanan dari dermaga Lasolo menuju Pulau Labengki dilanjutkan dengan kapal yang menghabiskan waktu sekitar empat jam. Meskipun memakan waktu yang lama, Anda tidak akan menyesal ketika sampai kawasan pulau ini.

Rute yang cukup singkat yaitu

jernih, sehingga terlihat kehidupan bawah lautnya itu.

"Saya sangat beruntung sekali bisa datang ke Labengki. Menurut saya, ini adalah benar-benar surga yang tersembunyi," ujar Aylawati Sarwono.

Istri budayawan Jaya Suprana ini juga menyarankan agar berkunjung ke tempat ini minimal sekali sebelum tutup mata. Karena tempat ini sangat indah pemandangannya. ●



Roro Fitria

MANTAP GUGAT CERAI SUAMI



Dalam beberapa waktu belakangan, rumah tangga selebriti Tanah Air kembali diguncang isu perpisahan. Kali ini, aktris Roro Fitria dikabarkan telah menggugat cerai sang suami, Andre Irawan ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Aktris berusia 32 tahun itu menggugat cerai Andre Irawan karena pengkhianatan yang dilakukan sang suami terhadap dirinya. Roro Fitria menyebut, suaminya bukan hanya sekali berselingkuh darinya.

"Melihat karakter yang tidak rasional, tidak masuk akal, dan juga pengkhianatan-pengkhianatan yang tidak hanya terjadi sekali dengan satu wanita, ada indikasi lebih dari satu wanita. Jadi, tidak bisa," kata Roro Fitria.

Bagi Roro, kesetiaan merupakan nilai terpenting dalam pernikahan. Dia pun merasa tak

paham jika seorang memilih untuk berpoligami.

"Prinsip Nyai, suatu hubungan suami istri itu harus setia," tegas Roro Fitria.

Terkait gugatan itu, Andre Irawan buka suara mengenai gugatan cerai yang dilayangkan Roro Fitria. Andre Irawan yang mengetahui gugatan tersebut mengaku kaget.

"Masalah gugatan saya sendiri juga enggak tahu sejauh ini. Karena kan masalahnya saya sudah dari beberapa minggu setelah (Nyai) lahiran belum ketemu sama Nyai, belum ada komunikasi sama Nyai," kata Andre Irawan di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan, Rabu, 14 September 2022.

Andre men-



gatakan akses komunikasinya kini ditutup oleh Roro Fitria tanpa alasan yang jelas.

"Jadi semua akses WhatsApp, semua sudah di-block sama Nyai. Tapi saya tahu posisinya di mana, enggak ketemu. Pas ke apartemen juga enggak ada, hampir setiap hari saya pulang buat ngecek Nyai saja," tutur Andre lagi.

Dia tak mengetahui alasan Roro Fitria menutup pintu komunikasi. Hal itu terjadi saat ia mengurus ibundanya yang tengah sakit. Itu juga berbarengan dengan anaknya menjalani pemotretan newborn.

"Pastinya saya belum tahu (alasannya). Kejadiannya bareng sama Umi Ana. Jadi, Ibu Ana masuk ke rumah sakit dalam keadaan kritis, waktu itu saya keluar rumah setengah 3, itu juga izin sama Nyai," tutur Andre.

"(Itu) berbarengan sama foto newborn, mungkin kecewa saya enggak hadir pas foto itu," tambah Andre lagi.

Andre memastikan tidak ada permasalahan rumah tangga sebelum gugatan itu dilayangkan oleh Roro Fitria. "Enggak ada (konflik), pas dari lahir itu kita sudah fokus (urus anak) saya dan Nyai. Saya pernah punya pengalaman dengan anak. Apa pun saya selalu ngalah, Nyai baru punya anak," ucap Andre.

Sebelumnya, Andre Irawan membantah soal kabar adanya KDRT, sehingga Roro Fitria mantap berpisah. Menurut Andre, dirinya tak pernah bersikap kasar kepada perempuan.

"Saya tegaskan, saya namanya duda, dari zaman dahulu enggak pernah kasar buat perempuan," tutur Andre.

Andre berprinsip bahwa perempuan itu harus dimuliakan. Roro menikah dengan Andre Irawan pada 29 Desember 2021. Dari hasil pernikahannya tersebut, Roro dan Andre dikaruniai seorang bayi laki-laki bernama Muhammad Sulthan Al-Fathir, yang lahir pada 26 Agustus 2022 lalu. ●

Stephanie Poetri

MELEPAS BAYANG-BAYANG SANG DIVA

Nama Stephanie Poetri mungkin tidak sepopuler dengan nama sang ibu, Titi DJ, yang merupakan salah satu diva pop Indonesia. Namun, Stephanie diyakini bisa melebihi ibunya setelah dengan berani dia meninggalkan segala kemilau dan popularitas sang bunda di Indonesia.

Anak bungsu Titi DJ memulai dari nol untuk menggapai cita-citanya jadi penyanyi internasional di Amerika Serikat, negeri asal sang ayah. Sukses mulai digenggam Stephanie. Hingga kini, lagu bertajuk, 'I Love You, 3000' telah ditonton lebih dari 140 juta kali di YouTube. Pencapaian ini berhasil membawa Stephanie Poetri ke panggung Amerika Serikat.

Stephanie tak menyangka bahwa lagu yang dirilis 2019 ini akan membesarkan namanya.

"Aneh sih sebenarnya, kayak very low effort (tanpa kerja keras). Jadi pas aku keluarin juga kayak, 'oh, ini buat seru-seru aja,'" kenang Stephanie Poetri dilansir dari VOA, Selasa, 6 September 2022.

Namun, dalam hati yang terdalam, ada sepercik harapan bahwa lagu ini dapat didengar oleh banyak orang.

"(Aku enggak pernah menyangka) untuk segede ini. Jadi sangat berterima kasih," lanjut Stephanie.

Kegigihan Stephanie dalam bermusik diakui oleh sang ibu, Titi DJ, yang merasa salut atas langkah yang diambil oleh anak bungsunya untuk



berkarir di luar negeri.

Setelah tamat SMA, Stephanie mengutarakan keinginannya untuk istirahat dulu dari pendidikan formal, untuk meniti karirnya di dunia musik.

"Dari situ sampai ke (lagu) 'I Love You, 3000' tuh enggak lama ya. Di tengah-tengah gap year-nya dia. Jadi 6 bulan gitu ya, terus mulai masuk tawaran-tawaran dari label dari Amerika kan. Ada hampir 20 gitu kirim e-mail," cerita Titi DJ kepada VOA.

Akhirnya, pilihan Stephanie jatuh pada label musik 88 Rising, yang telah membesarkan nama artis-artis Indonesia, seperti Rich Brian, Niki, dan Warren Hue. Ia pun langsung memutuskan untuk hijrah ke Los Angeles.

"Senang sih, soalnya salah satu hal yang menakutkan gitu untuk pindah ke Amerika kayak, 'aduh serem nih, enggak kenal siapa-siapa.' Tapi ada rasa senangnya, di label juga tetap ada (teman-teman asal Indonesiaku) gitu, jadi senang," kata penyanyi berusia 22 tahun ini.

Titi DJ pun memberi restu putrinya untuk pindah ke Amerika Serikat. Menurut Titi, jika ingin menjadi musisi internasional, Stephanie memang harus tinggal di pusat industri musik dunia, salah satunya adalah Amerika.

"(Aku merasa berutang budi kepada Mama), soalnya dia bener-bener ngebantu aku berkarir di Indo dan kemudian berkarir di (Amerika) juga," tutur Stephanie.

Di bawah label musik 88 Rising, biasanya Stephanie Poetri bekerja sama langsung dengan produser dalam menggarap lagu, tetapi tak jarang juga dibantu oleh penulis lagu lain. Terkadang cocok untuk dilantunkan, namun tak jarang lagu tersebut ditawarkan ke artis yang lain. ●



DILEMA INDONESIA BELI MINYAK RUSIA

Bagaimana peluang Indonesia membeli minyak Rusia? Harga diskon menjadi daya tarik utama.

Pemerintah pun akhirnya mengibarkan bendera putih dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar dan Pertalite sejak 3 September 2022. Pemerintah beralasan, jika harga BBM tak dinaikkan, maka subsidi yang angka kini mencapai Rp502 triliun, bisa kembali membengkak sampai Rp698 triliun.

Berbagai opsi kini dipertimbangkan pemerintah untuk mengatasi krisis energi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan BBM. Apalagi, sejak harga BBM dinaikkan, masyarakat dari berbagai kelompok terus melakukan demo meminta agar harga Solar dan Pertalite kembali diturunkan.

Pertengahan September, dalam sebuah wawancara bersama media asal Singapura, Financial Times, Presiden Joko Widodo menyatakan tengah mempertimbangkan Indonesia membeli minyak mentah murah Rusia. Jokowi mengatakan memantau opsi yang tersedia terkait minyak, jika ada negara yang menawarkan dengan harga lebih murah.

Presiden Jokowi mengutarakan kemungkinan Indonesia membeli minyak mentah murah dari Rusia untuk meredakan tekanan dari kenaikan harga BBM di dalam negeri.

"Semua opsi kami pantau. Jika ada negara dan mereka memberikan harga yang lebih baik, tentu saja," kata Presiden

dalam wawancara dengan Financial Times, ketika ditanya apakah Indonesia akan membeli minyak dari Rusia, seperti dikutip Reuters, Senin (12/9/2022).

"Ada kewajiban bagi pemerintah untuk mencari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan energi rakyatnya. Kami ingin mencari solusi," sambung Presiden Jokowi saat berbicara di Istana Kepresidenan Jakarta.

Wacana Indonesia membeli minyak mentah dari Rusia pertama kali diungkapkan oleh Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, Maret lalu. Dia menyebutkan bahwa nantinya minyak mentah dari Rusia akan diolah di Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat.

"Pertamina melihat adanya potensi Rusia yang akan menjual minyak mentah dengan harga murah akibat sanksi perdagangan dari negara barat. Ada peluang untuk membeli dari Rusia dengan harga yang lebih baik," kata Nicke saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Senin, 28 Maret 2022.

Ketika itu, Nicke menyebut, pembelian minyak mentah dari Rusia akan dilakukan secara business to business (B to B) daripada Government to Government (G to G). Hal ini diharapkan agar tidak menimbulkan persoalan politis. "Tak ada masalah sepanjang perusahaan (minyak) yang deal sama kita enggak kena sanksi," ujarnya.

Tak lama berselang, Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury, mengatakan pemerintah berhati-hati dalam menyikapi adanya wacana kebijakan pembelian minyak dari Rusia.

"Saya rasa pembelian minyak ke Rusia ini ada berbagai kesulitan, seperti logistiknya dan ada kesulitan pembayarannya. Jadi tentunya ini perlu dilihat secara keseluruhan," kata Pahala, Senin 9 Mei 2022.

Ketika itu, Pahala mengatakan pemerintah belum menjalin komunikasi dengan Rusia soal wacana pembelian minyak mentah. Pemerintah masih sangat berhati-hati untuk melihat bagaimana kebijakan pembelian minyak dari Rusia.

Lalu, Pejabat Sementara (Pjs) Vice President Corporate Communication Pertamina, Heppy Wulansari, juga menyatakan Pertamina batal membeli minyak mentah Rusia karena stok minyak di sejumlah kilang masih cukup un-

tuk mengakomodir permintaan BBM di Tanah Air. Namun, Heppy tak merinci berapa besar stok yang tersedia di tiap-tiap kilang.

Akhir Agustus lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menyebut, Presiden Jokowi menyetujui untuk mengimpor minyak dari Rusia karena harganya 30 persen lebih murah dari harga pasar. Kebijakan itu ditempuh karena harga minyak dunia yang saat ini sedang bergejolak di tengah perang Rusia dan Ukraina.

"Rusia nawarin ke kita, 'eh lu mau enggak, India sudah ambil nih minyak kita, harganya 30 persen lebih murah daripada harga pasar internasional. Kalau buat teman-teman CEO Mastermind ambil gak? Ambil. Pak Jokowi pikir yang sama, ambil,'" kata Sandiaga seperti dikutip di akun Instagramnya, Sabtu, 20 Agustus 2022.

Sandi menambahkan, jika Indonesia dikeluarkan dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), maka Indonesia bisa mengkonversi pembayarannya dalam bentuk Rubel. "Kata Rusia tidak perlu takut, bayar pakai rubel saja. Konversi rupiah ke rubel. Nah, ini teman-teman di sektor keuangan lagi menghitung," ujar Sandiaga.

Sementara, Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan, isu pembelian minyak berharga murah dari Rusia harus dilihat dalam konteks yang lebih besar. Yakni dampak dari berkepanjangannya perang Rusia-Ukraina yang menimbulkan tekanan di sektor energi.

Dalam konteks diplomasi ekonomi, Indonesia tentunya dengan segala upaya mencoba mencari akses ke sumber-sumber energi yang bisa menjangkau



Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Putin.

kebutuhan dalam negeri dengan harga ekonomis.

Ketika ditanya apakah pemerintah akan mempertimbangkan untuk membeli minyak murah dari Rusia, Faizasyah mengatakan yang lebih tepat untuk menjawab adalah pelaku bisnis, karena isu ini bersifat B to B. Para pelaku bisnis di sektor jual beli minyak bisa memutuskan dengan berbagai pertimbangan yang mereka bisa berikan, pertimbangan ekonomis, dan lain-lain.

"Dari sisi pemerintah, tentunya dalam konteks diplomasi ekonomi, segala sesuatu kita lakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan energi dalam negeri bisa kita fasilitasi melalui berbagai

pada Juli," dikutip dalam keterangan tertulis BPS, Kamis 15 September 2022.

Secara total sejak 2018, nilai impor olahan minyak dari Rusia mencapai USD67,8 juta. Nilai impor ini sebetulnya terus naik sejak 2018 dan mencapai tertinggi selama empat tahun pada 2021 sebesar USD44,8 juta. Namun, nilainya turun signifikan pada tahun ini, di mana sampai dengan Agustus hanya USD32 juta.

Masih berdasarkan data BPS, impor minyak mentah Indonesia terbesar pada 2021 berasal dari Arab Saudi dengan volume mencapai 4,42 juta ton atau hampir sepertiga total impor minyak Indonesia. Impor minyak mentah Indo-

Di sisi lain, Indonesia juga mengeksport sebagian minyak mentah ke sejumlah negara. Tercatat, Indonesia menjual minyak mentah paling banyak ke Thailand senilai USD781,6 juta sejak Januari hingga Juli 2022.

Kemudian, Indonesia menjual minyak mentah ke Australia senilai USD59,8 juta, India USD26,3 juta, Singapura USD18,1 juta, Malaysia USD17,2 juta, dan Jepang USD9 juta.

Jika apa yang disampaikan Jokowi itu terjadi, maka Indonesia akan bergabung dengan Cina dan India yang saat ini menjadi pembeli utama minyak Rusia. Hal ini setelah negara-negara barat mengembargo impor komoditas energi Rusia sebagai sanksi atas invasi ke Ukraina.

India dilaporkan telah mengurangi impor minyak mentah dari Amerika Serikat hingga 50 persen atau sebesar 1 juta metrik ton sepanjang kuartal II-2022, seiring meningkatnya impor minyak dari Rusia yang dijual dengan diskon besar.

Bauran energi India kini terlihat berbeda dibandingkan tahun lalu, di mana pangsa minyak Rusia hanya sekitar 2,2 persen dari total impor minyak mentah, sedangkan minyak dari AS mencapai 9,2 persen. Kini, pangsa minyak Rusia mencapai 12,9 persen, sedangkan minyak mentah AS turun menjadi 5,4 persen.

India tidak pernah membeli minyak mentah Rusia dalam jumlah besar meski harus mengimpor 80 persen dari kebutuhannya. Pada 2021, India hanya mengimpor 12 juta barel minyak mentah Rusia, di mana mayoritas minyaknya bersumber dari Irak, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Nigeria.

Pada tahun-tahun tertentu, India paling banyak mengimpor 2-5 persen minyak Rusia. Kira-kira proporsi yang sama seperti yang dilakukan Amerika sebelum mengumumkan larangan 100 persen terhadap komoditas energi Rusia.

Namun, pada Mei lalu, muncul laporan bahwa telah terjadi peningkatan signifikan pengiriman minyak Rusia menuju India. Menurut laporan Bloomberg, India menggelontorkan USD5,1 miliar untuk minyak, gas, dan batu bara Rusia dalam tiga bulan pertama setelah invasi, atau lima kali lipat nilai tahun sebelumnya.

Meski demikian, Cina tetap menjadi pembeli terbesar komoditas energi Ru-



Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan

misi diplomasi yang kita lakukan," kata Faizasyah.

Ikuti Cina dan India

Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia tidak pernah mengimpor minyak mentah dan gas dari Rusia sejak 2018. Impor migas dalam perhitungan data BPS terdiri atas minyak mentah, olahan minyak, dan gas. Selama empat tahun terakhir, Indonesia hanya mengimpor migas dari Rusia dalam bentuk olahan minyak. Nilai dan volume impor olahan minyak pun turun signifikan tahun ini di tengah perang antara Rusia dan Ukraina.

"Sejak 2018 hingga Agustus 2022 hanya impor hasil minyak. Khusus 2022, hingga Agustus hanya mengimpor Lubricating greases kode HS 27101944

nesia terbesar berikutnya berasal dari Nigeria seberat 3,92 juta ton dan Australia dengan berat mencapai 1,41 juta ton.

Berdasarkan transaksinya, sejak Januari sampai Juli 2022, Indonesia mengimpor minyak mentah paling banyak dari Nigeria senilai USD2,54 miliar. Selanjutnya, Indonesia juga mengimpor minyak mentah dari Arab Saudi senilai USD1,88 miliar, Angola USD497 juta, Australia USD326,3 juta, dan Azerbaijan USD314,3 juta, dan Algeria USD171,5 juta.

Lalu, Guinea Khatulistiwa USD162,6 juta, Gabon USD157,5 juta, Amerika Serikat USD131,1 juta, Kongo USD128,3 juta, Uni Emirat Arab (UEA) USD31,7 juta, Papua Nugini USD30,3 juta, Belanda Baru USD21,2 juta, dan Malaysia USD20,4 juta.

sia. Cina menghabiskan sekitar USD18,9 miliar dalam tiga bulan hingga akhir Mei, atau hampir dua kali lipat jumlah tahun sebelumnya.

Menurut Badan Energi Internasional (IEA), minyak mentah Ural dari Rusia telah ditawarkan dengan harga diskon. Presiden Transversal Consulting, Ellen Wald, mengatakan, beberapa perusahaan perdagangan komoditas, seperti Glencore dan Vitol, menawarkan diskon masing-masing USD30 dan USD25 per barel untuk minyak Ural.

Ural adalah campuran utama yang diekspor oleh Rusia. Para ahli mengatakan perhitungan ekonomi sederhana adalah alasan terbesar mengapa tekanan Gedung Putih untuk mengekang pembelian minyak mentah dari Rusia tidak didengarkan oleh Delhi.

Menanggapi pertanyaan tentang hubungan India-Rusia, juru bicara departemen luar negeri AS, Ned Price, telah mengakui bahwa India memiliki hubungan historis dengan Rusia. Itu akan menjadi tugas besar untuk mengubahnya.

Menurut data Refinitiv, Rusia mengekspor lebih banyak minyak olahan ke Asia menggunakan kapal seiring sanksi dari negara Barat. Uni Eropa sendiri telah mengurangi impor produk minyak Rusia sejak Maret dan telah menyetujui larangan penuh mulai Februari 2023.

Pada Agustus, ekspor BBM dari Rusia ke Belanda dan Estonia turun menjadi nol dari sebelumnya 365.000 ton dan 170.000 ton pada Juli. Sedangkan, pengiriman ke Singapura mencapai 350.000 ton dari sebelumnya tidak ada.

Waspada Sanksi Dari Barat

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menyebut, Rusia secara historis bukanlah negara andalan impor minyak Indonesia. Minyak mentah impor Indonesia kebanyakan didatangkan dari Timur Tengah maupun Afrika. Ini karena karakteristik minyak Rusia belum tentu cocok dengan kilang minyak dalam negeri.

"Spesifikasi minyak Rusia dengan negara lain tentu berbeda, ini yang disesuaikan dengan kemampuan kilang kita dalam mengolah minyak," kata dia.

Mamit pun mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan matang-ma-

tang jika ingin membeli minyak murah dari Rusia. Pasalnya, pemerintah justru bisa merugi jika ternyata minyak yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan kemampuan olah kilang dalam negeri.

Mamit juga mengatakan realisasi pembelian minyak dari Rusia tidak semudah yang dikatakan oleh Sandiaga Uno. Faktor-faktor lain seperti sikap AS yang menentang konflik antara Rusia dan Ukraina juga harus diperhitungkan.

Apalagi, Indonesia merupakan mitra datang AS terbesar nomor lima di Asia Tenggara dengan nilai USD37,02 miliar pada 2021. Terdiri dari ekspor Indonesia ke AS sebesar USD25,77 miliar dan impor Indonesia dari AS senilai USD11,25

Sembodo, mengatakan, rencana Indonesia membeli minyak dari Rusia dapat dilihat dari dua sisi. Pertama dari segi pragmatis atau oportunis.

Saat ini, Indonesia sedang berada dalam kondisi tidak mudah, di mana harga BMM naik, subsidi besar, tekanan inflasi. Sehingga, tawaran Rusia bisa menjadi satu obat di tengah kondisi tidak mengenakan yang harus dihadapi.

"Jadi kenapa kita enggak beli saja? Kan Rusia menjualnya dengan harga yang lebih murah," ujar Maxensius.

Sementara, dari sisi idealis atau ideologis, sangat berlawanan dengan cita-cita Indonesia yang anti-penjajahan dan anti-agresi. Tetapi, karena kepentingan prag-



Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno

miliar.

"Jangan sampai Indonesia juga dicap sebagai negara pendukung perang. Ini bisa mengganggu upaya diplomasi Indonesia dengan sejumlah negara," kata Mamit dikutip dari Katadata.co.id.

Mamit memperkirakan pemerintah tak akan membeli minyak dari Rusia walau adanya tawaran diskon 30 persen di tengah tingginya harga minyak.

"Okelah Pak Sandiaga benar harga minyak lebih murah, tapi kan tidak semudah itu. Saya kira pemerintah enggak akan beli minyak dari Rusia, kecuali pemerintah berani tidak sepakat dengan AS. Seperti yang dilakukan Cina dan India," ujar Mamit.

Pengamat ekonomi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Maxensius

malah mengorban sisi yang lebih ideologis.

Menurut Maxensius, Indonesia sedianya konsisten pada hal-hal yang lebih ideologis, terlebih dengan posisi Indonesia sebagai Ketua G20 saat ini.

Menurutnya, walaupun memaksa membeli minyak murah dari Rusia, Indonesia akan menghadapi hal-hal yang tidak mudah. Dia menyebutkan negara-negara yang menolak invasi Rusia ke Ukraina akan memandang miring sikap Indonesia dan mungkin akan berdampak besar pada isu ekonomi yang lebih besar. Bisa saja, Amerika Serikat akan mempertimbangkan bantuan-bantuannya bagi Indonesia. Dia menyarankan Indonesia tidak terjebak oleh kepentingan-kepentingan pragmatis meski dalam kondisi sulit. ●

MINYAK MURAH RUSIA DIBORONG CHINA DAN INDIA

Pertimbangan Indonesia untuk membeli minyak dari Rusia sebenarnya sudah diwacanakan cukup lama, meski baru sepekan disampaikan ke publik oleh Presiden Joko Widodo saat wawancara dengan Financial Times, 12 September 2022. Namun, hingga kini, Indonesia belum juga membeli minyak yang disebut diskon 30 persen itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, pun akhirnya buka suara kenapa pemerintah belum juga membeli minyak mentah yang diobral oleh Rusia. Selain sulit direalisasikan, Indonesia disebut harus bersaing ketat dengan beberapa negara untuk mendapatkan minyak murah asal negeri beruang merah itu.

Arifin mengatakan, persaingan ne-

gara-negara di dunia yang saat ini juga tengah mengincar minyak mentah Rusia berdampak pada ketersediaan pasokan.

"Sekarang yang mau ngambil minyak murah juga banyak kan? Masalahnya ada enggak pasokannya sekarang? Sekarang Rusia ada minyaknya, banyak enggak yang mengambil minyak Rusia? Banyak kan? Terus pedagang ambil enggak?" tegas Arifin di Gedung Kementerian

ESDM, Jumat, 16 September 2022.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva sebelumnya pernah menyebutkan bahwa saat ini PT Pertamina sedang dalam komunikasi yang erat dengan pihak Rusia terkait dengan rencana pembelian minyak mentah. Namun, untuk merealisasikan wacana tersebut tidaklah mudah.

"Belum ada yang ke beli (lewat Pertamina) karena barangnya belum ada. Kalau ada minyak murah dari mana aja



ya beli dong,” ujar Arifin.

Berdasarkan data International Energy Agency, sebagai produsen minyak terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi, total produksi minyak Rusia pada Januari 2022 mencapai 11,3 juta barel per hari. Tak kalah jauh dari Amerika Serikat yang mencapai 17,6 juta barel per hari atau Arab Saudi yang menghasilkan 12 juta barel per hari.

Setelah invasi ke Ukraina, jumlah produksi minyak Rusia menyusut. Pada Juli lalu, jumlah produksi minyak mereka mencapai 9,80 juta barel per hari. Ekspor minyak Rusia juga turun 115 ribu barel per hari pada Juli menjadi 7,4 juta barel per hari. Padahal, di awal tahun, total eksponya sekitar 8 juta barel per hari.

Aliran produk minyak Rusia ke Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Jepang dan Korea juga merosot hampir 2,2 juta barel per hari sejak pecahnya perang di Ukraina. Kondisi ini berbanding terbalik dari akhir tahun lalu, di mana sekitar 60 persen dari ekspor minyak Rusia pergi ke negara anggota Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) di Eropa. Sedangkan, 20 persen lainnya dikirimkan ke Cina.

Setelah perang, Rusia semakin bergantung kepada dua negara dalam menjual minyak mentahnya, yakni Cina dan India yang menyumbangkan lebih dari 40 persen volume ekspor.

Menurut data dari analis komoditas Kpler yang dikutip Reuters, Importir minyak mentah terbesar dan ketiga terbesar di dunia menyumbang 1,85 juta barel per hari dari total ekspor Rusia, yakni sebesar 4,47 juta barel per hari pada Juli.

Jumlah ini mencakup 41,4 persen dari total pengiriman minyak mentah Rusia pada Juli. Hampir dua kali lipat dari Juli tahun lalu ketika Cina dan India mendapatkan porsi 21,7 persen dari ekspor minyak Rusia.

Namun, pangsa minyak mentah yang diambil India dan Cina telah merosot dalam beberapa bulan terakhir setelah rekor tertinggi pada Mei ketika mencapai 45,4 persen porsi ekspor minyak Rusia. Saat itu, Rusia juga sedang berusaha keras mencari pem-

beli baru setelah negara-negara Barat membatasi impor sebagai sanksi terhadap invasi Ukraina. Selanjutnya pada Juni, Cina dan India menyumbang 45,2 persen dari ekspor minyak Rusia.

Rusia telah menjadi pemasok minyak terbesar China karena menjual minyak mentah yang didiskon ke Beijing di tengah sanksi atas perang Ukraina. Impor minyak Rusia naik 55 persen dari tahun sebelumnya ke level rekor pada Mei lalu, menggusur Arab Saudi sebagai pemasok terbesar China.

China diketahui telah meningkatkan pembelian minyak Rusia meskipun permintaan berkurang akibat pembatasan COVID-19 dan ekonomi yang

upakan sumber minyak mentah terbesar China, ke posisi kedua dengan 7,82 juta ton.

Menyitir laporan S&P Global, selain ke Cina dan India, ekspor Rusia ke Belanda, Italia, dan Turki meningkat tajam pada awal Agustus. Impor ke tiga negara tersebut secara kumulatif naik 400 ribu barel per hari dibandingkan Juli lalu.

Ekspor minyak ke Belanda ini mendapatkan sorotan, terutama setelah sanksi Uni Eropa melarang sebagian besar aliran minyak Rusia pada awal tahun depan.

Adanya larangan Uni Eropa terhadap impor minyak Rusia membuat sekitar 3



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif

melambat.

Pada Februari lalu, China dan Rusia menyatakan persahabatan mereka tanpa batas. Perusahaan China, termasuk raksasa penyulingan negara Sinopec dan Zhenhua Oil, telah meningkatkan pembelian minyak mentah Rusia dalam beberapa bulan terakhir setelah ditawarkan diskon besar karena pembeli di Eropa dan Amerika Serikat menghindari energi Rusia sejalan dengan sanksi atas perangnya terhadap Ukraina.

Menurut data dari Administrasi Umum Kepabeanan China, impor ke Negeri Panda yang meliputi pasokan yang dipompa melalui pipa Samudra Pasifik Siberia Timur dan pengiriman melalui laut, mencapai hampir 8,42 juta ton bulan lalu.

Jumlah pasokan ini menggusur posisi Arab Saudi, yang sebelumnya mer-

juta barel per hari minyak mentah dari Rusia dan produk yang diimpor Eropa pada Juni/Juli lalu akan membutuhkan pembeli baru. Sebab, Jerman dan Polandia juga telah berkomitmen untuk menghentikan pengiriman melalui pipa utara Druzhba dari Rusia sekitar 500 ribu barel per hari.

Akibatnya, S&P Global Platts Analytics memperkirakan produksi minyak mentah dan kondensat Rusia akan turun 1,2 juta barel per hari antara Juli hingga Januari 2023, menjadi sekitar 1,5 juta barel per hari. Jumlah tersebut berada di bawah volume sebelum terjadinya konflik di Ukraina.

“Pada awal 2023, hampir 3,5 juta barel per hari minyak mentah dan produk yang masih mencapai Eropa harus dialihkan ke tempat lain. Sementara ketersediaan kapal tanker akan ditekan sanksi Barat,” ujar kepala

penasihat geopolitik Platts Analytics, Paul Sheldon, seperti dikutip dari S&P Global, Selasa, 23 Agustus 2022.

Kendalanya Teknis

Direktur Utama Pertamina Periode 2006-2009, Ari Soemarno, mengatakan, dari segi politis, wacana impor minyak mentah asal Rusia sebenarnya bisa saja dilakukan. Hal itu mengingat negara G7 yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis tidak menghalangi negara lain untuk pembelian minyak dan gas ke Rusia.

"Kita lihat saja contohnya Jepang.

saat ini terkena sanksi, sehingga berdampak pada teknik komersial finansial dan logistik.

"G7 sendiri menyatakan tidak akan menghalangi untuk negara lain membeli dari Rusia. Tetapi memang masalahnya di teknis," katanya.

Belum lagi persoalan pembayaran yang dilakukan Indonesia atas pembelian minyak asal Rusia. Indonesia tidak bisa melakukan pembayaran sebagaimana perdagangan biasa dalam bentuk Dolar maupun Euro.

"Saya lihat memang kendala teknis murni untuk implementasinya dari aspek komersial finansial dan logistiknya,

minyak dunia berada di level USD70 per barel. Sepanjang perang, harga minyak terus mendaki sampai ke level USD90-120 per barel.

Hingga 14 September 2022, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober merosot 0,5 persen menjadi USD87,31 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara, harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November melorot 0,9 persen menjadi USD93,17 per barel di London ICE Futures Exchange.

Lalu, harga minyak Rusia (Ural) lebih murah. Harga rata-rata bulanan Ural



Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden China Xi Jinping

Jepang masih impor LNG dengan jumlah yang besar dari Rusia yang sampai sekarang enggak pernah ada hambatan. India juga sudah impor dari Rusia sejak lama. Jadi kendala politis itu enggak ada," ujar Ari dalam Squawk Box, CNBC Indonesia, Selasa, 13 September 2022.

Menurut Ari, meski tidak ada kendala dari segi politis, namun kendala justru terdapat di bagian teknis implementasi impor minyak dari Rusia itu sendiri. Pasalnya, negeri beruang merah itu

karena tadi udah enggak bisa bayar pakai Euro, pakai Dolar, ya, Rusia mintanya dalam Rubel. Nah, Rubel kita bisa cari dari mana," kata dia.

Ekonom senior Indef, Aviliani, mengatakan tidak ada masalah jika Indonesia membeli minyak mentah dari Rusia yang lebih murah karena bisa menurunkan harga BBM di dalam negeri.

Apalagi, harga BBM dalam negeri memang bergantung dari harga minyak dunia yang dibeli Indonesia. Menurutnya, sebelum perang, harga

adalah sekitar USD74,7 per barel pada Agustus 2022. Angka ini bahkan turun jika dibanding bulan sebelumnya, yakni USD78,4 per barel.

"Enggak masalah. Kita kan bebas membeli ke mana saja sejauh itu bisa menekan harga BBM dalam negeri, karena kenaikan harga BBM itu dampaknya ke inflasi. Itu sejak zaman dulu," terang Aviliani.

Meski demikian, Aviliani mengingatkan pemerintah untuk tetap memastikan ulang apakah Rusia benar-benar

mau menjual minyak lebih murah atau tidak. Sebab, dia khawatir ada muatan politik dalam transaksi tersebut.

"Rusia pasti memanfaatkan perang ini untuk jual mahal, apakah kita benar dapat murah atau enggak? Kan tidak tahu, namanya juga politik," ujarnya.

Pertanyaan selanjutnya pun muncul, andaikata Indonesia bisa mengimpor minyak mentah murah dari Rusia, apakah lantas harga BBM yang baru saja naik bisa kembali turun?

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, Mamit Setiawan, menilai, apabila tawaran tersebut berhasil dilaksanakan, maka akan berdampak baik pada Indonesia dari segi pengurangan biaya produksi BBM.

"Saya kira jika opsi berhasil dilaksanakan akan sangat baik kita. Dengan harga yang jauh lebih murah, maka akan ada pengurangan biaya produksi untuk BBM kita. Tinggal seberapa besar kita mampu membeli dari total nilai impor kita," kata Mamit dikutip dari detikcom, 12 September 2022.

Mamit menekankan, semua kembali lagi pada rencana Indonesia mengimpor seberapa banyak minyak mentah Rusia. Jika pemerintah mampu mengimpor banyak, maka beban subsidi minyak akan berkurang secara signifikan yang ujungnya juga bisa menurunkan harga BBM.

"Jika mampu besar maka akan signifikan mengurangi beban. Dengan demikian, ada potensi untuk bisa menurunkan harga BBM. Jika sedikit ya tidak akan signifikan, karena impor yang lain nilainya sesuai dengan harga pasar," jelasnya.

Mamit menjelaskan, Indonesia merupakan nett importir minyak, di mana kebutuhannya mencapai 1,6 juta barel per hari. Sedangkan, produksinya hanya 620.000 barel per hari. Dengan demikian, nilai impor Indonesia masih sangat besar.

"Kalau impornya sedikit, sedangkan yang lain harga keekonomian, maka sama saja, tidak signifikan. Tapi untuk BBM umum, badan usaha wajib menyesuaikan ya. Menggunakan formula dalam Keputusan Menteri ESDM 62/2020, maka mereka harus mengikuti formula tersebut dan menyesuaikan harganya," katanya.

Di sisi lain, untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar, menurut Mamit, akan sulit untuk melakukan penyesuaian harga, lantaran beban kompensasi negara yang begitu besar.

"Kalau BBM JBT dan JBKP saya kira ini yang sulit, karena sejauh ini masih besar nilai kompensasi yang harus dibayarkan negara. Kecuali Presiden yang meminta," tegasnya.

Berbeda dengan Mamit, Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyebut, langkah mengambil tawaran Rusia adalah stupid decision atau pilihan bodoh. Pasalnya, pilihan tersebut justru akan mendatangkan lebih banyak kerugian ekonomi.

"Kalau RI ya agak berat. Karena ekspor RI ke AS atau negara-negara

pemerintah mengambil langkah ini, kemungkinan untuk BBM dalam negeri turun harga juga sangat kecil, bahkan mustahil. Dalam hal ini, biaya risiko belum diperhitungkan.

"Menurut saya tidak. Bahkan itu jadi mahal, karena beberapa risiko. Biaya risiko belum diperhitungkan di situ. Misal seperti sebelumnya Bu Nicke pernah beli langsung minyak Rusia secara B2B. Kemudian, kapal dicegat Greenpeace dan minyak enggak bisa diturunkan. Itu risikonya lebih tinggi. Belum lagi biaya diplomatik (AS)," ungkapnya.

Oleh karena itu, dia tidak menyarankan pemerintah menerima tawaran dari Rusia tersebut karena biaya yang akan semakin membebani Indonesia justru tidak akan membantu dalam



Ekonom senior Indef, Aviliani

Eropa, kita enggak bisa apa-apa. Bargaining position-nya kita lebih lemah. Kalau nekat ya agak berat, ya lebih baik jangan dilakukan. Kalau nekat, itu menurut saya stupid decision," ungkap Fahmy.

Menurutnya, langkah ini akan berat untuk dilalui Indonesia lantaran negara ini juga bergantung pada pendapatan ekspor ke negara-negara di Amerika dan Eropa. Berbeda dengan China dan India yang memiliki bargaining position yang lebih kuat.

"Mereka memang berhadapan dengan AS tanpa kekhawatiran sama sekali. Artinya, AS hanya mengontrol yang terjadi. Itu karena bargaining position China lebih kuat," tambahnya.

Bahkan, Fahmy menyebut, apabila

menurunkan harga BBM dalam negeri.

Sementara, Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri, Dendi Ramdani, menilai terdapat risiko yang perlu dihitung jika nantinya Indonesia melakukan impor minyak dari Rusia. Namun paling tidak terdapat dua hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, jika nantinya Indonesia merealisasikan impor minyak dari Rusia, dia berharap agar prosesnya dapat melalui government to government. Kedua, proses transaksinya dapat dilakukan dengan sistem barter.

"Karena kemungkinan settlement finansialnya akan ada complicated. Oleh sebab itu, dengan barter saya pikir mungkin akan lebih baik dari sisi keuangan," kata dia. ●

WAKTUNYA BERALIH DARI ENERGI FOSIL

Kementerian ESDM mencatat Indonesia mengimpor bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai 22 juta kiloliter pada 2021, atau naik dari 20,8 juta kiloliter pada 2020. Sebelum pandemi, impor BBM Indonesia bahkan sempat mencapai di atas 30 juta kiloliter per tahun.

Tingginya impor BBM Indonesia berbanding lurus dengan produksi minyak yang sejak lebih dari sepuluh tahun lalu terus mengalami penurunan. Selain itu, kapasitas kilang minyak Indonesia juga tidak mengalami penambahan.

Besarnya impor BBM ini menandakan Indonesia masih bergantung pada sumber daya asing, sehingga beban negara ke depannya akan semakin sulit bila ketergantungan ini tidak diredam.

Melihat besarnya impor BBM Indonesia, Menteri BUMN, Erick Thohir,

kita berubah dan kita enggak mungkin sebagai negara besar mendiamkan impor yang berlebihan. Kalau impor BBM, kebayang enggak gimana kita bisa jadi negara kuat. Nah, peta biru itu yang harus kita perbaiki,” kata Erick dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu, 7 September 2022.

Erick mengatakan akan mewajibkan seluruh perusahaan BUMN menggunakan mobil listrik. Terutama, direksi yang mendapatkan kendaraan dinas dari pemerintah. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengu-

kendaraan umum. Di mana, kendaraan umum yang dimiliki pemerintah nantinya tak lagi menggunakan BBM, melainkan listrik.

Selain Kementerian BUMN, Kementerian ESDM juga tengah berupaya untuk menekan ketergantungan terhadap impor BBM dan elpijim di antaranya dengan menggenjot kendaraan listrik serta program jaringan gas (Jargas), kompor listrik, dan gasifikasi.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan, masyarakat yang menggunakan sepeda motor listrik hanya cukup merogoh kocek Rp2.000 untuk jarak tempuh sekitar 30 kilometer. Sementara, dengan menggunakan kendaraan jenis BBM, paling tidak biaya yang harus dikeluarkan minimal Rp10.000 per liter untuk jarak tempuh yang sama.

“Contohnya sekarang ini berapa? Pertalite bensin Rp10.000 untuk 30 km untuk motor. Kalau sekarang pakai listrik 1 kWh bisa juga 30 km juga. Sekarang kalau mengisi listrik ongkosnya kan enggak sampai Rp2.000, sedangkan kalau memakai bensin Rp10.000. Jadi hemat Rp8.000. Bayangin kalau satu hari satu liter Rp8.000 kan lumayan,” kata Arifin di Gedung Kementerian ESDM, Jumat, 16 September 2022.

Maksimalkan Bioetanol dan Biodiesel

Selain mendorong pemakaian kendaraan listrik, Kementerian BUMN juga mendorong penekanan konsumsi BBM melalui program produksi BBM jenis baru berupa bahan bakar nabati (BBN) Biodiesel B40 dan Bioetanol.

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan langkah ini sebagai upaya untuk substitusi, sekaligus menekan pengeluaran negara untuk impor BBM.



mengaku pemerintah tidak akan berdi-
am diri. Menurutnya, pemerintah terus
mendorong pengalihan penggunaan
minyak ke sumber energi lainnya yang
berasal dari dalam negeri.

Erick menyebut, pemerintah akan
terus mengencakan pemakaian
kendaraan listrik, kompor listrik, hingga
mengembangkan proyek gasifikasi
batu bara yang bisa digunakan untuk
mengganti elpiji.

“Kita harus berubah. Ini waktunya

rangi ketergantungan Indonesia pada
impor minyak mentah.

“BUMN juga akan mengeluarkan
peraturan menteri (tentang) transisi se-
mula perusahaan BUMN harus meng-
gunakan mobil listrik dalam masa
waktu. Misalkan 2-3 tahun. Ini kita lagi
godok,” kata Erick usai rapat kerja de-
ngan Komisi VI DPR, Kamis, 8 September
2022.

Kementerian BUMN juga men-
dorong peningkatan penggunaan

Kementerian BUMN mendorong PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk meningkatkan produksi etanol dari sejumlah bahan baku, seperti singkong, jagung, ubi jalar, tebu dan fermentasi gula.

"Sebagian untuk gula, tetapi juga untuk etanol. Sekarang banyak negara seperti Brasil ataupun India sudah mendorong etanol sebagai substitusi untuk BBM. Karena etanol itu RON-nya sampai 130-an," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu, 24 Agustus 2022.

Erick mengatakan, sejumlah negara Asia seperti Thailand dan India sudah selangkah lebih maju dalam pemanfaatan etanol menjadi bahan campuran BBM. Negeri Gajah Putih Thailand sudah memproduksi Bioetanol 12 persen, sementara India 10 persen.

Selain untuk mengurangi besaran impor BBM dari luar negeri, bioetanol bisa menjadi sumber devisa negara jika diimpor ke pasar internasional. "Kalau kita bisa mengonsolidasikan ini, kita bisa kirim ke luar negeri. Dan saat kita impor BBM dengan kualitas yang kurang bagus, tapi kita campur dengan etanol, itu jadi BBM yang bisa dipergunakan untuk apapun," terang Erick.

Erick menjelaskan, kendati pemerintah telah mewujudkan konsolidasi kebijakan penekanan konsumsi BBM melalui kendaraan listrik dan BBN, pemerintah dirasa belum mampu untuk menutup kran impor BBM.

"Karena ada kenaikan dari harga petrokimia. Karena dia menjadi pertumbuhan kebutuhan BBM dan bahan baku dari petrokimia itu salah satunya dari minyak mentah yang diturunkan menjadi plastik, baju dan lain-lain. Saat ini kita masih berpersepsi penggunaan BBM hanya untuk kendaraan-kendaraan yang kita pakai," ujarnya.

Kementerian ESDM sendiri akan segera meluncurkan BBN bioetanol dengan komposisi bauran 2,5 persen tetes tebu dan 97,5 persen bensin.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan, campuran tetes tebu bisa meningkatkan kadar oktan atau kualitas bensin.

"(Tahun ini) tinggal nyampur doang,

kajiannya sudah. Kalau Pertamina sudah siap dari tangkinya, sudah bisa jalan," kata Dadan di Kantor Kementerian ESDM, awal Agustus.

Dadan mengaku pengembangan bioetanol lebih sulit daripada pengembangan biodiesel yang saat ini sudah mencapai B40. Alasan utamanya karena belum tersedianya suplai bahan baku tetes tebu untuk menjamin keberlanjutan pasokan. Tetes tebu saat ini masih digunakan sebagai bahan baku di industri pemanis dan menjadi komoditas ekspor.

"Bahan bakunya tidak bisa dijamin karena jumlahnya enggak banyak. Dia

pabrik yang terletak di Mojokerto mampu memproduksi bioetanol hingga 30.000 kilo liter per tahun.

"Pabrik di Malang mereka produksi untuk industrial grade (suplai Industri). Sementara untuk fuel grade (bahan bakar kendaraan) untuk keperluan sendiri atau sesuai permintaan. Karena suplai etanolnya juga terbatas, jadi belum bisa diimplementasikan secara nasional," jelas Edi.

Bioetanol bisa digunakan pada moda transportasi darat berbahan bakar gasoline atau bensin. Saat ini, ada dua lembaga yang fokus pada pengembangan bioetanol, yakni Badan Usaha Bahan



Menteri BUMN, Erick Thohir

juga dibutuhkan di industri lain dan jadi komoditas ekspor juga. Kalau dipakai berlebihan, bakal mengganggu untuk keperluan yang lain," ujarnya.

Walau begitu, pihaknya tetap mengupayakan agar pemanfaatan bioetanol bisa diwujudkan. Dadan mengatakan saat ini Kementerian ESDM telah menjalin komunikasi dengan dua pabrik bioetanol di Malang dan Mojokerto.

"Kami ingin supaya tidak hanya solar saja yang ada campurannya, tapi bensin juga ada. Semoga nanti keekonomiannya bisa masuk," harap Dadan.

Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Edi Wibowo, menambahkan, pabrik bioetanol yang berlokasi di Malang memiliki kapasitas produksi tahunan sejumlah 10.000 kilo liter. Sementara,

Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati.

Pengembangan bioetanol juga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015. Di sana, diatur penggunaan bioethanol E5 pada 2020 dan secara bertahap meningkat ke E20 pada 2025.

Namun dalam perjalanannya, rencana tersebut menghadapi kendala. Pemerintah akhirnya menurunkan kandungan etanol menjadi 2 persen. Setelah serangkaian uji coba dilakukan, termasuk dengan Pertamina, penerapan E2 pun masih jauh dari harapan, karena terkendala ongkos produksi yang masih tinggi. Sehingga kehadiran etanol dinilai kurang kompetitif sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan. ●

BLT

Gunawan Effendi

Mengapa harus Rp600 ribu? Bukan lebih besar, atau lebih kecil. Memang soal Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun ini. Utamanya BLT Bahan Bakar Minyak dan BLT Bantuan Subsidi Upah.

Sedangkan BLT pertama di Indonesia tercatat pada 2005 dengan nilai nominalnya dua kali Rp600 ribu. Ya, BLT 2005 total nilainya Rp1,2 juta, dengan empat kali pencairan. Masing-masing Rp300 ribu.

Angka BLT turun pada 2008 menjadi Rp700 ribu. Dua kali pencairan. Pertama Rp300 ribu. Yang kedua lebih besar, Rp400 ribu.

Pada 2009 hingga 2012 tak ada pembagian BLT. Namun, muncul lagi pada 2013.

Bank Dunia mencatat, pada akhir Juni 2013, dan sekali lagi pada November 2014 dan 2015, Pemerintah Indonesia kembali mengurangi subsidi bahan bakar dan memberikan kompensasi kepada rumah tangga miskin dan hampir miskin dengan BLT sementara yang serupa dengan BLT. Naman-ya BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat).

Pada 2013 itu, sekitar 15,5 juta (25 persen termiskin, yang dipilih melalui BDT/DTKS) ditargetkan untuk menerima Rp600.000 (sekitar US\$53 saat itu) dalam dua fase, setara dengan sekitar 11 persen anggaran konsumsi

mereka. Namun, memang lebih sedikit dibanding BLT sebelumnya. BLSM diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, juga melalui pengiriman pembayaran oleh PT Pos.

Dibandingkan dengan BLT sebelumnya (yang ditargetkan melalui pemerintah daerah, karena BDT/DTKS [Basis Data Terpadu/Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial] belum tersedia saat itu), akurasi penargetan BLSM lebih tinggi terhadap 20 persen populasi termiskin (40 persen pada 2013 berbanding 36 persen pada BLSM 2005), meskipun cakupan di antara yang termiskin lebih rendah (41 persen vs 50 persen pada 2005). Secara keseluruhan, jangkauan BLSM tidak lebih baik dibandingkan dengan BLT.

Terlepas dari sistem identifikasi berbasis kartu baru untuk

penerima BLSM yang memenuhi syarat, akses rumah tangga dan individu ke proses BLSM tetap sama seperti BLT. Kendali penerima bantuan atas dananya malah lebih rendah pada 2013 dibandingkan dengan 2005/2006. Sekitar seperempat dari penerima BLSM periode 2013, misalnya, mengakui adanya pemotongan bantuan untuk mereka.

Bank Dunia dalam laporan "Investing in People: Social Protection for Indonesia's 2045 Vision" yang terbit pada April 2020 itu menegaskan, iterasi (tata kelola data) bantuan tunai darurat untuk guncangan ekonomi dan tanggap bencana di masa depan harus belajar dari pencapaian dan tantangan implementasi BLT dan BLSM. Akan banyak juga yang mencatat pengalaman penyaluran bantuan sosial 2020 terakita pandemi Covid-19 yang menyeret Menteri Sosial sebagai terpidana merupakan pelajaran berharga dalam pelaksanaan program-program semacam ini.

Nah, kembali mengapa Rp600 ribu? Bank Dunia sudah menyebutkan, angka yang dengan nilai kurs 2022 hanya

mendekati 50 dolar Amerika Serikat itu merupakan sekitar 11 persen biaya konsumsi per periode pembagian. Memang bukan untuk mencukupi kebutuhan, melainkan sekadar bantalan agar ekonomi tetap bergerak dan tumbuh. BLT kali ini pun belum tentu mencakup 20 persen kelompok termiskin, yang berkisar 54 juta jiwa atau sekitar 13-14 juta rumah tangga.

Dari mana angka konsumsi itu berasal? Badan Pusat Statistik yang paling layak menjawabnya. Angka itu berasal dari survei biaya hidup. Data yang digunakan BLT BBM dan BSU tahun ini mungkin kadaluarsa karena publikasi survei biaya hidup terakhir pada 2020 berdasarkan data 2018. BPS baru melaksanakan survei lagi pada 2022, sehingga hasilnya boleh jadi harus menunggu waktu paling cepat pada 2023.

Toh masih banyak dana kelolaan lebih besar dan perlu perhatian ketimbang sekadar BLT sebagaimana postur APBN 2023 yang akan melampaui Rp2.400 triliun. Begitu juga soal iterasi, terkait heboh Bjorka yang meretas aneka data beriringan dengan pembagian BLT Rp600 ribu itu. ●



info indonesia

www.infoindonesia.id

Network

INFO PASANG
KIKI IBRAHIM
+62 818 931 562
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **info** kepada masyarakat Sumsel

Koran Cetak Info Indonesia



www.infoindonesia.id

facebook @infoindonesia.id twitter @_infoindonesia

Instagram @info_indonesia.id YouTube : infoindonesiatv

JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id



**TURUN
GUNUNG
DAN TURUN
TAHTA**